

**SKRIPSI**

**KONTRIBUSI MUHAMMAD AL-FATIH TERHADAP  
STABILITAS POLITIK TURKI USMANI (1451-1481 M)**



**OLEH**

**NASRUL MUHAJIR  
NIM: 2120203880230007**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2025 M/1447 H**

**KONTRIBUSI MUHAMMAD AL-FATIH TERHADAP  
STABILITAS POLITIK TURKI USMANI (1451-1481 M)**



**OLEH**

**NASRUL MUHAJIR  
NIM: 2120203880230007**

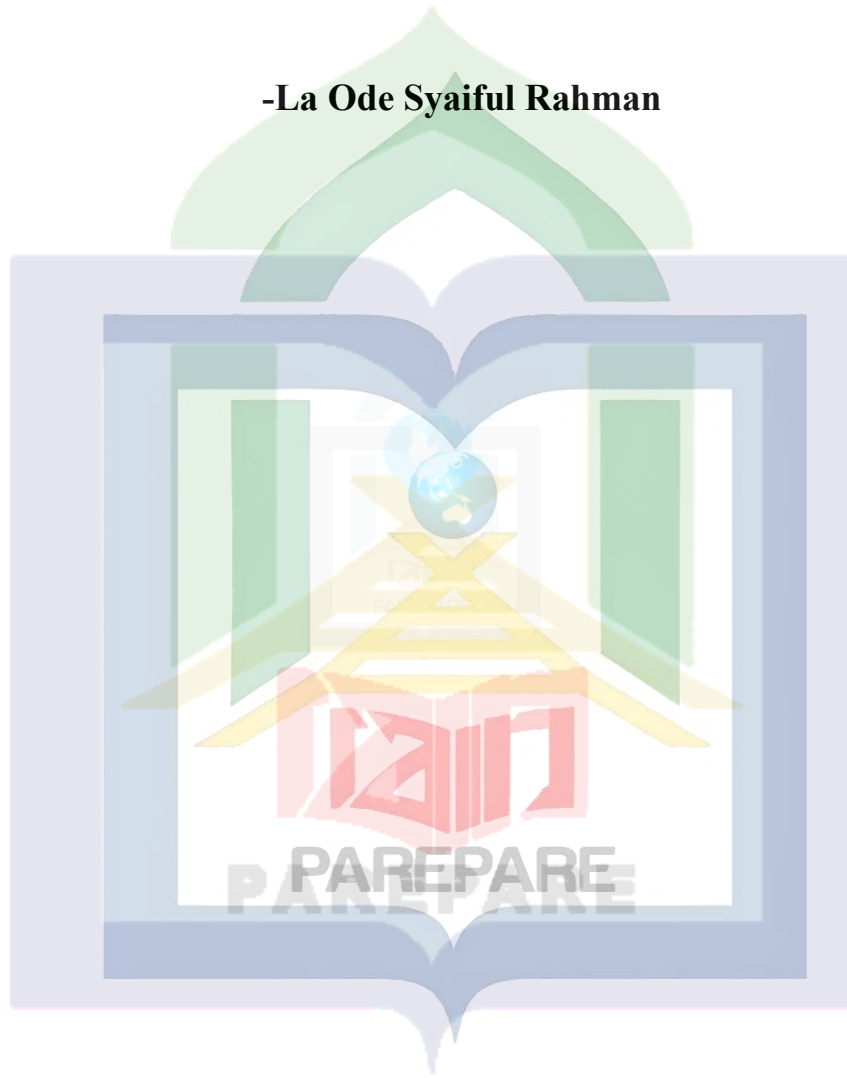
Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora  
(S.Hum) Pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab  
dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2025 M/1447 H**

## **MOTTO**

**Sudah saatnya saya kerja buat masa depan, bukan buat bayar kost  
bulan depan.**

**-La Ode Syaiful Rahman**



## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kontribusi Sultan Muhammad Al-Fatih Terhadap  
Stabilitas Politik Turki Usmani (1451-1481 M)  
Nama Mahasiswa : Nasrul Muhajir  
Nomor Induk Mahasiswa : 2120203880230007  
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah  
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas  
Ushuluddin Adab dan Dakwah  
No. B-2307/In.39/ FUAD.03/PP.00.9/07/2024

Disetujui Oleh;

Pembimbing Utama : Dra. Hj. Hasnani, M.Hum  
NIP : 196203111987032002



Mengetahui :

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah



Dr. A. Nurhidam, M. Hum  
NIP. 196412311992031045

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kontribusi Sultan Muhammad Al-Fatih Terhadap  
Stabilitas Politik Turki Ustmani (1451-1481 M)  
Nama Mahasiswa : Nasrul Muhajir  
Nomor Induk Mahasiswa : 2120203880230007  
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah  
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas  
Ushuluddin Adab dan Dakwah  
No. B-2307/In.39/ FUAD.03/PP.00.9/07/2024  
Tanggal Kelulusan : 26 Juni 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dra. Hj. Hasnani, M.Hum

(Ketua)

(.....)

Dr. Musyarif, S.Ag., M.Ag

(Anggota)

(.....)

Usman, M.Hum

(Anggota)

(.....)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

  
Dr. A. Nurhidam, M. Hum  
NIP. 196412311992031045

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nursia dan Ayahanda Muhajir tercinta dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra. Hj. Hasnani, M.Hum selaku dosen pembimbing Skripsi Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Nurkidam, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Dr. Iskandar, M.Sos.I. selaku Dekan I Bidang AKKK, serta Ibu Dr. Nurhikmah, M.Sos.I. selaku Wakil Dekan II Bidang AUPK. Atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. Ahmad Yani, S.Hum., M., Hum sebagai ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam yang telah meluangkan waktu dan mendidik serta telah mengembangkan program studi Sejarah Peradaban Islam.
4. Bapak dosen penguji Satu, Bapak Dr. Musyarif, S.Ag., M.Ag dan Bapak dosen penguji dua, Bapak Usman M.Hum yang telah memberikan kritik dan saran selama penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Maemunah Marzuki, M.Cs selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam pengurusan dan kelancaran proses akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah mendidik penulis mulai dari semester 1 sampai semester 6 yang sabar dalam mendidik dan mempunyai kehebatan tersendiri dalam materi perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai ke berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman Jurusan Sejarah Peradaban Islam angkatan 2021 yang telah menemani perjalanan suka dan duka perkuliahan dari awal hingga akhir hari ini.
10. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan, Semoga segala kebalkan dan ketulusan mereka

mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Dan bernilai sebagai amal jariyah. Akhimya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

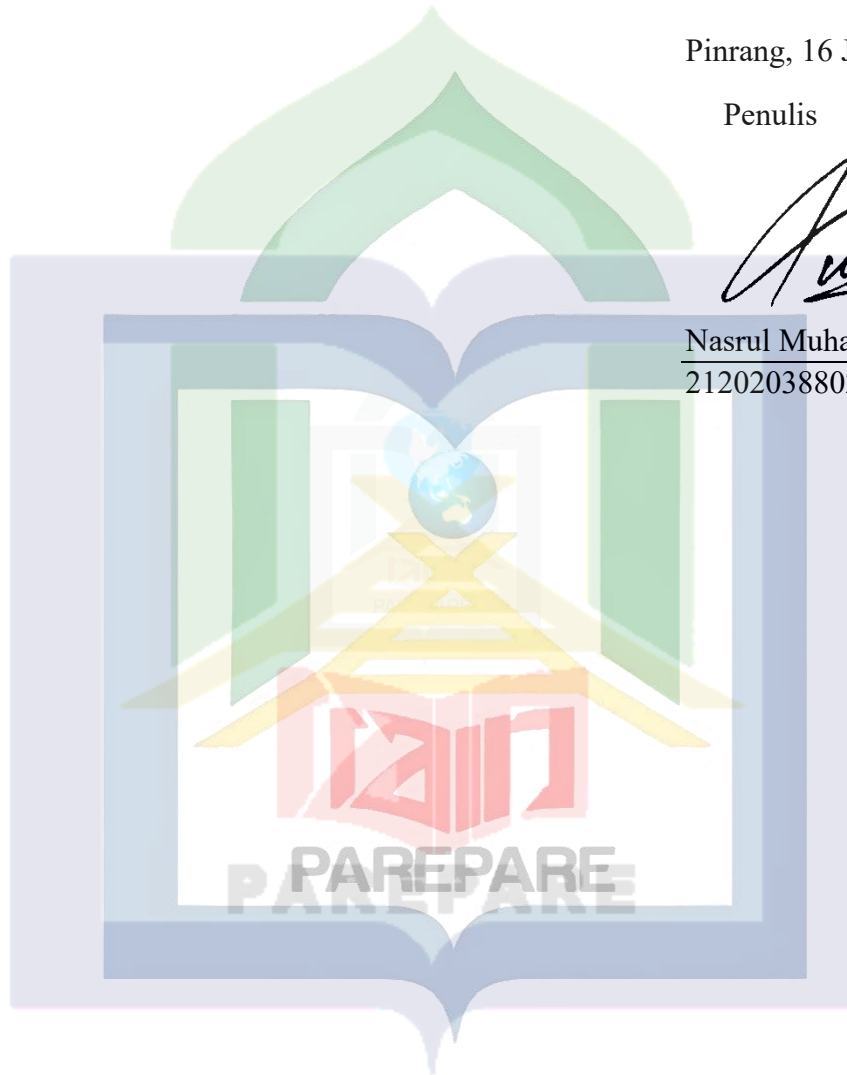
Pinrang, 16 Juni 2025

Penulis



Nasrul Muhajir

2120203880230007





## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

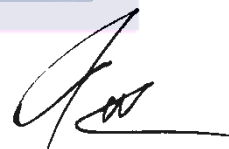
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Nasrul Muhajir  
NIM :2120203880230007  
Tempat/Tanggal Lahir :Pinrang, 13 Novermber 2002  
Program Studi :Sejarah Peradaban Islam  
Fakultas :Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Judul Skripsi :Kontribusi Muhammad Al-Fatih Dalam Bidang  
Stabilitas Politik (1451-1481)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya seni sendiri/ apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini duplikat, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 16 Juni 2025

Penulis



Nasrul Muhajir

2120203880230007

## ABSTRAK

Nasrul Muhajir, *Kontribusi Muhammad Al-Fatih Dalam Stabilitas Politik Turki Usmani (1451-1481 M)* (dibimbing oleh Hj. Hasnani).

Penelitian ini mengkaji situasi politik Kesultanan Turki Usmani pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih (1451–1481 M) serta kontribusinya dalam menciptakan stabilitas politik. Permasalahan yang diangkat mencakup dua fokus utama: bagaimana kondisi politik yang dihadapi Sultan Muhammad Al-Fatih selama masa pemerintahannya, dan bagaimana kontribusinya dalam meredam konflik internal serta menanggulangi tekanan eksternal dari negara-negara Kristen Eropa.

Jenis penelitian ini adalah pustaka (library research) dengan pendekatan historis. Pengumpulan data dilakukan melalui metode heuristik dengan menelusuri berbagai sumber tertulis seperti buku dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan menggunakan teori konflik dan teori kepemimpinan untuk memahami dinamika pertentangan politik serta gaya kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih dalam merespons tantangan internal dan eksternal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi politik saat itu diwarnai pemberontakan Janissary, penolakan elit terhadap reformasi, serta tekanan dari kekuatan Eropa. Melalui reformasi administrasi, penguatan sistem hukum dan militer, serta kebijakan diplomasi dan toleransi, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menciptakan stabilitas politik yang kokoh di dalam negeri dan memperkuat posisi Kesultanan Turki Usmani secara global.

Kata Kunci: Muhammad Al-Fatih, stabilitas politik, Kesultanan Turki Utsmani.

## ABSTRACT

Nasrul Muhajir, *The Contribution of Muhammad Al-Fatih to the Political Stability of the Ottoman Empire (1451–1481 M)* (supervised by Hj. Hasnani).

his research examines the political situation of the Ottoman Empire during the reign of Sultan Muhammad Al-Fatih (1451–1481 M) and his contributions to establishing political stability. The study focuses on two main problems: the political conditions faced by Sultan Muhammad Al-Fatih during his rule, and how his efforts contributed to overcoming internal conflicts and external pressures from European Christian powers.

This study is a library research using a historical approach. Data were collected through heuristic methods by exploring various written sources such as books and scholarly articles. The analysis was conducted using conflict theory and leadership theory to understand the dynamics of political tensions and the leadership style of Sultan Muhammad Al-Fatih in addressing both internal and external challenges.

The findings indicate that the political situation was marked by Janissary rebellions, elite resistance to reform, and pressure from European forces. Through administrative reforms, strengthening of legal and military systems, as well as diplomatic and tolerant policies, Sultan Muhammad Al-Fatih succeeded in achieving strong political stability within the state and enhancing the global standing of the Ottoman Empire.

Keywords: Muhammad Al-Fatih, political stability, Ottoman Empire.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Defenisi Istilah/Pengertian Judul .....	8
F. Tinjauan Penelitian Relevan .....	12
G. Landasan Teori .....	20
1. Teori Konflik .....	21
2. Teori Kepemimpinan .....	32
H. Metode Penelitian .....	42
<b>BAB II SITUASI POLITIK PADA MASA SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH (1451-1481) .....</b>	<b>52</b>
A. Latar Belakang Historis Kesultanan Utsmani Sebelum Pemerintahan Al-Fatih .....	52
B. Dinamika Politik Internal Kesultanan Utsmani .....	63

C. Tekanan Eksternal dari Eropa dan Balkan .....	68
D. Hubungan antar-etnis dan agama dalam masyarakat Utsmani. ....	77
<b>BAB III KONTRIBUSI MUHAMMAD AL-FATIH TERHADAP</b> <b>STABILITAS POLITIK TURKI USMANI (1451-1481) .....</b>	<b>82</b>
A. Bidang Pendidikan.....	85
B. Bidang Administrasi dan Hukum.....	87
C. Kebijakan Ekonomi .....	90
D. Sistem Militer dan Pertahanan.....	94
E. Ekspansi Wilayah.....	98
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>XIV</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>XIX</b>
<b>BIODATA.....</b>	<b>XXVI</b>

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Tinjaun Penelitian Relevan	13-18

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Pertempuran Varna", Stanisław Chlebowski, 1865-1875. Minyak di atas kan-vas, 112 X 190 cm	56

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Buku Fisik	XIX
2	E-Book	XX
3	SK.Pembimbing	XXV

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setelah kekalahan Turki Ustmani yang di pimpin oleh Sultan Murad II melawan Pasukan Salibis pada tahun 846/1442 M, memaksa Pasukan Turki Ustmani menandatangani perjanjian damai. Perjanjian itu dilaksanakan di Szeged yang terletak di bagian tenggara negara Hungaria pada tahun 848 H/1444 M. Berdasarkan perjanjian itu, Turki Ustmani dan Hungaria memberlakukan gencatan senjata selama 10 tahun dengan beberapa tuntutan yang harus dipenuhi oleh Turki Ustmani.

Diantaranya, (1) menyerahkan serbia dan mengakui Geoge Brancovites sebagai Penguasanya, (2) menyerahkan Valiche kepada Hungaria, (3) membayar uang tebusan untuk suami puteri Sultan yang tertangkap musuh yang bernama Mahmud Syalabi sebanyak 60.000 duqiyah. Perjanjian tersebut dibuat dalam dua bahasa yaitu bahasa Turki dan Bahasa Hungaria. Raja Ladislas dari Hungaria bersumpah menggunakan injil dan Sultan Murad II menggunakan Al-Qur'an.<sup>1</sup>

Setelah itu Sultan Murad II kembali ke Anatolia, kemudian mundur dari jabatannya sebagai Sultan yang digantikan oleh anaknya yang masih berusia 12 tahun yaitu Muhammad Al-Fatih. Mendengar hal itu, orang-orang Eropa langsung meminta Raja-Raja Nasrani untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati oleh Turki Ustmani dan Hungaria dengan dalih bahwa perjanjian itu tidak sah karena

---

<sup>1</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, (2003), h.87



dilakukan tanpa persetujuan dari Paus sebagai “wakil Yesus” dibumi.

Raja Ladislas kemudian mengorganisir pasukan yang sebagian besar terdiri dari tentara reguler Hungaria, serta pasukan dari Polandia, Transylvania, Kroasia, Bosnia, unit kavaleri berat dari Eropa Barat, dan tentara bayaran dari Eropa Timur. Total pasukan gabungan mencapai 16.000 orang, ditambah 4.000 orang Wallachia yang berada di wilayah Nicopolis. Murad II, yang telah pensiun setelah perjanjian tersebut, dipanggil kembali untuk memimpin tentara Ottoman. Pada tanggal 10 November 1444, kedua pasukan bertemu dalam Pertempuran Varna, yang berlangsung dekat benteng Varna di Laut Hitam, Bulgaria. Setelah kedua pasukan saling berhadapan dalam Pertempuran Varna, hasil akhir dari pertempuran ini memberikan dampak besar bagi pihak Salib dan Kesultanan Utsmaniyah. Menurut Thomas:

The Ottoman Empire achieved victory despite suffering heavy losses, while the Crusader army lost King Ladislas and more than 15,000 soldiers. Many Crusaders were crippled by frostbite, while even more were killed in skirmishes that followed, and a number of Europeans were also captured. Hungary was once again entangled in a civil war until Hunyadi was elected Regent for the infant Ladislaus in June 1446. Meanwhile, Branković retained control over Serbia.<sup>2</sup>

Terjemahan:

Kesultanan Utsmaniyah meraih kemenangan meskipun mengalami kerugian besar, sementara tentara Salib kehilangan Raja Ladislas dan lebih dari 15.000 prajurit. Banyak tentara Salib menderita kelumpuhan akibat radang dingin, sementara lebih banyak lagi yang tewas dalam pertempuran kecil yang terjadi setelahnya, dan sejumlah orang Eropa juga ditangkap. Hongaria kembali terjatuh dalam perang saudara hingga Hunyadi terpilih sebagai Bupati untuk bayi Ladislaus pada bulan Juni 1446. Sementara itu, Branković tetap menguasai Serbia.

Hal ini menggambarkan konsekuensi besar dari Pertempuran Varna bagi pihak Kristen Eropa, terutama Hongaria, dan memperlihatkan keberhasilan militer Kesultanan Utsmaniyah meskipun harus membayar harga yang mahal. Kematian

---

<sup>2</sup> Thomas F. Madden, *The New Concise History of The Crusades*, United States of Amerika: Rowman & Littlefield Publishers, INC, (2005).



Raja Ladislas menjadi pukulan telak bagi moral tentara Salib dan memperburuk ketidakstabilan politik di Hongaria. Sementara itu, penderitaan akibat cuaca ekstrem (radang dingin) dan kerugian dalam pertempuran lanjutan menunjukkan bahwa kekalahan ini tidak hanya militer, tapi juga kemanusiaan. Penangkapan sejumlah orang Eropa semakin mempertegas posisi superior Utsmaniyah dalam konflik ini.

Kondisi Hongaria yang kembali dilanda perang saudara dan terpaksa mengangkat Hunyadi sebagai wali penguasa mencerminkan krisis kepemimpinan yang dialami pasca-kekalahan. Di sisi lain, keberlangsungan kekuasaan Branković di Serbia menunjukkan bahwa meski ada kekacauan di Hongaria, stabilitas politik lokal di wilayah Balkan tetap bertahan, setidaknya untuk sementara. Secara keseluruhan, ini memberikan gambaran jelas tentang dampak strategis dan politik dari kemenangan Utsmaniyah atas kekuatan Salib di pertengahan abad ke-15.

Kemenangan Turki atas tentara Hongaria pada 10 November 1444, di daerah yang kini dikenal sebagai Bulgaria, diikuti oleh keberhasilan mereka dalam Pertempuran Kosovo Kedua pada tahun 1448. Kedua kemenangan tersebut mengakhiri upaya negara-negara Eropa untuk menyelamatkan Konstantinopel (sekarang Istanbul) dari invasi Turki. Ini memberikan kesempatan bagi Kekaisaran Ottoman untuk memperkuat dan memperluas pengaruhnya di Balkan. Balasan dari pihak Kristen terhadap kemajuan pasukan Muslim Ottoman berakhir dengan kekalahan di Varna, yang membuka jalan bagi penaklukan Konstantinopel oleh Ottoman.<sup>3</sup> Pembatalan perjanjian ini merupakan tanda permusuhan yang sangat besar dari musuh agama Allah ini. Oleh sebab itulah, Allah mewajibkan atas kaum muslimin untuk memerangi mereka. *Allah berfirman dalam Qs. At-Taubah/9: 12.*

---

<sup>3</sup> Tony Bunting, *Pertempuran Varna Sejarah Balkan 1444*, (Encyclopedia Britannica, 2024). <https://www.britannica.com/event/Battle-of-Varna>. (24 Januari 2025)

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أِيمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ  
لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

*Terjemahnya:*

*Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.<sup>4</sup>*

Dalam ayat ini dibahas beberapa masalah. Pertama, Firman Allah SWT, وَإِنْ نَكَثُوا yang berarti "Jika mereka merusak". Kata نَكَثُوا (dibaca: nakathū) bermakna membatalkan. Makna asal kata ini adalah segala sesuatu yang telah diikat kemudian dilepaskan. Kata ini digunakan untuk merujuk pada sumpah dan perjanjian sebagai istilah kiasan. Kedua, Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar kewajiban membunuh setiap orang yang mencela agama, karena orang tersebut dianggap kafir. Mencela agama berarti mengucapkan sesuatu yang tidak pantas terhadap agama atau menghina hal-hal yang termasuk dalam agama, mengingat adanya dalil pasti tentang kebenaran dasar-dasar agama dan keabsahan cabang-cabangnya. Ketiga, Apabila seorang kafir dzimmi (non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam) mencela agama, maka jaminan keamanannya dianggap telah dicabut. Keempat, Jika seorang dzimmi terlibat dalam peperangan melawan kaum Muslim, maka perjanjiannya batal, dan harta serta anak-anak yang bersamanya dianggap sebagai fai' (harta yang diperoleh tanpa peperangan). Kelima, Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang ahli dzimmah yang mencela Rasulullah SAW,

---

<sup>4</sup> Mohammad Baharun, *Buku Pintar Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer (2014).

menghina Rasulullah SAW, merendahkan martabat Rasulullah SAW, atau menyifati beliau dengan cara yang tidak pantas, maka ia menjadi kafir. Oleh karena itu, ia boleh dibunuh, sebab jaminan keamanan dan perjanjian tidak diberikan kepada orang seperti ini. Keenam, Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman seorang yang mencela agama, kemudian masuk Islam untuk menghindari hukuman mati. Ketujuh, Firman Allah SWT, *فَقَتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ* yang berarti "Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir."<sup>5</sup>

Akibat dari pembatalan perjanjian Szeged dan kekalahan umat Kristen Eropa pada pertempuran Varna tahun 1444 M dan Kosovo 1448, konflik antara Turki Ustmani dengan kaum kristen Eropa kembali memanas. Hal itu berdampak ke pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Situasi politik semakin memburuk ketika umat Kristen eropa mengetahui Ambisi Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel untuk meneruskan dan mewujudkan cita-cita dan perjuangan para pendahulunya. Serta menjadikan Konstantinopel sebagai pusat peradaban Islam. Jika penaklukan berhasil, menjadi momentum penting bagi kekhalifahan Utsmani untuk memperluas pengaruhnya ke wilayah Mediterania Timur dan semenanjung Balkan. Menurut Fachran Haikal dkk, dalam artikelnya menyatakan bahwa peristiwa ini menjadi titik krusial bagi stabilitas politik Utsmani sebagai salah satu kekuatan besar pada masa itu, bahkan mungkin satu-satunya di dunia. Tanggal 29 Mei 1453 juga menandai berakhirnya Abad Pertengahan.<sup>6</sup> Serta untuk mewujudkan hadist Rasulullah Saw. Salah satu bisyarah Rasulullah:

---

<sup>5</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi JIL. 8*, Jakarta : Pustaka Azzam, Terj. Bahasa indonesia (2009). h.188-195

<sup>6</sup> Muhammad Fachran Haikal, *et al.*, eds., "Strategi Militer Penaklukan Konstantinopel Dibawah Kepemimpinan Muhammad Al-Fatih Sebagai The Best Leader", *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.1 (2023)

لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ وَلَنِعَمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعَمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ

*Artinya:*

*“Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu”.* (HR. Ahmad)<sup>7</sup>

Sultan Muhammad Al-Fatih dikenal bukan hanya karena keberaniannya dalam merebut Konstantinopel, tetapi juga karena kemampuannya dalam menjaga kestabilan politik di tengah situasi yang tidak mudah. Saat ia memimpin Kesultanan Turki Utsmani dari tahun 1451 hingga 1481 M, banyak tantangan besar yang harus ia hadapi. Di dalam negeri, muncul gejolak dari kalangan elit dan tentara Janissary yang menolak sebagian kebijakannya. Dari luar, tekanan datang dari negara-negara Kristen Eropa yang khawatir dengan perluasan pengaruh Utsmani. Meski begitu, Muhammad Al-Fatih berhasil menata sistem pemerintahan yang kuat, menerapkan hukum secara adil, memperkuat angkatan bersenjata, dan menjalin hubungan damai dengan kelompok non-Muslim. Ini semua membuktikan bahwa kepemimpinannya tidak hanya berbasis kekuatan militer, tapi juga pada kecermatan politik dan kecerdasan strategi.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena sebagian besar kajian tentang Sultan Muhammad Al-Fatih selama ini lebih fokus pada sisi militernya atau pendidikannya. Padahal, aspek politik yang sangat penting, seperti bagaimana ia menjaga kestabilan negara di tengah tekanan dan perpecahan, belum banyak

---

<sup>7</sup> Abu Yusuf Ahmad Sabiq, *Derajat Hadits Bahwa Sebaik-Baik Pemimpin Adalah Yang Menaklukan Konstantinopel* (Muslim.or.id, 2017. <https://muslim.or.id/29300-derajat-hadits-bahwa-sebaik-baik-pemimpin-adalah-yang-menaklukan-konstantinopel.html> (24 Januari 2025)).

dikupas secara serius. Dalam konteks saat ini, pelajaran dari kepemimpinan Al-Fatih sangat relevan, apalagi ketika kita melihat konflik antara Iran dan Israel yang terus berkecamuk. Perselisihan itu bukan sekadar masalah teritorial atau ideologi, tapi juga menunjukkan lemahnya sistem politik yang tidak mampu menahan krisis dan menjaga keseimbangan kekuasaan di kawasan. Di sinilah pentingnya belajar dari sejarah, dari pemimpin yang berhasil menyatukan bangsa dalam masa-masa sulit.

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka penelitian ini diarahkan untuk memahami lebih dalam bagaimana situasi politik pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih berlangsung, serta sejauh mana perannya dalam menciptakan stabilitas politik bagi Turki Utsmani. Kedua hal inilah yang menjadi pokok dalam rumusan masalah penelitian ini

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana situasi politik pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih 1451-1481 M?
2. Apa kontribusi Sultan Muhammad Al-Fatih terhadap stabilitas politik 1451-1481 M pada masa pemerintahannya?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis situasi politik pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih dari tahun 1451 hingga 1481 M.
2. Mengidentifikasi kontribusi Sultan Muhammad Al-Fatih terhadap stabilitas politik Kesultanan Turki Utsmani selama periode pemerintahannya.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan dengan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sejarah, khususnya mengenai periode pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat teori-teori yang berkaitan dengan stabilitas politik, dengan memberikan contoh konkret dari kebijakan dan tindakan Sultan Muhammad Al-Fatih yang berhasil menciptakan stabilitas dalam situasi politik yang kompleks.

Di sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa yang tertarik dalam studi sejarah, politik, dan kebudayaan, serta memberikan wawasan tentang bagaimana kepemimpinan yang efektif dapat mempengaruhi stabilitas politik. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pengambil kebijakan saat ini dalam memahami pentingnya strategi kepemimpinan dan kebijakan yang tepat dalam menciptakan stabilitas politik, serta bagaimana menghadapi tantangan yang serupa di masa kini.

#### E. Defenisi Istilah/Pengertian Judul

##### 1. Stabilitas Politik

Stabilitas Politik terdiri dari dua kata yaitu Stabilitas dan Politik. Stabilitas menurut KBBI yaitu kemantapan, kestabilan, keseimbangan.<sup>8</sup> Sedangkan kata "politik" secara etimologis berasal dari bahasa Yunani dan Latin, yaitu *politicus* dan *politicos* yang berarti berkaitan dengan warga negara.<sup>9</sup> Politik

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

<sup>9</sup> Ibnu Muchtar, *Partai Kuning*, Bina Dakwah, No. 228 (1999).



juga berasal dari kata polis (Negara Kota). Dari kata ini muncul beberapa kata seperti *polities* (Negara Kota), *politikos* (Kewarganegaraan), *politike tehne* (Kemahiran Politik), *politike episteme* (Ilmu Politik). secara terminologis banyak para ahli yang memberi arti politik dalam bahasa yang berbeda, sehingga ada banyak arti yang melekat pada kata politik, seperti *power* (Kekuasaan), *Justice* (Keadilan), *order* (Tatanan Masyarakat).<sup>10</sup>

Di zaman Yunani kuno, masyarakat saling berinteraksi untuk mencapai kesejahteraan, yang menurut Aristoteles merupakan kebaikan dalam hidup. Politik pada masa itu dipahami sebagai proses interaksi antara individu untuk mencapai kebaikan bersama. Seiring perkembangan waktu, para ahli politik memberikan berbagai interpretasi tentang politik, yang memperkaya pemahaman kita. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian pembuatan keputusan publik dalam suatu masyarakat di wilayah tertentu, didukung oleh instrumen yang bersifat otoritatif dan koersif. Sementara itu, Andrew Heywood menyatakan bahwa politik adalah aktivitas suatu bangsa yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan, dan mengubah peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupan mereka, yang menunjukkan bahwa politik tidak terlepas dari dinamika konflik dan kerja sama.<sup>11</sup>

Berdasarkan teks di atas, stabilitas politik bisa diartikan sebagai keadaan di mana sistem politik di suatu negara atau masyarakat berjalan dengan baik dan

---

<sup>10</sup> Proborini Hastuti, "Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia", *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan Ri Tahun 2018* (2018)

<sup>11</sup> Muhammad Muthahari Ramadhani, *et al.*, eds., *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022).

teratur. Ini berarti ada kemantapan dan keseimbangan dalam cara pengambilan keputusan serta interaksi antara individu. Ketika stabilitas politik terjaga, negara dapat mengelola konflik dengan baik dan menjaga ketertiban, sehingga peraturan yang ada dapat diterima dan diikuti oleh masyarakat. Dengan kata lain, stabilitas politik penting agar masyarakat bisa hidup dengan aman dan sejahtera, serta mencapai kebaikan bersama.

Menurut Harold Crouch, stabilitas politik ditandai oleh dua hal. Pertama, adanya pemerintahan yang stabil, yang berarti pemerintah dapat menjalankan tugasnya selama bertahun-tahun dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. Kedua, sistem pemerintahan yang stabil, yang berarti sistem tersebut mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat tanpa harus mengubah struktur pemerintahan yang ada.<sup>12</sup>

Sementara itu, Arbi Sanit menjelaskan bahwa secara teoritis, stabilitas politik dipengaruhi oleh tiga variabel yang saling berhubungan. Pertama, perkembangan ekonomi yang memadai, yang mencakup adanya pertumbuhan yang cukup dalam masyarakat. Kedua, penguatan lembaga-lembaga politik, baik dari segi struktur maupun proses, yang berkaitan dengan tidak terjadinya konflik antara berbagai kekuatan politik. Ketiga, partisipasi politik, yang merujuk pada cara masyarakat terlibat dalam pemerintahan, di mana bentuk partisipasi ini cenderung bersifat 'mobilized'.<sup>13</sup>

Konsep stabilitas politik mencakup kemantapan dan keseimbangan

---

<sup>12</sup> Harold Crouch, *Perkembangan Ekonomi & Modernisasi*, Jakarta : Yayasan Pengkhidmatan (1982).

<sup>13</sup> Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia; Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Jakarta : Rajawali Press (1982).



sistem pemerintahan, yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera. Dalam konteks ini, politik dipahami sebagai interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama, bukan hanya sebagai penguasaan kekuasaan. Pemikiran dari Yunani kuno, terutama oleh Aristoteles, menekankan bahwa politik adalah tentang interaksi antar individu untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Seiring waktu, para ahli seperti Gabriel A. Almond dan Andrew Heywood menyoroti pentingnya pengendalian keputusan publik serta dinamika antara konflik dan kerja sama dalam masyarakat. Stabilitas politik ditandai oleh pemerintahan yang stabil dan kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan, serta dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, penguatan lembaga politik, dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, stabilitas politik merupakan kondisi yang esensial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yang ditandai oleh pengambilan keputusan yang efektif dan interaksi sosial yang harmonis. Stabilitas ini tidak hanya bergantung pada kekuatan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik. Oleh karena itu, menjaga stabilitas politik adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, demi terciptanya ketertiban, keamanan, dan kebaikan bersama.

## 2. Muhammad Al-Fatih (1451-1481 M)

Muhammad Al-Fatih, Sultan ketujuh dari Kesultanan Utsmaniyah, memiliki nama asli Muhammad II bin Murad bin Muhammad bin Bayazid. Ia kemudian dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih, gelar yang berarti "sang penakluk," berkat keberhasilannya merebut kota Konstantinopel. Pada masa pemerintahannya, pasukan Islam di bawah kekuasaan Turki Utsmani berhasil

menaklukkan ibu kota Byzantium, yang menjadi pencapaian penting dalam sejarah Islam. Muhammad Al-Fatih, yang juga dikenal sebagai Mehmed II, lahir pada 29 Maret 1432 di Edirne, sebuah kota yang disebut juga Adrianopol atau Adronah.<sup>14</sup>

Pada usia 18 tahun, setelah wafatnya sang ayah pada 16 Muharram 855 H/18 Februari 1451 M, ia mengambil alih kekuasaan atas Negara Ottoman. Karakternya merupakan perpaduan antara kekuatan dan keadilan, sementara pengetahuannya mencakup berbagai cabang ilmu yang ia pelajari di Institut Pangeran. Selain itu, ia menguasai bahasa-bahasa utama pada zamannya dan menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap sejarah. Berbagai pengetahuan ini membentuk karakternya dalam kepemimpinan, baik dalam pemerintahan maupun di medan perang, hingga ia dikenal sebagai Muhammad al-Fatih (Sang Pembebas) berkat penaklukannya atas Konstantinopel.

#### F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan merujuk pada studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan dan dianggap memiliki hubungan yang cukup erat dengan judul serta topik yang akan diteliti. Penelitian ini penting untuk menghindari pengulangan isu yang sama. Dalam konteks penelitian ini, penelitian relevan juga berfungsi sebagai referensi yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Sesuatu dianggap relevan jika ada hubungan atau keterkaitan yang langsung. Kegunaan dari penelitian relevan dalam konteks ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain

---

<sup>14</sup> Muhammad Ridwan, and Nurhasanah Bakhtiar, "Nilai-Nilai Pendidikan dan Dakwah Muhammad al-Fatih Sebagai Penakluk Konstantinopel," *Wardah* 21.1 (2020).

itu, hal ini juga digunakan untuk membandingkan studi-studi yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah:

*Tabel 1.1 Penititan Terdahulu*

No.	Judul	Hasil Penelitian	Jenia Karya Ilmiah
1	Strategi Sultan Muhammad II Al-Fatih Dalam Penaklukan Konstantinopel Tahun 1451-1481 M” oleh A.Risnayanti (2020) IAIN Parepare	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Konstantinopel, yang awalnya didirikan oleh pahlawan legendaris Yunani bernama Byzas, dinamai Byzantium sesuai dengan namanya. Pada tahun 324, Kaisar Konstantin memindahkan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur ke kota ini dan kemudian mengubah namanya menjadi Konstantinopel, sementara negaranya dikenal sebagai Kekaisaran Byzantium. Sultan Muhammad II Al-Fatih menerapkan berbagai strategi dalam penaklukan, termasuk strategi militer konvensional, strategi besar, dan juga strategi non-militer.	Skripsi
2	“Sistem Militer Sultan Muhammad	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengorganisasian sistem	Skripsi

	<p>Al-Fatih Dinati Turki Ustmani Tahun 1451-1481 M” oleh Fitri Indrayeti (2019) IAIN Bengkulu.</p>	<p>militer Turki Utsmani pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih didasarkan pada dua faktor utama: internal dan eksternal. Secara internal, Sultan Muhammad Al-Fatih, sebagai pewaris Dinasti Turki Utsmani, dikenal sebagai pemimpin besar Islam yang memiliki ketakwaan, kecerdasan, dan kepribadian yang kuat. Faktor eksternal mencakup pengelolaan pasukan dan persenjataan, baik yang dipertahankan dari sistem militer pendahulunya maupun melalui inovasi-inovasi yang diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kebijakan militer yang diterapkannya juga memperhatikan unsur-unsur seperti ketakwaan, kesejahteraan, kebersamaan, serta kecakapan perang dari pasukannya. Perkembangan sistem militer di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, baik pasukan darat maupun laut, diakui dunia sebagai salah satu kekuatan militer terbaik yang pernah ada.</p>	
--	--	---	--

3	<p>“Kontribusi Muhammad Al-Fatih (1429-1481) Pada Pendidikan Islam di Pemerintahan Turki Ustmani” oleh Yusuf Priyadi (2017) UIN Raden Intan Lampung.</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan Islam di pemerintahan Turki Utsmani. Ia mendirikan berbagai institusi pendidikan, termasuk akademi dan sekolah. Masjid <i>Aya Sofya</i> dan <i>Zairek</i> digunakan sebagai pusat pendidikan Islam. Pada masa kecilnya, Sultan juga membangun Madrasah <i>Sultaniye</i>, serta mendirikan <i>Dârü 'l-Funûn</i>, yang kemudian menjadi cikal bakal Universitas Istanbul. Kurikulum yang diajarkan mencakup pendidikan agama, ilmu umum, dan keterampilan. Gaji guru dan staf madrasah diatur oleh undang-undang '<i>Kanun-Nâme-i Al-i Osman</i>,' yang dananya berasal dari lembaga wakaf. Tingkatan madrasah dan program pembelajaran meliputi Madrasah <i>Haşîye-i Tecrid</i>, Madrasah <i>Miftah</i>, Madrasah <i>Kırklı</i>, Madrasah <i>Ellili</i>, <i>Sahn-ı Seman</i>, dan Madrasah <i>Altmişli</i>.</p>	Skripsi
---	--	---	---------

4	Duriana,"Pemikiran Politik Turki Usmani Hingga Masa Modern", <i>Dialektika</i> , 11.02 (2018).	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa latar belakang munculnya pemerintahan Turki Usmani bermula dari balas budi Sultan Ala ad-Din II dari Turki Saljuk Rum Ertoghul yang memimpin pasukan perang melawan tentara Romawi dan kemudian menang. Dengan kemenangan ini, maka Sultan Ala ad-Din memberi hadiah kepada pasukan Erthogul, sebuah wilayah yang berbatasan dengan Bizantium. Kemudian ia membangun tanah itu dan memperluas wilayah kekuasaannya ke Bizantium. Erthogul mempunyai anak yang bernama Usman yang lahir pada tahun 1258. Nama Usman itulah yang diambil sebagai nama kerajaan Turki Usmani. Pemikiran politik Turki Usmani meliputi pemikiran dalam bidang kemeliteran dan pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan bidang keagamaan.	Artikel
5	Adib Khairil Musthafa and Hanik	Sekularisme dan Islamisme adalah dua ideologi yang menghiiasi sejarah politik	Artikel

	<p>Purwati. "Sejarah dan Tranformasi Politik Turki: Pergulatan Sekularisme dan Islamisme." <i>Jurnal Tamaddun</i> 10.1 (2022).</p>	<p>Turki. Kendati sejarah Turki dalam belantara sejarah sebagai negeri dengan mayoritas Muslim pertama yang mengadopsi sekularisme tidak lantas menghilangkan jejak religiuitasnya sebagai negeri yang sarat dengan nilai-nilai keislaman terlepas dari identitas islam politik itu dimainkan dalam perpolitikan Turki belakangan. Sekularisme yang dibawa oleh Kemal Mustafa Attaturk tampak “pincang” akibat otoritarianisme yang dijalankannya, sementara Islamisme yang dibawa Erdogan dan AKP tampil sebagai alternatif baru demokratisasi Turki, Transformasi politik Turki terjadi sebab keharusan sejarah, sekularisme Kemal Mustafa yang melawan ortodoksi dan dominasi politik Islam, serta Islamisme Erdogan yang melawan diskriminasi atas nama sekularisme. Turki adalah negara dengan pengalaman demokrasi yang cukup matang. Transformasi politik yang terjadi dari</p>	
--	--	--	--



		masa ke masa haruslah dilihat sebagai problem yang kompleks.	
6	Muhammad Faiz and Afifah Alawiyah. "Latar Kebijakan Politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II (1876-1909)." <i>Indonesian Journal of History and Islamic Civilization (IJHIC)</i> 1.1 (2024): 61-74.	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa latar belakang munculnya kebijakan politik Pan-Islamisme Turki Usmani pada masa Sultan Abdul Hamid II didasarkan pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal didorong oleh kemunduran Turki Usmani pasca kekalahan perang. Sedangkan faktor eksternal antara lain pengaruh pemikiran Barat di lingkungan Kekhalifahan Ottoman dan penyebaran kolonialisme Barat di negara-negara Islam	Artikel

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan yang berkaitan dengan figur Sultan Muhammad Al-Fatih dan Kesultanan Turki Utsmani. Kajian-kajian tersebut umumnya menyoroti aspek strategis dan tematik tertentu, seperti strategi militer dalam penaklukan Konstantinopel (Risnayanti, 2020), pengorganisasian sistem militer Turki Utsmani (Futri Indrayeti, 2019), serta kontribusi Muhammad Al-Fatih terhadap pendidikan Islam (Yusuf Priyadi, 2017). Selain itu, ada pula kajian seperti Duriana (2018) dan Adib Khairil Musthafa & Hanik Purwati (2022) yang mengulas secara umum pemikiran politik Turki Utsmani hingga masa modern. Kajian lain



oleh Muhammad Faiz dan Afifah Alawiyah (2024) lebih menekankan pada kebijakan politik Pan-Islamisme di masa Sultan Abdul Hamid II.

Meskipun beragam dan memberikan kontribusi masing-masing, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menempatkan stabilitas politik sebagai fokus utama kajian. Umumnya, penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek militer, pendidikan, atau ideologi politik secara umum, dan belum menyentuh secara mendalam bagaimana kepemimpinan Muhammad Al-Fatih berperan dalam meredam konflik internal, menghadapi tekanan eksternal, serta membangun ketahanan politik negara. Ruang kosong (gap) inilah yang menjadi celah penting untuk diisi, mengingat stabilitas politik merupakan kunci utama dalam keberlanjutan pemerintahan dan pengaruh suatu kekuasaan.

Adapun kelemahan dari penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada keterbatasan pendekatan yang digunakan. Kajian-kajian terdahulu sebagian besar bersifat deskriptif-naratif dan tidak menempatkan dinamika kekuasaan secara analitis dalam kerangka teori konflik atau kepemimpinan. Sebagai contoh, studi Risnayanti dan Indrayeti memang menyoroti aspek militer, namun belum mengkaji bagaimana strategi tersebut menopang kestabilan pemerintahan secara menyeluruh. Begitu pula dengan penelitian Yusuf Priyadi yang membahas pendidikan Islam, namun tidak mengaitkannya dengan pembangunan politik yang stabil. Sementara itu, kajian yang lebih kontemporer seperti yang dilakukan Musthafa dan Purwati (2022) terlalu melebar dalam membahas sekularisme dan Islamisme di Turki modern, tanpa memberikan penekanan pada kepemimpinan klasik Utsmani secara personal dan kontekstual.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty)

dengan memfokuskan diri pada kontribusi Sultan Muhammad Al-Fatih terhadap stabilitas politik Kesultanan Turki Utsmani pada periode 1451–1481 M. Penelitian ini tidak hanya bertumpu pada narasi sejarah semata, tetapi mengintegrasikan analisis mendalam melalui pendekatan teori konflik dan teori kepemimpinan. Kajian ini juga berupaya memahami sinergi antara kebijakan administrasi, strategi militer, pendekatan sosial-keagamaan, dan penanganan konflik internal dalam kerangka menjaga stabilitas kekuasaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik dalam studi sejarah peradaban Islam dan memberikan pemahaman baru tentang model kepemimpinan Islam yang stabil, adaptif, dan strategis di tengah tekanan zaman.

#### G. Landasan Teori

Landasan teori adalah bagian penting dalam penelitian, yang mencakup teori-teori dan hasil-hasil dari studi kepustakaan. Fungsinya adalah sebagai kerangka acuan untuk menyelesaikan penelitian. Landasan teori juga sering disebut sebagai kerangka teori. Umumnya, kerangka landasan teori melibatkan beberapa konsep, definisi, dan referensi dari literatur ilmiah yang relevan. Ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang teori dan konsep yang berhubungan dengan topik penelitian, serta keterkaitannya dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang diteliti.<sup>15</sup>

Landasan teori merupakan sebuah konsep yang disusun secara sistematis dan rapi, berisi variabel-variabel yang penting dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini menjadi dasar yang kuat bagi penelitian yang akan dilakukan. Pengertian lainnya

---

<sup>15</sup>Syafnidawaty, *Landasan Teori*, (Banten: Universitas Raharja, 2020).  
<https://raharja.ac.id/2020/10/24/landasan-teori/> ( 3 September 2024)

adalah kumpulan definisi, konsep, dan proposisi yang diatur secara terstruktur mencakup variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Dengan landasan teori yang baik, penelitian dapat berdiri kokoh karena memiliki dasar yang jelas dan terarah.

## 1. Teori Konflik

### a. Defenisi Konflik

Menurut KBBI, Konflik adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan<sup>16</sup> Menurut Sudarmanto (2021), bahwa konflik adalah segala macam interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih. Konflik dapat timbul pada berbagai situasi sosial, baik terjadi dalam diri individu, antar individu, kelompok, organisasi, maupun negara.<sup>17</sup> Menurut Thomas & Killman (2021) *conflict exists whenever the needs of two people appear to be incompatible*.<sup>18</sup> Thomas & Killman menyatakan bahwa menegaskan bahwa konflik merupakan hal yang wajar dalam hubungan antarindividu, terutama ketika kebutuhan atau kepentingan masing-masing tidak selaras. Perbedaan ini bisa bersifat nilai, tujuan, atau harapan, dan sering kali menjadi sumber ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Pernyataan ini juga mengingatkan bahwa konflik bukan semata-mata persoalan emosional, melainkan cerminan dari perbedaan yang nyata dan relevan yang perlu dikenali dan direspons secara bijak.

<sup>16</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

<sup>17</sup> Eko Sudarmanto, *et al.*, eds., *Manajemen Konflik*, Penerbit Widina Bhakti Persada, (2021), h.53

<sup>18</sup> Ralph H. Kilmann, *Mastering the Thomas-Kilman Conflict Mode Instrument (TKI): Celebrating More than 50 Years of Resolving All Kinds of Conflicts*, USA:Killman Diagnostics, (2023), h.1

## b. Bentuk-Bentuk Konflik

Konflik dalam sebuah organisasi bisa muncul dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah konflik antarindividu, dalam diri sendiri, antarkelompok, di dalam kelompok, hingga konflik antara organisasi (Thakore, 2013). Berikut penjelasannya:

### 1) Konflik Antarpribadi (Interpersonal Conflict)

Jenis konflik ini muncul dalam interaksi langsung antarindividu dalam organisasi, biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepribadian, nilai, sikap, persepsi, dan karakter lainnya yang berbeda satu sama lain. Konflik semacam ini bisa bersifat logis (substansial), emosional, atau bahkan keduanya sekaligus.

### 2) Konflik Dalam Diri Sendiri (Intrapersonal Conflict)

Konflik ini terjadi di dalam batin seseorang. Meski tampak pribadi, dampaknya bisa cukup besar terhadap jalannya organisasi. Biasanya, konflik ini muncul saat seseorang dihadapkan pada dua pilihan atau dorongan yang saling bertentangan, sehingga ia harus mengambil keputusan yang sulit. Jenis konflik ini kerap menjadi yang paling rumit untuk dipahami dan diatasi.

### 3) Konflik Antar Kelompok (Intergroup Conflict)

Jenis konflik ini timbul antara satu kelompok dengan kelompok lainnya di dalam organisasi. Konflik ini bisa disebabkan oleh perbedaan tujuan, cara kerja, atau emosi antartim. Konflik antar kelompok sering kali membuat koordinasi kerja antarunit menjadi terhambat.

### 4) Konflik Dalam Kelompok (Intragroup Conflict)

Konflik ini muncul di dalam satu tim atau kelompok. Secara umum, ada dua jenis

konflik dalam kelompok, yaitu konflik yang berkaitan dengan tugas dan konflik hubungan antaranggota. Konflik tugas biasanya disebabkan oleh perbedaan ide, pandangan, atau cara pengambilan keputusan. Sementara itu, konflik hubungan muncul karena ketidakcocokan pribadi atau ketegangan emosional antarindividu.

#### 5) Konflik Antarorganisasi (Interorganizational Conflict)

Konflik ini terjadi ketika dua organisasi atau lebih bersaing atau berhadapan. Biasanya, konflik jenis ini terjadi karena kompetisi pasar, perebutan sumber daya, atau proses merger dan akuisisi yang tidak berjalan mulus. Ketegangan seperti ini bisa menciptakan dinamika yang cukup kompleks di antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>19</sup>

Konflik dalam kelompok (intragroup conflict) dan konflik antarorganisasi (interorganizational conflict) merupakan dua bentuk konflik yang paling relevan untuk menjelaskan situasi politik pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah. Konflik intrakelompok tercermin dari pemberontakan pasukan Janissary dan perpecahan di kalangan elit pemerintahan yang menolak kebijakan reformasi Al-Fatih, sehingga menantang stabilitas dari dalam. Sementara itu, konflik antarorganisasi tampak dalam tekanan eksternal berupa perlawanan koalisi Kristen Eropa terhadap ekspansi Kesultanan Utsmani dan ambisi penaklukan Konstantinopel.

#### c. Faktor Penyebab Konflik

Sejumlah sosiolog menyatakan bahwa konflik pada dasarnya berakar dari relasi sosial, ekonomi, dan politik, yang sumber utamanya adalah perebutan

---

<sup>19</sup> Rinandita Wikansari, *et al.*, eds., *Manajemen Konflik*, (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2024), h.7-9

terhadap hal-hal bernilai seperti kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan. Masalah muncul karena semua itu tersedia dalam jumlah terbatas, namun pembagiannya tidak merata di tengah masyarakat.

Secara umum, konflik sosial disebabkan oleh dua jenis kemajemukan. Pertama, kemajemukan horizontal, yaitu perbedaan budaya dalam masyarakat seperti suku, agama, ras, dan juga perbedaan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, ulama, sopir, dan kalangan intelektual. Kedua, kemajemukan vertikal, yaitu ketimpangan dalam hal kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Konflik sosial kerap terjadi karena hanya segelintir orang yang menguasai harta, pendidikan tinggi, dan posisi berpengaruh, sedangkan mayoritas masyarakat tidak memiliki akses terhadap hal-hal tersebut. Ketimpangan seperti ini menciptakan kondisi yang rawan konflik dan menjadi sumber ketegangan sosial dalam masyarakat.<sup>20</sup>

#### d. Jenis-Jenis Konflik

Konflik bisa diklasifikasikan berdasarkan aspek kehidupan yang menjadi pusat permasalahan. Namun dalam kenyataannya, konflik jarang berdiri sendiri sering kali saling berhubungan dengan berbagai bidang lain. Sebagai contoh, konflik sosial tidak semata-mata muncul karena perbedaan suku, ras, kelas sosial, atau kelompok tertentu, tetapi kerap dipicu oleh kecemburuan dalam bidang ekonomi, ketegangan politik, maupun perbedaan keyakinan.

##### 1) Teori Konflik Agama

Salah satu bentuk konflik yang paling banyak terjadi sepanjang sejarah

---

<sup>20</sup> Arizona, *et al.*, eds., *Manajemen Konflik*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), h.21-20



adalah konflik agama. Konflik semacam ini bisa melibatkan dua kelompok agama yang berbeda, maupun terjadi di antara sesama penganut agama yang sama. Yang perlu dipahami, konflik agama bukan terjadi karena ajaran atau kitab suci, melainkan karena tindakan dari para penganutnya. Kitab suci tidak mengajarkan kebencian atau kekerasan, tetapi kerap kali para pemeluknyalah yang menafsirkan dan menjalankannya dengan cara yang menimbulkan pertentangan dan kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>21</sup>

## 2) Teori Konflik Ekonomi

Teori konflik ekonomi menyatakan bahwa akar utama konflik sering kali berasal dari persoalan ekonomi, terutama berkaitan dengan kelangkaan sumber daya atau nilai-nilai yang dianggap penting. Banyak orang berusaha mendapatkan kekuasaan karena kekuasaan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan ekonomi. Perselisihan sering muncul dalam perebutan lahan pertanian, padang penggembalaan, sumber air, dan berbagai sumber daya lainnya. Kelompok-kelompok dalam masyarakat juga kerap bersaing untuk menguasai alokasi pendapatan atau sumber daya yang jumlahnya terbatas. Kekhawatiran akan kelangkaan, kebutuhan yang tak terpenuhi, serta rasa takut kehilangan akses terhadap sumber daya inilah yang sering memicu konflik dan bahkan memengaruhi arah kekuatan politik.

Dengan kata lain, konflik tidak muncul secara tiba-tiba atau direayasa, melainkan tumbuh dari ancaman nyata terhadap kebutuhan dasar, seperti rasa lapar, kemiskinan, atau pengelolaan sumber daya yang tidak adil. Sama halnya dengan bagaimana ketakutan akan kekurangan bisa mendorong

<sup>21</sup> Siti Asiah, *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi*, Gorontalo: Pustaka Cendikia, (2017),

seseorang melakukan penipuan atau korupsi, begitu pula ketidakadilan dalam penguasaan sumber daya bisa menciptakan konflik terbuka. Konflik sendiri adalah bagian dari kehidupan manusia yang selalu muncul dan terus berulang dalam berbagai bentuk. Dalam banyak kasus, motif ekonomi menjadi faktor utama yang memperparah ketegangan sosial dan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan stabilitas keamanan negara. Untuk memahami penyebab konflik ini, pendekatan baik ilmiah maupun non-ilmiah dapat digunakan.<sup>22</sup> Melihat kompleksitas penyebab konflik yang kerap berakar pada masalah ekonomi, para pakar seperti Charles & Osah mengemukakan beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk mengurangi dampaknya. Menurut mereka:

To mitigate the effects we recommend economic justice, formation of strong security outfits, mass patriotism education, protection of fundamental human rights and continuous infrastructural development of the societies that are prone to conflicts arising from economic indices.<sup>23</sup> Menurut Alfred Charles & Goodnews Osah (2021), Penerapan keadilan ekonomi, penguatan aparat keamanan, pendidikan nasionalisme, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan infrastruktur di wilayah rentan konflik merupakan langkah strategis untuk meredakan ketegangan sosial akibat ketimpangan ekonomi.

Terjemahan:

Untuk mengurangi dampaknya, kami merekomendasikan keadilan ekonomi, pembentukan satuan keamanan yang kuat, pendidikan massal tentang patriotisme, perlindungan hak asasi manusia yang fundamental, dan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan di masyarakat yang rentan terhadap konflik yang disebabkan oleh indikator-indikator ekonomi.

Pernyataan Charles & Osah mencerminkan pendekatan komprehensif dalam menangani akar penyebab konflik yang bersumber dari ketimpangan

<sup>22</sup> Wahyudi, *Teori Konflik dan Penerapannya pada Ilmu-Ilmu Sosial*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, (2021), h.69-70

<sup>23</sup> Alfred Charles and Goodnews Osah, "Economic Theory Of Conflict", *IJAR: International Journal Of Advanced Research*, 6.10 (2018).



ekonomi. Mereka menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya cukup dengan respons militer atau diplomasi semata, tetapi harus menyentuh dimensi struktural dan sosial masyarakat.

Pertama, keadilan ekonomi dianggap sebagai fondasi penting dalam mencegah konflik. Ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya kerap menjadi pemicu ketidakpuasan sosial. Dengan menciptakan sistem ekonomi yang adil, rasa percaya masyarakat terhadap negara akan meningkat.

Kedua, pembentukan satuan keamanan yang kuat penting untuk menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman. Namun, hal ini tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pendidikan patriotisme, yaitu menanamkan semangat cinta tanah air dan tanggung jawab warga negara sejak dini, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah.

Ketiga, perlindungan hak asasi manusia menjadi prinsip yang tak bisa dinegosiasikan. Dalam konteks konflik, pelanggaran hak asasi justru dapat memperburuk situasi dan memperpanjang kekerasan.

Terakhir, pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan merupakan aspek penting yang sering diabaikan. Ketersediaan fasilitas umum yang layak dapat meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan rasa keadilan sosial di wilayah-wilayah yang termarginalkan.

Dengan kata lain, pendekatan Charles & Osah menunjukkan bahwa solusi terhadap konflik harus bersifat holistik menggabungkan aspek ekonomi, keamanan, pendidikan, hak asasi, dan pembangunan fisik agar tidak hanya meredakan gejolak sesaat, tetapi juga mencegah munculnya konflik

serupa di masa depan. Pendekatan ini sangat relevan bagi negara-negara berkembang yang sering kali menghadapi ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan struktural yang menjadi akar dari instabilitas sosial.

### 3) Konflik Politik

Konflik merupakan salah satu konsep penting dalam kajian ilmu politik. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa menghindari interaksi dengan orang lain, terutama ketika berusaha memenuhi kebutuhan, keinginan, atau tujuan hidupnya. Namun, karena manusia juga memiliki emosi dan nafsu, interaksi ini sering kali memicu pertentangan, baik antar individu maupun antarkelompok dalam masyarakat. Bentuk konflik tidak selalu muncul dalam ucapan langsung, tetapi juga bisa terlihat melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, atau sikap yang menunjukkan ketidaksenangan. Konflik tidak harus ditandai dengan kekerasan fisik atau adu jotos, tetapi bisa pula hadir dalam bentuk ketegangan tersembunyi seperti sindiran tajam atau perkataan bernada marah. Dalam konteks politik, konflik sering kali berakar pada perbedaan kepentingan atau *conflict of interest* antar pihak-pihak yang terlibat.<sup>24</sup>

Konflik sering muncul di tengah masyarakat, baik yang memiliki keseimbangan kekuatan maupun yang timpang. Beberapa faktor yang memicu konflik antara lain perbedaan ideologi politik, kondisi ekonomi, perbedaan budaya, serta agama dan kepercayaan. Dalam masyarakat yang terdiri dari beragam etnis, agama, dan kepercayaan, keragaman tersebut bisa menjadi sumber ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Banyak peristiwa konflik dan kekerasan yang terjadi justru berakar pada persoalan ketidakadilan, kesenjangan

---

<sup>24</sup> Darmin Tuwu, *Konflik, Kekerasan dan Perdamaian*, Kendari: Litercy Institute, (2018), h.34

sosial, perlakuan diskriminatif, dan kemiskinan yang terus berlangsung tanpa solusi. Kombinasi dari faktor-faktor ini menjadikan masyarakat rentan terhadap ledakan konflik, baik dalam skala kecil maupun besar.

e. Strategi Mengelola Konflik

Menurut Thomas dan Kilmann, dalam menghadapi konflik yang penuh tekanan, tidak ada satu strategi tunggal yang bisa dipakai untuk semua situasi. Pemilihan strategi sangat bergantung pada kondisi, tingkat urgensi konflik, serta faktor-faktor lain yang menyertainya. Mereka mengusulkan lima pendekatan utama dalam mengelola konflik.

1) Strategi Akomodatif

Strategi ini dilakukan dengan cara mengalah demi menjaga hubungan baik dengan pihak lain. Dalam strategi ini, seseorang rela mengorbankan kepentingannya sendiri agar konflik bisa reda. Pendekatan ini cocok digunakan bila lawan konflik memiliki kemampuan atau solusi yang lebih baik, atau jika persoalan yang diperdebatkan sebenarnya tidak terlalu penting bagi kita. Dalam istilah sederhana, strategi ini bisa disebut "saya mengalah, kamu menang".

2) Strategi Menghindar

Strategi ini mengarah pada sikap menjauh atau tidak mengambil keputusan apa pun terkait konflik yang sedang terjadi. Biasanya, strategi ini dipilih bila masalahnya dianggap tidak begitu penting. Namun, strategi ini bukanlah solusi jangka panjang karena hanya menunda penyelesaian tanpa benar-benar menyelesaikan akar masalah. Dalam hal ini, tidak ada yang benar-benar

menang atau kalah situasi tetap tidak berubah.

### 3) Strategi Kolaboratif

Strategi ini bertujuan untuk mencari jalan tengah yang bisa memuaskan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Semua pihak diajak berdiskusi secara terbuka dan jujur untuk menemukan solusi terbaik. Strategi ini sangat bermanfaat jika ada kebutuhan untuk menggabungkan berbagai pandangan dari orang-orang yang memiliki latar belakang atau sudut pandang berbeda. Ini adalah strategi “sama-sama menang” karena hasil akhirnya diharapkan memuaskan semua pihak.

### 4) Strategi Kompetitif

Strategi ini menekankan pada kemenangan satu pihak atas pihak lain. Dalam pendekatan ini, seseorang berusaha keras untuk mencapai tujuannya meskipun harus mengorbankan pihak lain. Pendekatan ini biasanya cocok dalam situasi mendesak atau ketika dibutuhkan tindakan yang cepat dan tegas. Dalam istilah sederhana, ini adalah strategi “saya menang, kamu kalah”.

### 5) Strategi Kompromi

Strategi kompromi adalah jalan tengah, di mana kedua pihak bersedia untuk sama-sama mengalah sebagian demi tercapainya kesepakatan bersama. Dalam strategi ini, tidak ada pihak yang sepenuhnya menang atau kalah. Strategi ini banyak digunakan ketika kedua belah pihak memiliki kekuatan seimbang dan sama-sama ingin menjaga hubungan. Pendekatan ini sering dipakai dalam dunia bisnis saat melakukan negosiasi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Yusuf & Muhammad Shoffa Saifillah Al-Faruq, *Manajemen Konflik dan Stress (Orientasi dalam Organisasi)*, (Wade Group, 2021), h.91-94.

Untuk memahami kondisi stabilitas politik Kesultanan Turki Utsmani pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih, teori konflik menjadi pendekatan yang relevan dan mendalam. Konflik pada dasarnya muncul ketika dua pihak atau lebih memiliki perbedaan kepentingan, kebutuhan, atau tujuan yang saling bertentangan. Thomas dan Kilmann mengungkapkan bahwa konflik merupakan bagian wajar dari interaksi manusia, khususnya saat kebutuhan masing-masing pihak sulit untuk diselaraskan. Dalam hal ini, stabilitas politik bukan berarti tidak adanya konflik sama sekali, tetapi kemampuan untuk mengelola perbedaan dengan cara yang bijaksana dan adil.

Selama masa kekuasaan Muhammad Al-Fatih, konflik yang muncul bisa dilihat dari dua sisi: konflik internal dan eksternal. Secara internal, muncul gejolak dari dalam, seperti perpecahan di kalangan elit istana dan pemberontakan pasukan Janissary yang menolak beberapa kebijakan reformasi yang digagas oleh Sultan. Sementara itu, dari luar, Kesultanan menghadapi tekanan dari kekuatan Kristen Eropa yang menolak ekspansi wilayah Utsmani, terutama ambisi besar Sultan untuk merebut Konstantinopel. Kedua jenis konflik ini mencerminkan betapa rumitnya tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga kestabilan pemerintahan.

Faktor penyebab dari konflik-konflik ini juga sangat beragam. Di satu sisi, ada perbedaan dalam hal keyakinan, etnis, dan latar belakang sosial yang mencerminkan kemajemukan masyarakat Utsmani. Di sisi lain, terdapat ketimpangan dalam hal kekuasaan, ekonomi, dan pendidikan yang menimbulkan kecemburuan sosial dan perebutan pengaruh. Ketidakmerataan ini kerap menjadi pemicu utama munculnya pertentangan, baik antar individu, kelompok, maupun

antar bangsa.

Jika dilihat dari jenisnya, konflik yang terjadi saat itu mencakup banyak aspek. Ada konflik agama, yang tampak jelas dalam pertentangan antara Utsmani dan negara-negara Kristen. Selain itu, konflik politik pun tak bisa dihindari, terutama dalam perebutan kekuasaan dan pengaruh antara elite Utsmani dan kekuatan asing. Faktor ekonomi juga turut memperkeruh suasana, terutama menyangkut perebutan jalur perdagangan strategis dan sumber daya di wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Semua konflik ini saling berkaitan dan berdampak pada kestabilan politik secara keseluruhan.

Dalam menghadapi berbagai konflik tersebut, Muhammad Al-Fatih dikenal tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan pendekatan kolaboratif. Salah satu buktinya adalah kebijakan millet system, yang memberikan ruang bagi komunitas non-Muslim seperti Kristen dan Yahudi untuk mengatur urusan mereka sendiri secara internal. Pendekatan ini terbukti mampu menekan potensi konflik sektarian dan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Selain itu, ia juga mampu membangun komunikasi dan kerja sama dengan elite dan masyarakat luas, termasuk dalam menghadapi pemberontakan maupun ancaman luar negeri. Keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 menjadi bukti nyata dari strategi politik dan militernya yang terencana, yang tidak hanya memperluas wilayah Utsmani, tetapi juga memperkuat stabilitas dan legitimasi kekuasaannya.

## 2. Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan bagian dari karakter yang melekat pada seseorang, khususnya mereka yang memiliki kepribadian kuat seperti cerdas, jujur,



ulet, dewasa, tegas, supel, tangguh, serta memiliki kemampuan untuk memimpin<sup>26</sup> Menurut Kristianty (2002:17) mengungkapkan bahwa kepemimpinan adalah proses memengaruhi individu atau kelompok dalam konteks tertentu, yang melibatkan interaksi antara pemimpin, orang yang dipimpin, dan situasi yang sedang dihadapi. Ia merumuskan konsep kepemimpinan dengan formula:  $L = F(l, f, s)$ , yang berarti kepemimpinan (L) merupakan fungsi (F) dari pemimpin (leader), pengikut (follower), dan situasi (situation).<sup>27</sup> Artinya, kualitas kepemimpinan sangat bergantung pada kombinasi antara karakter pemimpin, kondisi para pengikut, serta situasi yang sedang terjadi.

Sejalan dengan pandangan tersebut, beberapa ahli lain juga mengemukakan model kepemimpinan yang menekankan peran moral dan integritas pemimpin dalam membentuk pengaruhnya. Salah satunya adalah Crow (1996), yang menjelaskan bahwa:

Explains that a leader carries out four essential roles, namely: as a role model in personal morality, a pioneer in moral vision, a harmonizer within the institution, and a cultivator of moral culture. Based on this, the leadership model developed in previous studies is considered more comprehensive and superior.<sup>28</sup>

Terjemahan:

Crow (1996) menjelaskan bahwa seorang pemimpin menjalankan empat peran penting, yaitu: sebagai teladan dalam moralitas pribadi, pelopor dalam visi moral, penyelaras di dalam lembaga, dan pengembang budaya moral. Berdasarkan hal ini, model kepemimpinan yang dikembangkan dalam berbagai studi sebelumnya dianggap lebih komprehensif dan unggul.

Pandangan Crow (1996) menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kemampuan mengarahkan atau mengatur, tetapi juga mencakup dimensi

<sup>26</sup> Tarto Sentono, *Pengembangan Model Kepemimpinan Berbasis Trilogi Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara*, Klaten: CV Citta Gracia, (2019), h.3

<sup>27</sup> Theresia.Kristianty, "Peningkatan mutu pendidikan terpadu cara Deming", *Jurnal Pendidikan Penabur*, 4.4, (2005)

<sup>28</sup> Gary M.Crow, et al., eds., *Leadership A Relevant and Realistic Role for Principals* (New York: Eye On Education, 1996). h.113



moral yang mendalam. Peran pemimpin sebagai teladan moral menunjukkan bahwa karakter dan etika pribadi menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi. Sementara itu, sebagai pelopor visi moral, pemimpin dituntut mampu membawa arah perubahan yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan. Fungsi sebagai penyelaras di lembaga menunjukkan pentingnya membangun harmoni di antara berbagai elemen organisasi, dan sebagai pengembang budaya moral, pemimpin memiliki tanggung jawab membentuk lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis. Konsep ini membuat model kepemimpinan menjadi lebih utuh karena tidak hanya menitikberatkan pada keterampilan teknis atau manajerial, tetapi juga memperhatikan aspek moral yang sangat menentukan keberhasilan jangka panjang.

Crow menyoroti bahwa pemimpin tidak hanya bertugas mengatur atau mengarahkan, tetapi juga menjadi teladan moral, pencetus visi yang bernilai, penyeimbang dalam struktur organisasi, serta agen pembentuk budaya yang sehat. Kartono (1994), pun menambahkan bahwa seorang pemimpin adalah individu yang memiliki keahlian dan kapasitas lebih dibandingkan orang lain, khususnya dalam hal memimpin, sehingga mampu menggerakkan orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.<sup>29</sup>

Pernyataan ini menggambarkan bahwa pemimpin bukan hanya menjadi penentu arah, tetapi juga menjadi panutan bagi orang-orang yang ia pimpin. Segala tindakan, kebiasaan, cara berpikir, hingga sikapnya sangat mungkin diikuti oleh bawahannya. Oleh karena itu, posisi sebagai pemimpin membawa tanggung jawab besar karena memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku orang-orang yang

---

<sup>29</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, (1994), h.81

dipimpinnya.

Pandangan para ahli mengenai kepemimpinan sangat beragam, dan perbedaan ini muncul karena tiap pakar melihat dari sudut pandangnya masing-masing. Misalnya, McShane (2008) mengelompokkan pandangan tentang kepemimpinan ke dalam lima kategori, yaitu *Competency Perspective* (sifat), *Behavioral Perspective* (perilaku), *Contingency Perspektif* (situasional), *Transformational Perspective* (transformasional) dan *Implicit leadership perspective* (kepemimpinan implisit).<sup>30</sup> Sementara itu, Kreitner (2010) membagi pandangan kepemimpinan menjadi empat pendekatan, yakni *Trait Approaches* (pendekatan sifat), *Behavioral Approaches* (Pendekatan perilaku), *Contingency Approaches* (Pendekatan Situasional), *Transformational Approach* (Pendekatan transformatif).<sup>31</sup> Di sisi lain, Schermerhorn (2010) menyederhanakan perspektif kepemimpinan menjadi empat kategori, yaitu *Leadership Traits* (teori sifat), *Leadership Behavior* (teori perilaku), *Leadership Situational* (teori kontingensi) dan teori-teori modern.<sup>32</sup>

Jika dilihat dari ketiga pandangan tersebut, terdapat tiga teori pokok yang tampaknya selalu muncul, yakni teori sifat, perilaku, dan kontingensi. Sedangkan teori-teori lain seperti transaksional, transformatif, karismatik, serta pendekatan tambahan atau teori baru biasanya muncul sebagai pelengkap, tergantung pada fokus dan pendekatan masing-masing pakar. Selanjutnya, penjelasan lebih mendalam mengenai berbagai perspektif kepemimpinan dari para

---

<sup>30</sup> Steven L. McShane & Mary Ann Von Glinow, *Organizational Behavior: emerging realities for the workplace revolution*, (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2008), h.203

<sup>31</sup> Robert Kreitner, *Organizational Behavior*, New York: McGraw-Hill/Irwin, (2010), h.468

<sup>32</sup> Jhon R. Schermerhorn, *Introduction To Management*, New York: John Wiley & Sons, (2010), h.438-440

pakar tersebut akan diuraikan secara lebih rinci.

a. Teori Sifat

Menurut teori ini, seseorang bisa menjadi pemimpin yang efektif jika ia memiliki sifat-sifat positif yang mampu menginspirasi dan memengaruhi para pengikutnya agar ikut menjadi pribadi yang baik. Karakteristik yang umumnya dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain adil, melindungi, percaya diri, penuh inisiatif, menarik secara pribadi, energik, mampu membujuk, komunikatif, dan kreatif. Teori sifat mencoba memahami ciri-ciri yang paling menonjol dari seorang pemimpin dengan memperhatikan aspek fisik, mental, dan kepribadiannya. Teori ini berasumsi bahwa ada orang-orang tertentu yang secara alami terlahir sebagai pemimpin dan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Keistimewaan tersebut misalnya energi yang besar, intuisi yang tajam, kemampuan melihat jauh ke depan, dan kekuatan untuk memengaruhi orang lain dengan sangat kuat.<sup>33</sup>

Menurut Robbins, Ada 5 Sifat Khusus yang membuat seseorang menjadi pemimpin, *Conscientiousness* (Kehati-hatian), *Emotional Stability* (Stabilitas emosi), *Extraversion* (Kepribadian Terbuka), *Openness to Experience* (Keterbukaan terhadap pengalaman) and *Agreeableness* (Keramahan).<sup>34</sup> McShane (2008) juga mengungkapkan ada beberapa karakter utama yang umumnya dimiliki oleh seseorang yang mampu menjadi pemimpin. Di antaranya adalah semangat (*drive*), dorongan untuk memimpin, integritas, rasa percaya diri, kecerdasan, wawasan bisnis, serta kecerdasan emosional. Untuk memahami lebih

---

<sup>33</sup> Lelo Sintani, et al., eds., *Dasar Kepemimpinan*, (Jakarta: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2022). h.60-69

<sup>34</sup> Stephen P.Robbins & Timothy A.Judge, *Essentials of Organizational Behavior*, (New ersey: Pearson Prentice Hall, 2022), h.95-96.

lanjut makna dari masing-masing sifat tersebut, berikut penjelasannya:

- 1) Semangat (Drive): Pemimpin harus memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya untuk terus berkarya, berprestasi, dan memberikan hasil Terbaik dalam setiap upaya yang dilakukan.
- 2) Motivasi Memimpin: Seorang pemimpin harus punya keinginan yang besar untuk bisa memengaruhi orang lain, memberi arah, dan meyakinkan mereka agar mau bergerak menuju tujuan bersama.
- 3) Integritas: Artinya, ucapan dan tindakan seorang pemimpin harus sejalan. Ia harus mampu menjadi contoh yang menunjukkan kesesuaian antara nilai-nilai yang dipegang dengan perilaku nyata.
- 4) Percaya Diri: Pemimpin harus yakin dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya agar mampu membawa organisasi menuju kesuksesan.
- 5) Kecerdasan: Seorang pemimpin harus cakap dalam mengolah berbagai informasi, menyatukan sudut pandang yang berbeda, serta mengambil keputusan yang bijak dalam menghadapi persoalan.
- 6) Wawasan Bisnis: Pemimpin perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dunia usaha dan lingkungan bisnis tempat ia berkecimpung, agar mampu merumuskan strategi yang tepat dan efektif.
- 7) Kecerdasan Emosional: Dalam menghadapi berbagai situasi, pemimpin harus mampu tetap tenang, tidak mudah terbawa emosi, serta menunjukkan kedewasaan dalam bersikap dan bertindak.
- 8) Kejujuran: Seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu berkata dan bertindak jujur, berani mengakui kesalahan, serta memberikan dukungan

atas keberhasilan orang lain. Kejujuran adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan dengan tim.

- 9) Ekstraversi (Extraversion): Pemimpin sebaiknya bersifat terbuka, energik, antusias, mudah bergaul, serta mampu menyampaikan gagasan dan keputusan dengan tegas.
- 10) Kreativitas: Pemimpin harus mampu melahirkan ide-ide baru dan segar agar bisa menemukan solusi terbaik, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun.
- 11) Fleksibilitas: Dalam berbagai keadaan, pemimpin harus bisa menyesuaikan diri, tidak bersikap kaku, tetapi tetap memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan penting.<sup>35</sup>

#### b. Teori Perilaku

Teori perilaku menekankan pada tindakan, sikap, dan pengaruh lingkungan dalam membentuk seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Dalam pendekatan ini, diyakini bahwa gaya kepemimpinan seseorang terbentuk dari proses belajar, khususnya melalui pengamatan dan peniruan terhadap figur pemimpin di sekitarnya atau lingkungan tempat ia berada. Salah satu konsep utama dalam teori ini adalah bahwa individu memimpin dengan cara tertentu karena terbiasa melihat dan meniru gaya kepemimpinan orang lain yang pernah ia temui.

Berdasarkan berbagai penelitian awal mengenai kepemimpinan, ditemukan bahwa secara umum ada tiga jenis gaya kepemimpinan yang paling sering diterapkan, yaitu:

---

<sup>35</sup> Budi Sunarso, *Teori Kepemimpinan*, Yogyakarta: CV. Madani Berkah Abadi, (2022), h.67-

- 1) Gaya kepemimpinan otoriter, di mana pemimpin memegang kendali penuh dan mengambil keputusan secara sepihak,
- 2) Gaya kepemimpinan demokratis, yang mengutamakan partisipasi dan masukan dari anggota tim dalam proses pengambilan keputusan.
- 3) Gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu gaya yang memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk bertindak tanpa banyak campur tangan dari pemimpin<sup>36</sup>

c. Teori Kontingensi

Teori kontingensi memandang kepemimpinan sebagai sebuah proses yang bergantung pada situasi tertentu. Artinya, efektivitas seorang pemimpin dalam memengaruhi orang lain sangat ditentukan oleh kondisi tugas kelompok yang dihadapi, serta oleh gaya kepemimpinan, kepribadian, dan pendekatan yang digunakan dalam menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Dalam teori ini, terdapat dua jenis variabel utama yang memengaruhi kepemimpinan.

- 1) Orientasi pemimpin, yang dapat diketahui melalui penilaian terhadap rekan kerja yang paling tidak disukai dalam organisasi, dikenal sebagai Least Preferred Coworker (LPC). Seorang pemimpin dengan skor LPC yang tinggi cenderung tidak menyukai rekan kerja tertentu, sedangkan skor LPC yang rendah menunjukkan bahwa pemimpin tersebut tetap dapat bekerja sama dengan baik meskipun tidak menyukai rekan kerjanya.
- 2) Keberpihakan situasi (*situation favorability*), yaitu sejauh mana seorang pemimpin memiliki kendali terhadap situasi yang dihadapi. Tingkat keberpihakan ini ditentukan oleh tiga aspek situasional.

---

<sup>36</sup> Ariefah Sundari, et al., eds., *Kepemimpinan*, (Lamongan: Academia Publication, 2022), h.20-21



- Aspek pertama adalah hubungan antara pemimpin dan anggota. Ini mencerminkan seberapa besar dukungan dan kepercayaan yang diberikan bawahan kepada pemimpinnya. Seorang pemimpin akan berada dalam posisi yang lebih kuat jika ia dihormati dan diterima oleh anggota kelompoknya.
- Aspek kedua adalah kekuasaan posisi, yang berarti sejauh mana pemimpin memiliki wewenang formal untuk menilai kinerja, memberikan penghargaan, atau menjatuhkan sanksi kepada bawahan.
- Aspek ketiga adalah struktur tugas, yang mengacu pada sejauh mana tugas-tugas yang harus diselesaikan memiliki prosedur yang jelas, hasil akhir yang terdefinisi, serta indikator objektif untuk menilai keberhasilan pelaksanaannya.<sup>37</sup>

Kepemimpinan memegang peran penting dalam menjaga kestabilan suatu pemerintahan, termasuk pada masa kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Seorang pemimpin bukan hanya diukur dari kemampuannya memerintah, tetapi juga dari cara ia memengaruhi dan mengarahkan masyarakatnya dalam menghadapi tantangan. Kristianty menjelaskan bahwa kepemimpinan itu terjadi karena adanya hubungan antara pemimpin, pengikut, dan situasi tertentu yang sedang berlangsung. Maka dari itu, untuk mewujudkan stabilitas politik, dibutuhkan pemimpin yang tahu kapan harus bersikap tegas, dan kapan harus bersikap bijak dalam menghadapi situasi yang terus berubah.

Salah satu teori paling awal adalah teori sifat. Teori ini beranggapan bahwa seseorang bisa jadi pemimpin karena memiliki sejumlah sifat tertentu,

---

<sup>37</sup> Wendy Sepmady Hutahaean, *Teori Kepemimpinan*, Malang: Ahlimedia Press (2021), h.38-40.



misalnya percaya diri, jujur, berwawasan luas, dan mampu membuat keputusan penting. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai sosok yang cerdas, disiplin, dan penuh semangat dalam membela negaranya. Karakter pribadinya inilah yang membuatnya mampu menghadapi tekanan dari luar, sekaligus mengatasi gejala yang datang dari dalam negerinya sendiri.

Selain teori sifat, ada juga teori perilaku yang menekankan bahwa kepemimpinan itu bisa dibentuk lewat pembelajaran dan pengalaman, bukan hanya dibawa sejak lahir. Gaya memimpin seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia tumbuh, tokoh yang ia teladani, serta situasi yang dihadapinya. Muhammad Al-Fatih merupakan contoh pemimpin yang terbentuk lewat pendidikan dan latihan yang panjang sejak kecil. Dalam kepemimpinannya, ia bisa bersikap tegas saat menghadapi musuh, tapi juga terbuka terhadap masukan dari para penasihatnya, serta memberikan kebebasan kepada komunitas lain untuk mengurus urusannya sendiri, seperti dalam kebijakan millet. Ini membuktikan bahwa gaya memimpinnya fleksibel sesuai kondisi yang dihadapi.

Teori kontingensi menambahkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang benar-benar cocok untuk semua situasi. Seorang pemimpin harus tahu kapan harus tegas, kapan harus mendengarkan, dan kapan harus bersikap adil. Hal ini tergantung pada situasi yang sedang dihadapi. Muhammad Al-Fatih menunjukkan kepiawaiannya dalam menyesuaikan pendekatan kepemimpinannya. Ia bisa bersikap keras terhadap pemberontakan di dalam negeri, tapi juga mampu berdiplomasi dengan bijak terhadap komunitas Kristen dan Yahudi, dengan memberikan mereka hak mengurus urusan keagamaannya sendiri.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang berfokus pada analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik kontribusi Muhammad Al-Fatih terhadap stabilitas politik Kesultanan Turki Utsmani pada periode 1451-1481 M. Penelitian pustaka dipilih karena sifatnya yang historis, di mana data primer dari periode tersebut sulit diakses secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini mengandalkan sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal akademik, tesis, disertasi, serta terjemahan dokumen historis yang berkaitan dengan masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih.

Penelitian pustaka dipilih karena sifat historis topik yang mengkaji kontribusi Muhammad Al-Fatih terhadap stabilitas politik Kesultanan Turki Utsmani (1451-1481 M), yang membuat data primer seperti wawancara atau observasi langsung tidak memungkinkan. Ketersediaan sumber tertulis yang kaya, seperti buku sejarah, jurnal akademik, dan terjemahan dokumen historis, memungkinkan analisis mendalam terhadap kebijakan politik dan kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Pendekatan ini efisien, tidak memerlukan sumber daya logistik besar, dan mendukung pengisian kesenjangan literatur melalui sintesis berbagai perspektif historis.

Penelitian pustaka relevan karena selaras dengan tujuan penelitian untuk menganalisis kontribusi Muhammad Al-Fatih melalui data historis yang terdokumentasi, seperti kebijakan millet system dan penaklukan Konstantinopel. Pendekatan ini mendukung analisis konteks politik yang kompleks, menghubungkan data dengan teori kepemimpinan dan konflik, serta

memungkinkan analisis komparatif dengan periode lain untuk menyoroti keunikan strategi Al-Fatih, sehingga memberikan kontribusi signifikan pada kajian sejarah dan ilmu politik dengan wawasan baru tentang stabilitas politik di era tersebut.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat didefinisikan sebagai cara atau perspektif yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengelola suatu permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan menjadi kerangka berpikir yang menentukan bagaimana peneliti melihat dan mengkaji objek penelitiannya.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, penulis memakai pendekatan sejarah karena topik yang dibahas berkaitan dengan peristiwa masa lalu, khususnya masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara runtut berbagai peristiwa, kebijakan, serta kondisi politik pada masa itu. Lewat pendekatan ini pula, penulis bisa menelusuri bagaimana proses berlangsungnya perubahan politik, latar belakang munculnya konflik, hingga dampak dari keputusan-keputusan penting yang diambil Al-Fatih terhadap stabilitas politik Kesultanan Turki Utsmani antara tahun 1451 sampai 1481 M. Pendekatan sejarah dianggap relevan karena membantu peneliti memahami suatu peristiwa dalam konteks waktunya, bukan sekadar melihat peristiwa itu secara terpisah.

Sementara itu, sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena tidak hanya menyajikan data dan fakta sejarah secara kronologis, tapi juga menelaah secara lebih dalam bagaimana kontribusi Sultan Muhammad Al-Fatih dalam menjaga kestabilan politik di wilayah kekuasaannya. Penelitian ini menggambarkan

---

<sup>38</sup> Maman Kh, *Metdologi Penelitian Agama:Teori dan Praktik*, Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, (2006), h.94

situasi politik saat itu dengan rinci, lalu menganalisis langkah-langkah strategis yang diambil untuk menyatukan kekuatan, meredam konflik, serta mempertahankan kestabilan negara. Dengan gabungan pendekatan dan sifat ini, diharapkan penelitian mampu memberi gambaran yang utuh tentang peran penting Muhammad Al-Fatih sebagai pemimpin besar dalam sejarah Islam.

### 3. Jenis Data

Data adalah segala bentuk informasi, kenyataan, atau fakta yang memiliki kaitan langsung dengan topik yang sedang dikaji. Sementara itu, yang dimaksud dengan sumber data adalah pihak atau objek baik berupa orang, dokumen, maupun benda lain yang bisa memberikan informasi atau keterangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber sekunder dan tersier. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti, melainkan melalui perantara seperti orang lain, tulisan, atau dokumen tertentu.<sup>39</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai materi yang berkaitan dengan topik pembahasan, seperti buku-buku referensi, artikel dalam surat kabar, majalah, tabloid, situs web, blog, dan platform digital lainnya. Sedangkan sumber data tersier merujuk pada bahan-bahan pendukung lain yang meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan fokus penelitian, tetap memberikan kontribusi atau manfaat tambahan bagi penulis dalam memperkaya pemahaman dan penyusunan naskah ini.

---

<sup>39</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, (2015), h.34

#### 4. Metode Pengumpulan data

##### a. Heuristik

Heuristik adalah metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian sejarah. Kata heuristik berasal dari bahasa Yunani "heuristiken" yang berarti menemukan atau mengumpulkan sumber informasi.<sup>40</sup> Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan tertulis seperti buku, jurnal ensiklopedia, koran, dan sumber dari internet yang relevan dengan Kontribusi Muhammad Al-Fatih Terhadap Bidang Stabilitas Politik Turki Usmani (1451-1481 M).

Peneliti juga mengumpulkan referensi dari Perpustakaan IAIN Parepare, Perpustakaan Daerah, koleksi buku pribadi, serta situs-situs internet yang terkait. Di Perpustakaan IAIN Parepare dan perpustakaan daerah, terdapat berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian pustaka. Salah satunya adalah kartu katalog yang tersedia di bagian depan perpustakaan, berisi informasi mengenai nama pengarang, judul buku, atau subjek yang dicari, lengkap dengan data penting seperti tempat penerbitan, tahun terbit, dan penerbit. Beberapa katalog ini juga telah diterbitkan dalam bentuk buku. Selain itu, tersedia bibliografi atau daftar pustaka khusus yang berkaitan dengan sejarah umum dan sejarah Indonesia, serta indeks jurnal atau majalah yang membahas sejarah dan ilmu sosial. Indeks surat kabar dari dalam dan luar negeri juga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh berbagai perspektif. Berbagai buku referensi seperti *Encyclopedia Britannica*, *Encyclopedia Americana*,

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi sebuah Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, (2013), h.17-18

*Ensiklopedia Indonesia, Ensiklopedia Islam*, serta atlas dan peta sejarah juga tersedia sebagai sumber pendukung penelitian.<sup>41</sup>

#### b. Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan suatu tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi sumber-sumber yang telah diperoleh, guna memastikan tingkat keabsahan dan kredibilitasnya. Dalam kajian metodologi sejarah, proses ini dikenal dengan istilah kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal mengacu pada upaya yang dilakukan oleh peneliti sejarah untuk menguji sejauh mana isi dari sumber yang digunakan dapat dipercaya. Sementara itu, kritik eksternal berfokus pada pemeriksaan keaslian dari sumber tersebut, guna menentukan apakah sumber tersebut benar-benar otentik atau tidak.<sup>42</sup>

Untuk menentukan sejauh mana otentisitas sumber, dapat diajukan tiga pertanyaan:

##### 1) Apakah sumber tersebut benar-benar merupakan dokumen yang dicari?

Pertanyaan ini berkaitan langsung dengan autentisitas dokumen. Artinya, peneliti perlu menelusuri apakah dokumen tersebut benar adanya atau justru merupakan tiruan atau pemalsuan. Beberapa aspek yang dianalisis dalam hal ini mencakup:

- Waktu dan tanggal pembuatan dokumen,
- Bahan material seperti jenis kertas dan tinta yang digunakan,

<sup>41</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, (2016), h.79

<sup>42</sup> Lilik Zulaicha, *Metologi sejarah*, UIN Sunan Ampel Surabaya: Government of Indonesia (GoI) and Islamic Development Bank (IDB), (2007), h.17-18



- Elemen fisik lainnya seperti tulisan tangan, tanda tangan, cap resmi, jenis huruf, serta watermark (penanda air) sebagai indikator keaslian kertas.

2) Apakah dokumen tersebut merupakan sumber asli atau hanya salinan (turunan)?

Pembedaan ini penting dalam memastikan nilai historis dan keakuratan sumber.

3) Apakah dokumen tersebut merupakan versi asli atau sudah melalui reproduksi ulang?

Penting untuk menelaah apakah sumber yang digunakan adalah hasil cetakan ulang, transkripsi, atau interpretasi dari sumber utama.

Apabila tahap kritik eksternal telah dilalui dan diperoleh kesimpulan bahwa dokumen tersebut autentik dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka analisis selanjutnya memasuki tahapan kritik internal. Fokus utama pada tahap ini adalah untuk menilai kredibilitas informasi yang dikandung oleh sumber tersebut. Beberapa prosedur dalam kritik internal meliputi:

1) Evaluasi intrinsik terhadap sumber

Langkah awal adalah memahami karakteristik dokumen. Contohnya, dokumen serah terima jabatan (*memorie van overgave*) memiliki nilai berbeda dibandingkan laporan rahasia dari penasihat kolonial tentang isu yang sama. Demikian pula, laporan jurnalistik tidak setara nilainya dengan catatan harian pribadi. Selanjutnya, perhatian diarahkan pada latar belakang penulis atau saksi dalam sumber tersebut, termasuk:

- Kompetensinya untuk memberikan kesaksian berdasarkan kehadirannya



saat kejadian berlangsung, keahlian yang dimiliki, serta kedekatan waktu dan tempat dengan peristiwa.

- Kecenderungan saksi untuk menyampaikan informasi secara jujur atau adanya potensi bias.

## 2) Koraborasi dan Validasi Fakta Sejarah

Meskipun sebuah sumber tergolong primer dan telah diverifikasi keasliannya melalui kritik eksternal, hal tersebut belum menjamin bahwa isinya benar dan layak dipercaya. Diperlukan kritik internal untuk menguji validitas konten yang disampaikan.

Namun demikian, sumber yang lolos kedua kritik tersebut pun belum otomatis dapat dianggap sebagai fakta sejarah. Untuk mencapai status sebagai fakta sejarah, diperlukan koraborasi, yakni pembuktian silang antara satu sumber dengan satu atau lebih sumber lain yang independen. Koraborasi yang berasal dari sumber-sumber yang tidak saling terikat kepentingan dapat menghasilkan informasi yang mendekati kepastian (certainty fact). Sebaliknya, jika dukungan tersebut tidak mencukupi, maka hasilnya hanya dianggap sebagai dugaan sementara (alleged fact). Apabila koraborasi tidak dimungkinkan, maka nilai pembuktian dari sumber tersebut tergolong lemah, terlepas dari statusnya sebagai sumber primer ataupun sekunder.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini, Kritik eksternal memastikan keaslian dan validitas sumber, sementara kritik internal menilai isi dan kredibilitas data sejarah yang digunakan agar hasil analisis dalam penelitian ini dapat

---

<sup>43</sup> Nina Herlina, *Metode Sejarah*, Bandung: Satya Historika, (2020), h.46

dipertanggungjawabkan secara akademis dan metodologis.

c. Interpretasi

Setelah proses verifikasi terhadap sumber selesai dilakukan, tahap berikutnya yang harus ditempuh adalah interpretasi, yaitu proses penafsiran terhadap data atau sumber yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti dituntut untuk bersikap jujur dan objektif, sebab unsur subjektivitas bisa saja memengaruhi hasil akhir dari penulisan sejarah. Untuk menghasilkan sebuah narasi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan, peneliti harus menyampaikan data sesuai dengan kenyataan yang ditemukan, tanpa menambahkan atau mengurangi informasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tak kalah penting, peneliti juga wajib menyebutkan secara jelas asal-usul data yang digunakan, sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah. Proses interpretasi ini umumnya mencakup dua langkah utama:

1) Analisis

Analisis dilakukan dengan cara mengurai dan memeriksa setiap sumber yang telah melewati tahap verifikasi. Setiap sumber umumnya mengandung informasi penting, dan informasi tersebut disebut sebagai fakta. Tujuan dari analisis adalah untuk menggali dan mengidentifikasi fakta-fakta berdasarkan data yang ada di lapangan.

2) Sintesis

Tahap ini adalah kebalikan dari analisis yakni menyatukan kembali berbagai fakta yang telah ditemukan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Misalnya, ketika terdapat data tentang pertempuran, pergantian jabatan, rapat-rapat penting, pengungsian masyarakat, hingga pengibaran atau

penurunan bendera, maka semua fakta tersebut bisa diinterpretasikan sebagai tanda terjadinya revolusi. Dengan kata lain, "revolusi" adalah sebuah kesimpulan yang ditarik oleh sejarawan dari berbagai potongan data yang telah dianalisis dan disusun menjadi satu kesatuan makna.<sup>44</sup>

#### d. Historiografi

Historiografi mempunyai dua makna. Pertama, penulisan sejarah (historical writting). Kedua, sejarah penulisan sejarah (historical of historical writting).<sup>45</sup> Istilah "historiografi" berasal dari dua kata, yaitu *historia* yang berarti sejarah, dan *grafi* yang bermakna penulisan atau deskripsi. Kata *history* sendiri berasal dari istilah Yunani *istoria*, yang secara umum diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Bagi para filsuf Yunani, kata *istoria* awalnya lebih sering dipakai untuk menjelaskan berbagai fenomena alam, namun dalam perkembangannya, istilah ini lebih banyak digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dan aktivitas manusia. Secara sederhana, *history* sering dimaknai sebagai "kisah tentang masa lalu manusia."<sup>46</sup>

Tahap historiografi dalam metode penelitian sejarah merupakan langkah akhir sekaligus puncak dari keseluruhan proses yang harus dilalui oleh seorang sejarawan. Pada tahap ini, penulisan sejarah dilakukan berdasarkan hasil dari tahapan sebelumnya, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik

<sup>44</sup> Dahimatul Afidah. *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, (2021), 25-26

<sup>45</sup> Dedi Irwanto and Sair Alian, *Metodologi dan Historiografi Sejarah*, (Yogyakarta: Eja Publisher, 2014), h.151

<sup>46</sup> Imas Emalia, *Historiografi Indonesia Sejak Masa Awal Sampai Masa Kontemporer*, Jakarta: UIN Jakarta Press, (2006), h.6

sumber (seleksi dan evaluasi sumber yang relevan), serta interpretasi (penafsiran terhadap peristiwa berdasarkan sumber yang telah dikaji). Setelah ketiga tahap tersebut dilalui dengan baik, barulah penulis dapat menyusun narasi sejarah secara sistematis dan ilmiah, sesuai dengan konteks waktu dan peristiwa yang diteliti.<sup>47</sup> Historiografi merupakan tahap di mana seorang sejarawan menyampaikan hasil rekonstruksi peristiwa masa lalu berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dengan kata lain, ini adalah proses penulisan sejarah. Pada tahap ini, peneliti menuangkan hasil interpretasi terhadap fakta-fakta sejarah ke dalam bentuk narasi yang runtut dan menyatu. Di sinilah keterampilan dalam merangkai tulisan atau kemampuan menulis yang baik sangat dibutuhkan.

---

<sup>47</sup> Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah Metode dan Praktik*, Gresik: Jendela Sastra Indonesia Press, (2020), h.115-116

## BAB II

### SITUASI POLITIK PADA MASA SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH (1451-1481)

#### A. Latar Belakang Historis Kesultanan Utsmani Sebelum Pemerintahan Al-Fatih

1. Kekalahan Turki Utsmani dalam Pertempuran Varna (1444) dan dampaknya terhadap stabilitas politik.

Kekalahan dalam Pertempuran Varna menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah militer dan politik Kesultanan Utsmani. Meskipun pada akhirnya pihak Kristen mengalami kekalahan tragis, pertempuran ini menunjukkan bahwa eksistensi Utsmani telah menjadi ancaman serius bagi dunia Kristen Eropa. Selain itu, munculnya aliansi antara Paus dan Kekaisaran Bizantium mencerminkan upaya bersama untuk membendung ekspansi Utsmani.

Menurut Charles River:

Pope Eugene IV was deeply interested in the possibility of uniting the Catholic Church and the Eastern Orthodox Church, aiming to reunite Christendom after centuries of conflict and division. In this effort, Byzantine Emperor John VIII Palaiologos participated in several sessions of the Council of Florence in 1439, where he formally requested the Pope to unite the Eastern Church with the Catholic Church, hoping that military support from the Pope could help defend Constantinople against the Ottoman threat. Although the Pope was ambitious to restore Eastern Christianity under Rome, he also had to deal with internal divisions within the Catholic Church and dynastic issues in Hungary. To pursue peace, the Pope relied on Cardinal Julian Cesarini, who had experience dealing with the Hussites in Bohemia. In January 1443, the Pope issued a call for a crusade, but the response was insufficient and the funds collected fell far short of what was needed. Nevertheless, the Pope remained optimistic about victory against the Ottomans and appointed John Hunyadi, the voivode of Transylvania, to lead the military campaign. Hunyadi, a wealthy and influential leader, managed to assemble an army of about 38,000 soldiers, including mercenaries from various backgrounds. The Long Campaign led by Hunyadi began in the fall of 1443, achieving several victories, including at Niš, although suffering a setback at the Zlatitsa Pass. However, Hunyadi secured a significant victory at Kunovica, prompting Sultan Murad II to propose a peace

treaty favorable to Hungary. Despite uncertainties and internal divisions within Hungary regarding this peace, the treaty known as the Treaty of Szeged was eventually signed in June 1444, although many still wished to continue the war.<sup>48</sup>

Terjemahan:

Paus Eugene IV sangat tertarik pada kemungkinan untuk menyatukan Gereja Katolik dengan Gereja Ortodoks Timur, dengan tujuan menyatukan kembali dunia Kristen setelah berabad-abad konflik dan perpecahan. Dalam upaya ini, Kaisar Bizantium, John VIII Palaiologos, berpartisipasi dalam beberapa sesi Konsili Florence pada tahun 1439, di mana ia secara resmi meminta kepada Paus agar Gereja Timur disatukan dengan Gereja Katolik, dengan harapan bahwa dukungan militer dari Paus dapat membantu mempertahankan Konstantinopel dari ancaman Utsmani. Meskipun Paus memiliki ambisi untuk mengembalikan Kekristenan Timur di bawah kekuasaan Roma, ia juga harus menghadapi perpecahan internal dalam Gereja Katolik dan persoalan dinasti di Hongaria.

Dalam upayanya mencapai perdamaian, Paus mengandalkan Kardinal Julian Cesarini, yang memiliki pengalaman dalam menghadapi kaum Husit di Bohemia. Pada Januari 1443, Paus menyerukan perang salib, namun tanggapan yang diterima tidak memadai dan dana yang terkumpul jauh dari yang dibutuhkan. Meskipun demikian, Paus tetap optimis meraih kemenangan atas Utsmani dan menunjuk John Hunyadi, Voivode Transylvania, untuk memimpin kampanye militer tersebut. Hunyadi, seorang pemimpin kaya dan berpengaruh, berhasil mengumpulkan pasukan sekitar 38.000 tentara, termasuk tentara bayaran dari berbagai latar belakang.

Kampanye Panjang yang dipimpin oleh Hunyadi dimulai pada musim gugur 1443 dan meraih beberapa kemenangan, termasuk di Niš, meskipun sempat mengalami kemunduran di Celah Zlatitsa. Namun, Hunyadi berhasil meraih kemenangan penting di Kunovica, yang mendorong Sultan Murad II untuk mengusulkan perjanjian damai yang menguntungkan pihak Hongaria. Meskipun terdapat ketidakpastian dan perpecahan internal di Hongaria terkait perjanjian tersebut, perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Szeged akhirnya ditandatangani pada Juni 1444, meskipun masih banyak pihak yang menginginkan agar perang terus berlanjut.

Teks di atas menggambarkan kompleksitas hubungan politik dan keagamaan antara Kekaisaran Bizantium, Gereja Katolik Roma, dan negara-negara Eropa Timur menjelang jatuhnya Konstantinopel ke tangan Utsmani. Usaha Paus Eugene IV untuk menyatukan dua cabang utama Kekristenan menunjukkan bahwa motif keagamaan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan

---

<sup>48</sup> Charles River, *The Crusade of Varna*, (2022).



politik dan militer. Keterlibatan Kaisar Bizantium dan tokoh-tokoh seperti Hunyadi mencerminkan upaya putus asa dunia Kristen dalam menghadapi ancaman ekspansi Utsmani, yang saat itu kian kuat di bawah kepemimpinan Sultan Murad II. Perjanjian Szeged menjadi bukti bahwa meskipun terdapat semangat untuk melanjutkan perang salib, realitas politik dan kelelahan militer memaksa pihak Eropa untuk berkompromi.

Dalam konteks sejarah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, peristiwa ini menunjukkan bahwa Utsmani telah menghadapi berbagai upaya koalisi Eropa sejak awal, namun kekuatan dan strategi Utsmani terus berkembang hingga mampu menembus benteng Bizantium. Hal ini memperkuat narasi bahwa keberhasilan Al-Fatih tidak hanya hasil dari kekuatan militer semata, tetapi juga karena kelemahan dan disintegrasi internal di pihak lawan. Untuk memahami secara lebih rinci jalannya Pertempuran Varna dan dinamika kekuatan antara pasukan Kristen dan Utsmani, penting untuk merujuk pada catatan sejarah yang lebih spesifik. Salah satu sumber yang menggambarkan situasi tersebut adalah Stephen Turnbull menurutnya:

The confrontation between the two forces took place near Varna in November 1444, where Hunyadi chose a strategic position. Although the Turkish army was much larger, Hunyadi initially planned to attack but was forced to build defenses using wagons. King Wladislaw III, who was suffering from health issues, was placed in a secure position. The battle began favorably for the Christian forces, but when King Wladislaw entered the fray, the situation became critical. Hunyadi, realizing his forces were overwhelmed, tried to rescue the king but failed, resulting in the king's death. The Turkish victory at Varna marked a turning point, prompting Murad II to abdicate in favor of his son, Mehmet. However, Murad II soon returned to power to face the Danube expedition led by Hunyadi in 1445, which ended with the crusaders' retreat. Murad II then resumed his invasion of the Balkans, capturing the Peloponnesus in 1446 and preparing for a new crusade announced by Pope Nicholas V. Despite limited support, Hunyadi returned to the battlefield to join George Skanderbeg of Albania, but in the Battle of Kosovo in 1448, he suffered another defeat, marking the



continuation of Murad II's reign until his death in 1451. Although he failed to capture Albania, Murad II's legacy was carried on by Mehmet II, later known as Mehmet the Conqueror.<sup>49</sup>

Terjemahan:

Konfrontasi antara dua kekuatan terjadi di dekat Varna pada bulan November 1444, di mana Hunyadi memilih posisi strategis. Meskipun pasukan Turki jauh lebih besar, Hunyadi awalnya berencana untuk menyerang, tetapi akhirnya terpaksa membangun pertahanan menggunakan gerobak. Raja Wladislaw III, yang saat itu mengalami masalah kesehatan, ditempatkan di posisi yang aman. Pertempuran awalnya menguntungkan bagi pasukan Kristen, namun ketika Raja Wladislaw turut terjun langsung ke medan pertempuran, situasi berubah menjadi kritis. Hunyadi, menyadari pasukannya kewalahan, berusaha menyelamatkan sang raja, tetapi gagal, yang akhirnya menyebabkan kematian Raja Wladislaw. Kemenangan pasukan Turki di Varna menjadi titik balik penting, yang mendorong Sultan Murad II untuk turun takhta dan menyerahkannya kepada putranya, Mehmed. Namun, tidak lama kemudian Murad II kembali naik takhta untuk menghadapi ekspedisi Danube yang dipimpin oleh Hunyadi pada tahun 1445, yang berakhir dengan mundurnya pasukan salib. Murad II kemudian melanjutkan invasi ke wilayah Balkan, merebut Peloponnesos pada tahun 1446, dan bersiap menghadapi perang salib baru yang diumumkan oleh Paus Nicholas V. Meskipun mendapat dukungan yang terbatas, Hunyadi kembali ke medan perang untuk bergabung dengan George Skanderbeg dari Albania, namun dalam Pertempuran Kosovo tahun 1448, ia kembali mengalami kekalahan. Hal ini menandai kelanjutan pemerintahan Murad II hingga wafatnya pada tahun 1451. Meskipun ia gagal merebut Albania, warisan Murad II diteruskan oleh Mehmed II, yang kemudian dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk.

Narasi di atas menegaskan bahwa Pertempuran Varna bukan hanya merupakan bentrokan militer biasa, melainkan bagian dari rangkaian panjang konflik antara kekuatan Kristen Eropa dan Kesultanan Utsmani. Strategi Hunyadi yang semula defensif berubah menjadi bumerang ketika situasi tidak terkendali, terutama setelah kematian Raja Wladislaw III yang melemahkan moral pasukan Kristen. Kemenangan Utsmani di Varna memperkuat posisi politik dan militer Murad II, serta membuka jalan bagi konsolidasi kekuatan yang lebih besar di Balkan.

---

<sup>49</sup> Stehphen Turnbull, *The Ottoman Empire 1326-1699*, Oxford : Osprey Publishing, (2003).  
h.30-31

Kembalinya Murad II ke tampuk kekuasaan menunjukkan bahwa dinamika kepemimpinan Utsmani sangat adaptif terhadap tantangan eksternal. Penaklukan Peloponnesos dan kekalahan Hunyadi di Kosovo menjadi indikator bahwa Utsmani tidak hanya mampu bertahan dari tekanan militer Eropa, tetapi juga secara aktif memperluas wilayah pengaruhnya. Dalam konteks ini, transisi kekuasaan dari Murad II ke Mehmed II tidak terjadi dalam kekacauan, melainkan melalui warisan stabilitas dan kesiapan militer yang solid. Hal inilah yang kemudian menjadi fondasi kuat bagi Mehmed II dalam merealisasikan penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453.

Dengan demikian, kemenangan Turki Utsmani dalam berbagai pertempuran sebelum 1453, termasuk di Varna dan Kosovo, membuktikan bahwa keberhasilan Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan hasil dari kesinambungan kebijakan militer dan politik yang dirintis sejak masa pemerintahan ayahnya, Murad II.



Sumber: <https://www.peramuseum.org/blog/the-battle-of-varna/1301>

*Gambar 2.1 Pertempuran Varna", Stanisław Chlebowski, 1865-1875. Minyak di atas kanvas, 112 X 190 cm.*

Keberhasilan-keberhasilan militer Kesultanan Utsmani sebelum penaklukan Konstantinopel tidak dapat dilepaskan dari peran penting Sultan Murad II sebagai pendahulu dan pembuka jalan bagi anaknya, Muhammad Al-Fatih. Strategi Murad II dalam menaklukkan wilayah-wilayah penting di Balkan serta menundukkan pasukan salib Eropa turut menciptakan stabilitas regional yang sangat krusial. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan secara optimal oleh Al-Fatih untuk melancarkan pengepungan besar terhadap Konstantinopel.

Sebagai penguat narasi tersebut, Menurut Charles River:

His final efforts as a ruler succeeded in stabilizing the region and also in preventing the Christian forces from providing aid to Constantinople when his son was about to carry out one of the most famous and influential sieges in history.<sup>50</sup>

Terjemahan:

Usaha-usaha terakhirnya sebagai seorang penguasa berhasil menstabilkan kawasan dan sekaligus mencegah pasukan Kristen memberikan bantuan kepada Konstantinopel ketika putranya tengah bersiap melancarkan salah satu pengepungan paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah

Pernyataan di atas menegaskan peran penting Sultan Murad II dalam menciptakan fondasi yang kokoh bagi penaklukan Konstantinopel oleh putranya, Sultan Muhammad Al-Fatih. Keberhasilan Murad II dalam menstabilkan kawasan Balkan dan mematahkan aliansi militer Eropa telah melemahkan kemampuan negara-negara Kristen untuk merespons ancaman terhadap Konstantinopel. Hal ini memberi ruang strategis bagi Al-Fatih untuk fokus pada perencanaan pengepungan tanpa harus menghadapi tekanan eksternal yang berarti dari kekuatan Barat.

---

<sup>50</sup> Charles River, *The Rise of The Ottoman Empire*, Carolina Selatan: CreateSpace Independent Publishing Platform, (2017).

Faktor stabilitas regional dan isolasi Bizantium dari bantuan luar merupakan dua elemen kunci yang menentukan keberhasilan pengepungan Konstantinopel pada tahun 1453. Dalam konteks ini, pencapaian Muhammad Al-Fatih bukanlah hasil instan, melainkan buah dari kesinambungan strategi politik dan militer yang telah dipersiapkan secara matang oleh pendahulunya. Dengan kata lain, peran Murad II bukan sekadar sebagai penguasa transisi, tetapi sebagai arsitek awal dari sebuah kemenangan monumental dalam sejarah Islam dan dunia. Dampak kekalahan pasukan Kristen di Varna terhadap keberhasilan pengepungan Konstantinopel, penting untuk melihat bagaimana momentum militer tersebut memberi keuntungan strategis bagi pihak Utsmani. Kemenangan ini bukan sekadar kemenangan taktis, tetapi juga berdampak langsung pada melemahnya upaya Eropa dalam mempertahankan Bizantium. Tony Bunting memberikan penjelasan mengenai kaitan antara kemenangan Utsmani di Varna dan terbukanya jalan bagi penaklukan Konstantinopel:

The victory of the Turkish forces over the Hungarian army on November 10, 1444, in the region now known as Bulgaria, halted European efforts to defend Constantinople (now Istanbul) from invasion. This triumph provided the Ottoman Empire with an opportunity to secure and expand its territories in the Balkans. Meanwhile, the counteroffensive by the Christian forces at Varna ended in a devastating defeat, thereby paving the way for the Ottoman conquest of Constantinople.<sup>51</sup> Although the Ottoman forces emerged victorious, the triumph only intensified negative perceptions from European countries toward them and sparked resistance from domestic groups who disagreed with their actions.<sup>52</sup>

Terjemahan:

Kemenangan pasukan Turki atas tentara Hongaria pada 10 November 1444 di wilayah yang kini dikenal sebagai Bulgaria menghentikan upaya Eropa untuk mempertahankan Konstantinopel (sekarang Istanbul) dari invasi. Keberhasilan ini memberi Kesultanan Utsmani kesempatan untuk mengamankan sekaligus memperluas wilayah kekuasaannya di kawasan Balkan. Sementara itu, serangan

<sup>51</sup> Tony Bunting, *Pertempuran Varna*, *Ensiklopedia Britannica*, 3 November 2024, <https://www.britannica.com/event/Battle-of-Varna>. Diakses 18 Februari 2025.

<sup>52</sup> Muhammad Ridwan, and Nurhasanah Bakhtiar. "Nilai-Nilai Pendidikan dan Dakwah Muhammad al-Fatih Sebagai Penakluk Konstantinopel." *Wardah* 21.1 (2020).

balik dari pasukan Kristen di Varna berakhir dengan kekalahan telak, sehingga membuka jalan bagi penaklukan Konstantinopel oleh Utsmani. Meskipun pasukan Utsmani meraih kemenangan, keberhasilan ini justru memperburuk persepsi negara-negara Eropa terhadap mereka dan memicu perlawanan dari kelompok-kelompok dalam negeri yang tidak setuju dengan tindakan Utsmani.

Kutipan di atas menyoroti pentingnya kemenangan Utsmani di Varna dalam memperkuat dominasi politik dan militer mereka di Eropa Tenggara. Kemenangan tersebut tidak hanya menghentikan intervensi Eropa untuk membela Bizantium, tetapi juga menciptakan ruang strategis yang memungkinkan Utsmani mengonsolidasikan kekuatannya menjelang pengepungan Konstantinopel. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa pertempuran Varna berperan sebagai penghapus hambatan terakhir yang memungkinkan terjadinya penaklukan monumental tahun 1453.

Namun, seperti dijelaskan oleh Bunting, kemenangan militer tersebut tidak sepenuhnya menghasilkan stabilitas internal. Di balik keberhasilan eksternal, terdapat dinamika perlawanan dalam negeri dan peningkatan ketegangan dengan dunia Kristen Eropa. Hal ini mencerminkan bahwa pencapaian politik dan militer Utsmani tidak lepas dari risiko dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam. Oleh karena itu, keberhasilan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel bukan hanya karena kekuatan senjata dan strategi, melainkan juga karena kemampuannya mempertahankan legitimasi dan stabilitas di tengah kompleksitas situasi regional dan domestik yang mengiringi langkah ekspansi tersebut.



## 2. Transisi Kekuasaan dari Sultan Murad II ke Muhammad Al-Fatih dan Tantangan Awal Pemerintahan.

Transisi kekuasaan dari Sultan Murad II kepada putranya, Muhammad Al-Fatih, menandai fase krusial dalam sejarah Kesultanan Utsmani. Meskipun usianya masih tergolong muda saat naik takhta, Muhammad Al-Fatih dihadapkan pada berbagai tantangan internal dan eksternal yang menguji ketangguhan dan kecerdasannya sebagai pemimpin. Dalam menggambarkan dinamika masa awal pemerintahannya, Gabor dan Bruce menjelaskan bahwa:

In the lead-up to the conquest of Constantinople by Sultan Mehmed II in 1453, the Ottoman Empire and the Byzantine Empire were embroiled in an increasingly intense conflict. Following the Ottoman defeat at the Battle of Ankara in 1402, Byzantium took advantage of the situation by reclaiming some territories and interfering in the Ottoman civil war. However, after Mehmed I and Murad II successfully reestablished the strength of the Ottoman state, Byzantium found itself increasingly cornered, especially after the Crusader defeats at Varna in 1444 and Kosovo in 1448. When Mehmed II ascended the throne in 1451, many underestimated his capabilities, including the Byzantines and European powers. His agreements with János Hunyadi, governor of Hungary, and George Branković of Serbia, as well as his seemingly friendly stance toward the Knights of St. John in Rhodes and the Genoese rulers in Chios and Lesbos, led Europe to believe that Mehmed II's rule posed no real threat. Even some former emirs were misled by this perception and launched rebellions in Asia that same year. However, Mehmed II swiftly crushed these uprisings and further consolidated his power. Meanwhile, Byzantium, plagued by ongoing political fragmentation, continued to weaken, while Mehmed II meticulously prepared a grand strategy to capture Constantinople and establish the Ottoman Empire as the dominant power in the region.<sup>53</sup>

Terjemahan:

Menjelang penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453, Kekaisaran Utsmani dan Kekaisaran Bizantium terlibat dalam konflik yang semakin intens. Setelah kekalahan Utsmani dalam Pertempuran Ankara pada tahun 1402, Bizantium memanfaatkan situasi tersebut dengan merebut kembali beberapa wilayah dan ikut campur dalam perang saudara Utsmani. Namun, setelah Mehmed I dan Murad II berhasil membangun kembali kekuatan negara Utsmani, Bizantium semakin terdesak, terutama setelah kekalahan pasukan salib di Varna pada tahun 1444 dan di Kosovo pada tahun 1448. Ketika Mehmed II naik takhta pada tahun 1451, banyak pihak meremehkan kemampuannya,

<sup>53</sup> Gabor Agoston & Bruce Masters, (New Yor An imprint of Infobase Publishing, 2009).



termasuk Bizantium dan kekuatan-kekuatan Eropa. Perjanjiannya dengan János Hunyadi, gubernur Hungaria, dan George Branković dari Serbia, serta sikapnya yang tampak bersahabat terhadap Ordo St. Yohanes di Rodos dan para penguasa Genova di Chios dan Lesbos, membuat Eropa percaya bahwa pemerintahan Mehmed II tidak membawa ancaman serius. Bahkan beberapa bekas emir turut tertipu oleh persepsi ini dan melancarkan pemberontakan di Asia pada tahun yang sama. Namun, Mehmed II dengan cepat menumpas pemberontakan tersebut dan semakin mengonsolidasikan kekuasaannya. Sementara itu, Bizantium yang terus-menerus dilanda perpecahan politik, kian melemah, sementara Mehmed II secara cermat mempersiapkan strategi besar untuk merebut Konstantinopel dan menjadikan Kekaisaran Utsmani sebagai kekuatan dominan di kawasan tersebut.

Dinamika politik dan tantangan yang dihadapi Sultan Mehmed II (Mehmed Celebi) sejak awal masa pemerintahannya meliputi:

a. Penaklukan Istanbul sebagai Misi Keagamaan dan Sejarah

Penaklukan Konstantinopel (Istanbul) tidak hanya dipandang sebagai kemenangan militer, tetapi juga sebagai pencapaian yang berkaitan dengan ajaran Islam. Hal ini terlihat dari bagaimana penaklukan tersebut dikaitkan dengan perjalanan menuju "jembatan shirath al-mustaqin," yang dalam Islam merujuk pada jalan lurus menuju akhirat. Ini menunjukkan bahwa Mehmed II dan pasukannya melihat misi mereka sebagai bagian dari takdir keagamaan.

b. Kontroversi Pengangkatan Mehmed II sebagai Sultan

Mehmed II naik takhta dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 19 tahun, setelah kematian ayahnya, Sultan Murad II. Pengangkatannya menimbulkan pro dan kontra, baik dari kalangan internal Utsmani maupun dari pihak luar. Sejak awal, ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemberontakan internal seperti yang dilakukan oleh Mustafa Palsu dan ancaman dari koalisi musuh, seperti Hungaria dan Serbia.

c. Kekacauan Politik di Balkan

Pada masa itu, wilayah Balkan menjadi ajang perebutan kekuasaan antara Utsmani dan berbagai kekuatan Eropa. Serbia, yang terinspirasi oleh upaya Stefan Dusan untuk membangun Kekaisaran Serbia, berusaha merebut kota-kota Utsmani satu per satu. Selain itu, ada upaya penyatuan Gereja Ortodoks dan Katolik, yang mencerminkan kesatuan Kristen dalam menghadapi ancaman Utsmani.

d. Tekanan Psikologis yang Dihadapi Mehmed II

Meskipun Mehmed II dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan strategis, teks ini juga menyoroti sisi emosionalnya. Dalam situasi genting, ia harus mengambil keputusan yang sulit dan sering kali penuh tekanan. Surat yang ia tulis kepada ayahnya di Manisa menunjukkan bagaimana ia berada dalam dilema, baik sebagai seorang anak maupun sebagai seorang pemimpin.

e. Perjuangan Mehmed II dalam Mengamankan Kekuasaan

Dalam menghadapi berbagai tekanan, Mehmed II harus menunjukkan kepemimpinan yang tegas. Meskipun usianya masih muda, ia dipaksa untuk bertindak cepat dalam situasi genting. Keteguhannya dalam memimpin pasukan serta mengambil alih peran penting dalam kerajaan menunjukkan bahwa ia bukan sekadar penerus takhta, tetapi seorang pemimpin yang memiliki visi besar bagi peradaban Islam.<sup>54</sup>

Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453 merupakan puncak dari dinamika politik dan militer yang kompleks, sebagaimana diuraikan dalam teks. Visi keagamaan yang kuat, yang

---

<sup>54</sup> Mustafa Armagan, *Muhammad Al-Fatih Kisah Kontroversial Sang Penakluk Konstantinopel*, Terj. Bahasa Indonesia, Cet. 1 Jakarta: Kaysa Media, (2014). h.32-25

menghubungkan penaklukan tersebut dengan misi Islam, memperkuat legitimasi Mehmed II di mata rakyatnya, sekaligus melemahkan semangat lawan yang telah terpecah. Kontroversi atas pengangkatannya sebagai sultan pada usia muda mencerminkan tantangan internal yang berhasil diatasi melalui kepemimpinan yang tegas dan strategis, seperti penumpasan pemberontakan dan penguatan aliansi politik. Ketidakstabilan politik di wilayah Balkan serta upaya penyatuan Gereja Ortodoks dan Katolik menunjukkan kerapuhan perlawanan Eropa, yang tidak mampu memanfaatkan kelemahan awal Mehmed II. Tekanan psikologis yang dihadapi Mehmed, sebagaimana tergambar dalam suratnya, justru menggambarkan kedalaman karakternya sebagai pemimpin yang mampu menyeimbangkan emosi dan tanggung jawab kepemimpinan. Secara keseluruhan, keberhasilan Mehmed II tidak hanya terletak pada strategi militer, tetapi juga pada kemampuannya memanfaatkan kelemahan musuh, baik dari Kekaisaran Bizantium maupun kekuatan Eropa, sembari membangun narasi keagamaan dan politik yang kokoh untuk mempersatukan kekuasaannya.

## B. Dinamika Politik Internal Kesultanan Utsmani

### 1. Konflik internal: Pemberontakan Janissary dan upaya konsolidasi kekuasaan.

Pada masa awal pemerintahannya, Sultan Mehmed II menghadapi tantangan politik internal yang cukup kompleks. Meskipun ia mewarisi kondisi negara yang relatif stabil, ancaman dari dalam tetap menjadi perhatian utama, khususnya dari kalangan bangsawan Turki dan pasukan elit Janissary yang memiliki kekuatan politik tersendiri. Untuk mengonsolidasikan kekuasaannya secara penuh dan memastikan loyalitas mutlak dari elemen-elemen strategis

dalam pemerintahan, Mehmed harus mengambil langkah-langkah tegas dan sistematis. Menurut Stanford:

After ascending the throne on February 18, 1451, Sultan Mehmed II inherited the Ottoman Empire in a much more stable condition compared to the reign of his father several decades earlier. He had the freedom to act without significant internal or external pressures. To strengthen his legitimacy as the rightful ruler, Mehmed and his advisors, Sahabeddin Sahin Pasha and Zaganos Pasha, realized they needed a major victory to silence their political opponents. One of the most effective ways to achieve this was by conquering Constantinople. Mehmed understood that as long as Byzantium stood, there would always be external threats, especially from the Christian world, which could launch a Crusade to destroy the Ottomans. Moreover, the city held great significance in Islamic history. For a long time, Muslim leaders believed that the conquest of Constantinople was part of Islam's destined glory. Prophecies from the 9th-century scholar al-Kindi and a hadith narrated by Ibn Khaldun foretold that a great leader would emerge and bring the city under Islamic rule. Constantinople was often referred to as the "Red Apple" (Kizil Elma), a symbolic target of Muslim expansion. With this belief, Mehmed immediately began formulating strategies to realize his ambition. However, before launching this grand plan, he had to overcome several challenges threatening the stability of his rule: resistance from the Turkish nobility led by Çandarlı Halil, who opposed the conquest fearing it would empower the kapıkulu (palace elite troops) and devşirme (non-Muslim recruited soldiers); securing border stability by renewing peace treaties with Serbia and Wallachia; and neutralizing the threat from Karaman, which continued to support anti-Ottoman factions. To suppress Karaman, Mehmed sent troops to Akşehir, eventually forcing its ruler, Ibrahim, to agree to a peace deal, which included marrying off his daughter to Mehmed. To ensure continued stability in Anatolia during his campaign, Mehmed appointed Ishak Pasha as governor, with the primary task of maintaining order and preventing rebellion. Lastly, Mehmed took direct control of the Janissary corps, previously under Çandarlı Halil's influence, using a minor uprising as justification to replace their leadership with loyal devşirme members. These changes ensured that the Janissaries returned to their original function as an elite force wholly loyal to the Sultan and became a crucial instrument in maintaining the stability of his rule.<sup>55</sup>

Terjemahan:

Setelah naik takhta pada 18 Februari 1451, Sultan Mehmed II mewarisi Kesultanan Utsmani dalam kondisi yang jauh lebih stabil dibandingkan masa pemerintahan ayahnya beberapa dekade sebelumnya. Ia memiliki keleluasaan untuk bertindak tanpa tekanan besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk memperkuat legitimasinya sebagai penguasa yang sah, Mehmed bersama para penasihatnya, Sahabeddin Sahin Pasha dan Zaganos Pasha, menyadari bahwa

---

<sup>55</sup> Stanford Shaw, *History Of The Ottoman Empire And Modern Turkey, Volume I: Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280-1808*, New York: Cambridge University Press, (1976). h.55-56.

mereka membutuhkan kemenangan besar untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Salah satu cara paling efektif untuk mencapai hal ini adalah dengan menaklukkan Konstantinopel. Mehmed memahami bahwa selama Bizantium masih berdiri, akan selalu ada ancaman eksternal, terutama dari dunia Kristen yang dapat melancarkan Perang Salib untuk menghancurkan Utsmani.

Selain itu, kota tersebut memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah Islam. Sejak lama para pemimpin Muslim meyakini bahwa penaklukan Konstantinopel adalah bagian dari kejayaan Islam yang telah ditakdirkan. Ramalan dari ulama abad ke-9, Al-Kindi, dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Khaldun menyebutkan bahwa akan muncul seorang pemimpin besar yang akan membawa kota itu ke dalam kekuasaan Islam. Konstantinopel sering dijuluki sebagai “Apel Merah” (Kizil Elma), simbol dari tujuan ekspansi Islam. Dengan keyakinan tersebut, Mehmed segera menyusun strategi untuk mewujudkan ambisinya.

Namun, sebelum menjalankan rencana besarnya itu, ia harus mengatasi berbagai tantangan yang mengancam kestabilan pemerintahannya: perlawanan dari bangsawan Turki yang dipimpin oleh Çandarlı Halil, yang menentang penaklukan karena khawatir hal itu akan memperkuat posisi pasukan elit istana (kapıkulu) dan tentara devşirme (prajurit non-Muslim hasil rekrutmen); menstabilkan wilayah perbatasan dengan memperbarui perjanjian damai dengan Serbia dan Wallachia; serta menetralkan ancaman dari Karaman yang terus mendukung faksi-faksi anti-Utsmani.

Untuk menekan Karaman, Mehmed mengirim pasukan ke Akşehir dan akhirnya memaksa penguasanya, Ibrahim, menyetujui perjanjian damai, termasuk menikahkan putrinya dengan Mehmed. Demi memastikan stabilitas di wilayah Anatolia selama kampanye militer berlangsung, Mehmed menunjuk Ishak Pasha sebagai gubernur dengan tugas utama menjaga ketertiban dan mencegah pemberontakan. Terakhir, Mehmed mengambil alih langsung kendali atas pasukan Janissary, yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Çandarlı Halil. Ia memanfaatkan pemberontakan kecil sebagai alasan untuk mengganti pimpinan mereka dengan personel devşirme yang loyal. Perubahan-perubahan ini memastikan bahwa Janissary kembali kepada fungsi asalnya sebagai pasukan elit yang sepenuhnya setia kepada Sultan, serta menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pemerintahannya.

Strategi Sultan Mehmed II dalam mempersiapkan penaklukan Konstantinopel sekaligus mengukuhkan kekuasaannya secara internal. Langkah-langkah yang ia ambil bukan hanya bersifat militer, tetapi juga politis dan simbolis. Mehmed menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang visioner dengan mengaitkan ambisinya pada legitimasi keagamaan dan simbolisme Islam, seperti nubuat dan hadis tentang penaklukan Konstantinopel. Ia juga memperlihatkan kecerdikan dalam mengatasi lawan-lawan politiknya dengan



pendekatan strategis, seperti aliansi pernikahan, penunjukan loyalis di posisi penting, serta pengendalian penuh atas pasukan elit. Ini memperkuat narasi bahwa keberhasilan Mehmed bukan sekadar karena kekuatan senjata, tetapi juga karena kemampuannya menciptakan stabilitas politik dan sosial menjelang sebuah operasi militer besar.

## 2. Reformasi birokrasi awal dan sistem administrasi sebelum penaklukan Konstantinopel.

Setelah naik takhta, Sultan Muhammad Al-Fatih langsung mengambil langkah-langkah penting untuk memperkuat Kesultanan Utsmani di berbagai bidang, mulai dari administrasi, militer, hingga ekspansi wilayah. Dalam bidang pemerintahan, ia menerapkan kebijakan yang bijak dalam mengelola keuangan negara. Ia berusaha mencari sumber pendapatan baru, mengontrol pengeluaran, dan melarang segala bentuk pemborosan agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Di sektor militer, Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan perhatian besar terhadap pasukannya. Ia menaikkan gaji para prajurit serta melengkapi mereka dengan senjata modern pada masanya. Hal ini dilakukan agar pasukan Utsmani tetap kuat dan siap menghadapi berbagai ancaman. Dalam hal tata kelola pemerintahan, ia melakukan pembaruan dengan mengganti pejabat yang kurang kompeten dan mempertahankan mereka yang dinilai mampu menjalankan tugas dengan baik. Ia juga memastikan bahwa para pembesarnya memiliki pemahaman yang kuat dalam bidang administrasi dan militer, sehingga roda pemerintahan bisa berjalan lebih efektif.

Setelah berhasil memperkuat kestabilan dalam negerinya, Sultan Muhammad Al-Fatih mulai mengarahkan perhatiannya ke wilayah Eropa. Ia



bercita-cita memperluas wilayah Utsmani sekaligus menyebarkan Islam. Saat itu, Kekaisaran Bizantium sedang mengalami kemunduran akibat berbagai konflik dengan negara-negara Eropa lainnya. Melihat kondisi ini sebagai peluang besar, ia mulai menyusun strategi untuk mewujudkan impiannya menaklukkan Konstantinopel. Keseluruhan kebijakan yang diambil oleh Sultan Muhammad Al-Fatih menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang visioner dan strategis. Ia tidak hanya fokus pada stabilitas dalam negeri, tetapi juga memiliki rencana matang untuk memperluas kekuasaannya dan membawa Kesultanan Utsmani menuju kejayaan.<sup>56</sup>

Kebijakan yang diambil Sultan Muhammad Al-Fatih mencerminkan kepemimpinan yang terencana dan menyeluruh. Dengan memperkuat administrasi melalui pengelolaan keuangan yang cermat dan reformasi tata kelola, ia membangun dasar yang kuat untuk stabilitas dalam negeri. Modernisasi militer, termasuk peningkatan kesejahteraan prajurit dan penyediaan peralatan canggih, menunjukkan pemahamannya akan pentingnya kekuatan bersenjata sebagai pilar ekspansi. Fokusnya pada penaklukan Konstantinopel memanfaatkan kelemahan Bizantium dengan cerdas, menggabungkan misi keagamaan dengan ambisi politik. Perpaduan antara strategi administratif, militer, dan ideologis ini tidak hanya mengukuhkan posisi Kesultanan Utsmani sebagai kekuatan dunia, tetapi juga menegaskan peran Muhammad Al-Fatih sebagai pemimpin yang mampu mengintegrasikan berbagai dimensi kepemimpinan untuk mencapai kejayaan.

---

<sup>56</sup> Hasanuddin Yusof, *Sultan Muhammad Al-Fatih Penakluk Agung*, Seremban: Alami SDN BHD, Cet.1, (2020). h.97.

### C. Tekanan Eksternal dari Eropa dan Balkan

#### 1. Reaksi negara-negara Kristen Eropa terhadap kebangkitan Utsmani.

Setelah naik takhta pada tahun 1451, Sultan Muhammad Al-Fatih langsung mengambil berbagai langkah strategis untuk memperkuat Kesultanan Utsmaniyah. Salah satu prioritas utamanya adalah menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga melalui perjanjian perdamaian. Misalnya, ia memperbarui kesepakatan damai dengan Serbia dan menjalin perjanjian serupa dengan berbagai pihak lain, termasuk Venesia, Hungaria, dan sejumlah kerajaan Eropa lainnya. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang lebih stabil agar ia bisa fokus pada urusan internal kesultanan.

Namun, di tengah upayanya membangun hubungan diplomatik, Sultan Muhammad Al-Fatih harus menghadapi manuver politik dari Kekaisaran Bizantium. Kaisar Konstantin IX mencoba memanfaatkan saudaranya, Orhan, yang saat itu berada di Konstantinopel, sebagai alat tawar-menawar. Kaisar mengancam akan menjadikan Orhan sebagai calon sultan tandingan jika Kesultanan Utsmaniyah tidak memberikan dana untuk kebutuhan hidupnya. Awalnya, Sultan Muhammad Al-Fatih setuju untuk membayar biaya tersebut, tetapi ketika permintaan dana tambahan diajukan, ia melihat ini sebagai ancaman serius terhadap kestabilan pemerintahannya.

Menanggapi tekanan dari Kaisar Konstantin IX, Sultan Muhammad Al-Fatih akhirnya memutuskan untuk membatalkan perjanjian damai dengan Bizantium dan mulai menyusun rencana penaklukan Konstantinopel. Keputusan ini bukan hanya sekadar reaksi terhadap ancaman Kaisar, tetapi juga bagian dari ambisi besar yang sudah ia pikirkan sejak awal kepemimpinannya. Selain

membangun strategi politik dan militer, Sultan Muhammad Al-Fatih juga melakukan reformasi internal dalam pemerintahannya. Ia mengganti beberapa pejabat lama dengan pemimpin baru yang lebih kompeten, serta meningkatkan kesejahteraan pasukan, terutama pasukan elit Yanisari, dengan menaikkan gaji mereka.<sup>57</sup>

Meskipun awalnya telah dibuat kesepakatan antara berbagai pihak, perjanjian itu langsung runtuh ketika serangan terhadap Konstantinopel benar-benar dimulai. Hal ini terjadi karena pasukan dari banyak kota, beserta wilayah sekitarnya, datang untuk membela kota tersebut, semata-mata karena mereka berbagi keyakinan Kristen dan akhirnya melupakan janji-janji yang pernah dibuat dengan kaum Muslim. Di waktu yang bersamaan, ketika sang Sultan tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk penaklukan, Kaisar Byzantium berusaha sekuat tenaga menghentikan langkah sang Sultan. Ia mengirim sejumlah uang dan hadiah, bahkan sempat menyuap beberapa penasihat Sultan, dengan harapan dapat mempengaruhi keputusannya.

Namun, tekad sang Sultan sudah bulat untuk menjalankan rencananya. Semua upaya tersebut tidak mampu menggoyahkan niatnya. Menyadari keteguhan hati Sultan, Kaisar pun segera mencari dukungan dari berbagai negara dan kota di Eropa, bahkan mendekati Paus meskipun gereja di Konstantinopel sendiri pada waktu itu menganut aliran Ortodoks, yang kian memperkeruh hubungan antara Katolik dan Ortodoks. Akhirnya, sang Kaisar terpaksa harus mendekati Paus dan menunjukkan kesiapannya untuk bekerja sama, dengan harapan dapat menyatukan Gereja Ortodoks Timur agar mengakui otoritas Paus. Padahal, kaum Ortodoks

---

<sup>57</sup> Muhammad Hafiidh Ar Rasyiid, *Muhammad Al-Fatih, Kisah Sang Pemimpin dari Kesultanan Ustmaniyah*, Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia, Cet. Pertama, (2024). h.36-43.

sendiri tidak pernah benar-benar setuju untuk melakukannya.

Berdasarkan hal tersebut, Paus mengutus seorang utusan ke Konstantinopel. Utusan itu menyampaikan pidato di Aya Sophia dengan menyerukan agar kedua cabang gereja bersatu. Namun, ajakan tersebut memicu kemarahan di kalangan pengikut Ortodoks di kota itu, sehingga mereka melancarkan perlawanan terhadap upaya penyatuan yang diusung oleh imperium Katolik Bersatu. Bahkan, seorang pemimpin Kristen Ortodoks pernah berkata, *"Aku lebih memilih melihat kekacauan yang ditimbulkan bangsa Turki berkeliaran di Byzantium daripada harus menyaksikan simbol bangsa Latin!"*<sup>58</sup>

Penolakan terhadap upaya penyatuan dua cabang gereja yang dilakukan oleh Paus di Konstantinopel menunjukkan bahwa konflik keagamaan antara Gereja Katolik Barat dan Gereja Ortodoks Timur tidak hanya dipicu oleh perbedaan teologis semata, tetapi juga oleh dinamika politik dan sejarah panjang ketegangan. Dalam konteks inilah, John Anthony memberikan penjelasan historis yang lebih mendalam mengenai kemunduran posisi politik Kekaisaran Bizantium dan keretakan hubungan antar gereja yang semakin melebar sejak Konsili tahun 787. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Anthony:

After the Council of 787, the political position of the Byzantine Empire began to experience a marked decline. This deterioration was driven primarily by the rise of Islamic power, as seen in the attacks by the Seljuk and Ottoman Turks. Increasingly, territories that had previously been part of Christendom were seized by Muslim rulers, making it more difficult for the Byzantine emperors to convene synods and implement ecclesiastical policies according to Christian law in the eastern regions.

This difficult situation was further exacerbated by the effects of the Crusades. From the end of the 11th century, Western armies that had set out in response to papal calls to reclaim the Holy Land in Palestine though initially seen

---

<sup>58</sup> Syaikh Ramzi Al-Munyawi, *Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinopel*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, (2012). h.128-129.

as allies by some emperors in Constantinople ultimately brought chaos. Fundamental differences in liturgical practices and religious traditions between the Latin and Greek Churches further widened an already growing divide.

Shortly before the outbreak of the First Crusade, a serious conflict arose between the Papacy and the Patriarchate of Constantinople. With the support of the emperor, Pope Leo IX sent envoys among them Cardinal Humbertus to reconcile the differences between the Latin and Greek Churches. The disputes involved issues such as the Filioque clause, the limits of papal authority beyond the West, and various liturgical and spiritual divergences. The conflict between Humbertus and Patriarch Michael Caerularios reached its peak in July 1054, when the cardinal excommunicated the patriarch at the altar of Hagia Sophia. In response, the Holy Synod of Constantinople excommunicated the papal envoys. Although these actions were not formally ratified, the event is often seen as the turning point that marked the formal schism between the Orthodox and Catholic Churches.

Over time, the Papacy increasingly viewed the Greek Churches as schismatic for rejecting papal authority, while the Orthodox faithful regarded the Western Church as having deviated from the original teachings through innovations such as the addition of the Filioque clause to the Creed and the use of unleavened bread in the Eucharist. Spiritually, both sides drifted further apart. In 1190, Theodore Balsamon a prominent canonist and Patriarch of Antioch declared that the Western Church had severed its spiritual communion with the other four patriarchates and no longer represented the Orthodox faithful. He asserted that Latin Christians should not be permitted to receive Communion unless they were willing to renounce the doctrines and practices that separated them from Orthodox tradition and submit to the canons of the Church united with Orthodoxy.

Although there was once hope that these divisions might be reconciled through mutual agreement, in reality, the gap only widened. The fear of the Byzantines concerning the Crusades became painfully clear in 1204, when the Fourth Crusade originally aimed at Jerusalem diverted its course and ended in the sack of Constantinople, including the deposition of the reigning emperor. The actions of the invaders, who desecrated churches and plundered sacred relics, revealed that the Latin Christians, in addition to warring with Islam, also demonstrated a lack of regard for their fellow Eastern Christians. Although the Pope condemned this conduct, the event left a deep wound and the impression that Latin Christianity had undergone a fundamental change adopting an attitude perceived as alien and hostile by the Eastern Churches.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> John Anthony McGuckin, *The Orthodox Church, An Introduction to its History, Doctrine, and Spiritual Culture*, Chichester: Blackwell Publishing Ltd, (2008). h.20-22



Terjemahan:

Setelah Konsili tahun 787, posisi politik Kekaisaran Bizantium mulai mengalami kemunduran yang nyata. Kemerosotan ini terutama disebabkan oleh bangkitnya kekuatan Islam, sebagaimana terlihat dari serangan yang dilakukan oleh bangsa Turki Seljuk dan Turki Utsmani. Wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari dunia Kristen secara bertahap jatuh ke tangan para penguasa Muslim, sehingga menyulitkan kaisar-kaisar Bizantium untuk menyelenggarakan sinode-sinode dan menerapkan kebijakan gerejawi berdasarkan hukum Kristen di wilayah timur.

Situasi sulit ini semakin diperparah oleh dampak Perang Salib. Sejak akhir abad ke-11, pasukan Barat yang berangkat menanggapi seruan Paus untuk merebut kembali Tanah Suci di Palestina yang awalnya dianggap sebagai sekutu oleh sebagian kaisar di Konstantinopel pada akhirnya justru membawa kekacauan. Perbedaan mendasar dalam praktik liturgi dan tradisi keagamaan antara Gereja Latin dan Yunani semakin memperlebar jurang perpecahan yang sudah mulai tumbuh.

Menjelang pecahnya Perang Salib Pertama, terjadi konflik serius antara Kepausan dan Patriarkat Konstantinopel. Dengan dukungan kaisar, Paus Leo IX mengirim beberapa utusan termasuk Kardinal Humbertus untuk mendamaikan perbedaan antara Gereja Latin dan Yunani. Perselisihan itu mencakup isu-isu seperti klausa *Filioque*, batas-batas otoritas kepausan di luar Barat, serta perbedaan liturgi dan spiritual. Konflik antara Humbertus dan Patriark Michael Caerularios mencapai puncaknya pada Juli 1054, ketika kardinal tersebut melakukan ekskomunikasi terhadap patriark di altar Hagia Sophia. Sebagai balasan, Sinode Suci Konstantinopel mengekskomunikasi para utusan kepausan. Meskipun tindakan ini tidak secara resmi disahkan, peristiwa tersebut sering dianggap sebagai titik balik yang menandai perpecahan resmi antara Gereja Ortodoks dan Katolik.

Seiring waktu, Kepausan semakin memandang Gereja-Gereja Yunani sebagai kelompok sesat karena menolak otoritas Paus, sementara umat Ortodoks menganggap Gereja Barat telah menyimpang dari ajaran asli melalui inovasi seperti penambahan *Filioque* dalam Syahadat dan penggunaan roti tak beragi dalam Ekaristi. Secara spiritual, kedua belah pihak pun makin menjauh. Pada tahun 1190, Theodore Balsamon seorang ahli kanon terkemuka dan Patriark Antiokhia menyatakan bahwa Gereja Barat telah memutuskan persekutuan spiritual dengan empat patriarkat lainnya dan tidak lagi mewakili umat Ortodoks. Ia menegaskan bahwa umat Kristen Latin tidak boleh menerima Komuni kecuali mereka bersedia meninggalkan doktrin dan praktik yang memisahkan mereka dari tradisi Ortodoks dan tunduk pada hukum kanon Gereja yang bersatu dengan Ortodoksi.

Meskipun sempat ada harapan bahwa perpecahan ini bisa diselesaikan melalui kesepakatan bersama, kenyataannya jurang tersebut semakin melebar. Ketakutan Bizantium terhadap Perang Salib terbukti sangat beralasan pada tahun 1204, ketika Perang Salib Keempat yang awalnya ditujukan ke Yerusalem malah berbelok arah dan berakhir dengan penjarahan Konstantinopel, termasuk penggulingan kaisar yang sedang berkuasa. Tindakan para penyerbu yang menodai gereja-gereja dan menjarah relikui suci menunjukkan bahwa umat Kristen Latin, selain memerangi Islam, juga tidak menunjukkan rasa hormat terhadap sesama



Kristen Timur. Meskipun Paus mengecam tindakan tersebut, peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dan kesan bahwa Kekristenan Latin telah mengalami perubahan fundamental mengadopsi sikap yang dianggap asing dan bermusuhan oleh Gereja-Gereja Timur.

Secara kronologis dan kritis bagaimana hubungan antara Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur semakin memburuk sejak abad ke-8 hingga abad ke-13. John Anthony menyoroti bahwa konflik tersebut tidak hanya didasari oleh perbedaan teologis seperti doktrin *Filioque* dan praktik liturgi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik, invasi militer, dan intervensi eksternal seperti Perang Salib. Ekskomunikasi timbal balik tahun 1054 menjadi momen simbolis yang mengabadikan perpecahan, sementara peristiwa tragis pada Perang Salib Keempat tahun 1204 mengukuhkan kebencian yang mendalam antara dua cabang besar Kekristenan ini.

Penekanan pada bagaimana umat Kristen Latin menodai sesama Kristen Timur saat Perang Salib menunjukkan bahwa konflik internal dalam kekristenan bisa seintens konflik dengan pihak luar seperti dunia Islam. Ini juga memperjelas bahwa keinginan menyatukan gereja sering kali berujung pada dominasi sepihak alih-alih rekonsiliasi sejati. Teks ini menekankan pentingnya memahami konteks sejarah yang kompleks dan tidak hanya memandang perpecahan gereja sebagai akibat perbedaan doktrin semata, melainkan sebagai hasil dari akumulasi ketegangan politik, budaya, dan militer yang panjang.

2. Peran Perjanjian Szeged (1444) dan pembatalannya dalam memicu ketegangan politik.

Di tengah situasi geopolitik yang penuh gejolak pada abad ke-15, salah

satu peristiwa penting yang memperuncing konflik antara kekuatan Kristen Eropa dan Kesultanan Utsmani adalah Perjanjian Szeged tahun 1444. Meskipun perjanjian tersebut sempat menciptakan harapan akan perdamaian, keputusan sepihak untuk membatalkannya justru menjadi pemicu ketegangan politik dan militer yang lebih besar. Dalam konteks inilah, David Nicolle menjelaskan dinamika internal dan eksternal yang memperburuk krisis Utsmani pada masa Sultan Murad II dan awal pemerintahan Mehmed II. Menurut David Nicolle:

In the 15th century, the Ottoman Empire experienced a period of intense turmoil, where leadership transitions, external invasions, and local rebellions interacted to challenge their authority in the Balkans. After the death of Sultan Bayezid I, his son Murad II succeeded in recapturing the regions of Serbia, Bosnia, and Wallachia that had temporarily been lost. However, internal conflict arose when the elite Ottoman troops (Janissaries) pressured the aging Murad II to appoint his youngest son, Mehmet, as his successor, even though he was not the eldest son. This situation triggered tension with the old Turkish aristocracy, particularly the influential Çandarlı family led by Halil Pasha. Instability deepened when Murad II decided to abdicate in 1444 but was forced to return to power following a European Crusader invasion. This demonstrated that Ottoman leadership at the time still heavily relied on experienced figures rather than a stable governmental system.

A major assault from Western and Central Europe, known as the Crusade, was led by King Wladislaw of Hungary-Poland and the legendary Transylvanian commander Janos Hunyadi. Initially, the Christian forces managed to capture strategic cities such as Niš and Sofia, but the extreme weather in the Balkans and the Ottomans' resilient military tactics shifted the tide of war. The crushing defeats of the Crusaders at the Battle of Varna (1444) and the Second Battle of Kosovo (1448) confirmed the superiority of Ottoman strategy. On the other hand, fierce resistance from George Castriota (Skanderbeg) in Albania demonstrated the difficulty of subduing mountainous regions. Although Albania eventually accepted limited autonomy, Skanderbeg's resistance remains remembered as a symbol of courage.

To face the crisis, the Ottomans adopted several tactics. Murad II sought assistance from Genoa to transport troops from Anatolia to Europe a clever move given the weakness of the Ottoman navy at that time. Meanwhile, Serbia under George Brankovic chose neutrality and even warned the Ottomans about the Crusader attacks. Brankovic's pragmatic stance helped the Ottomans focus on their main adversaries.

The long-term impact of this period became evident: the Ottoman victory in the Balkans solidified their position as a dominant power and paved the way for Mehmet II's conquest of Constantinople in 1453. Though initially resisted, the Albanian population gradually embraced Islam and became a vital component of the Ottoman military force. Nevertheless, the stories of resistance led by

Skanderbeg and Hunyadi continue to live on in Balkan folklore as symbols of defiance against occupation. Domestically, the rivalry between the Janissary elite and traditional Turkish nobility eventually led to a more centralized government under Mehmet II.<sup>60</sup>

Terjemahan:

Pada abad ke-15, Kesultanan Utsmani mengalami masa pergolakan yang intens, di mana pergantian kepemimpinan, invasi dari luar, dan pemberontakan lokal saling berinteraksi dan mengancam otoritas mereka di wilayah Balkan. Setelah kematian Sultan Bayezid I, putranya, Murad II, berhasil merebut kembali wilayah-wilayah seperti Serbia, Bosnia, dan Wallachia yang sempat hilang. Namun, konflik internal muncul ketika pasukan elit Utsmani (Janissari) mendesak Murad II yang mulai menua untuk mengangkat putra bungsunya, Mehmed, sebagai penerus takhta, meskipun ia bukan anak tertua. Situasi ini menimbulkan ketegangan dengan kaum aristokrat Turki lama, khususnya keluarga Çandarlı yang berpengaruh dan dipimpin oleh Halil Pasha.

Ketidakstabilan semakin dalam ketika Murad II memutuskan turun takhta pada tahun 1444, namun terpaksa kembali memegang kekuasaan setelah invasi tentara Salib Eropa. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Utsmani saat itu masih sangat bergantung pada sosok pemimpin berpengalaman, bukan pada sistem pemerintahan yang stabil.

Salah satu serangan besar dari Eropa Barat dan Tengah, yang dikenal sebagai Perang Salib, dipimpin oleh Raja Wladislaw dari Hongaria-Polandia bersama komandan legendaris dari Transilvania, Janos Hunyadi. Pada awalnya, pasukan Kristen berhasil merebut kota-kota strategis seperti Niš dan Sofia. Namun, cuaca ekstrem di Balkan serta taktik militer Utsmani yang tangguh mengubah arah peperangan. Kekalahan telak pasukan Salib dalam Pertempuran Varna (1444) dan Pertempuran Kosovo Kedua (1448) menegaskan keunggulan strategi militer Utsmani.

Di sisi lain, perlawanan sengit dari George Castriota (Skanderbeg) di Albania menunjukkan betapa sulitnya menaklukkan wilayah pegunungan. Meskipun Albania akhirnya menerima otonomi terbatas, perlawanan Skanderbeg tetap dikenang sebagai simbol keberanian. Untuk menghadapi krisis ini, Utsmani menerapkan berbagai taktik. Murad II meminta bantuan dari Genoa untuk mengangkut pasukan dari Anatolia ke Eropa langkah cerdas mengingat lemahnya angkatan laut Utsmani saat itu. Sementara itu, Serbia di bawah pimpinan George Brankovic memilih sikap netral dan bahkan memperingatkan Utsmani tentang serangan pasukan Salib. Sikap pragmatis Brankovic ini membantu Utsmani fokus menghadapi musuh utama mereka.

Dampak jangka panjang dari periode ini pun menjadi jelas: kemenangan Utsmani di Balkan mengukuhkan posisi mereka sebagai kekuatan dominan dan membuka jalan bagi penaklukan Konstantinopel oleh Mehmed II pada tahun 1453. Meskipun sempat ditentang, populasi Albania secara bertahap memeluk Islam dan menjadi komponen penting dalam kekuatan militer Utsmani. Namun demikian, kisah perlawanan yang dipimpin oleh Skanderbeg dan Hunyadi terus hidup dalam cerita rakyat Balkan sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Di dalam

---

<sup>60</sup> David Nicolle, *Cross And Crescent in the Balkans, The Ottoman Conquest of South-Eastern Europe (14<sup>th</sup>-15<sup>th</sup> Centuries)*, Barnsley: Pen & Sword Military, (2010).

negeri, persaingan antara elite Janissari dan bangsawan Turki tradisional akhirnya mendorong terbentuknya pemerintahan yang lebih terpusat di bawah kepemimpinan Mehmed II.

Gambaran menyeluruh mengenai krisis politik dan militer yang dihadapi Kesultanan Utsmani menjelang pertengahan abad ke-15. David Nicolle menunjukkan bahwa ketegangan internal terutama antara elite Janissari dan aristokrat tradisional Turki berjalan beriringan dengan tekanan eksternal berupa invasi pasukan Salib. Keputusan Murad II untuk turun takhta dan kemudian kembali karena ancaman dari Eropa menunjukkan betapa kepemimpinan saat itu masih bergantung pada figur personal, bukan pada kelembagaan negara.

Pembatalan Perjanjian Szeged (1444), yang semula memberi harapan akan perdamaian, justru memicu Perang Salib Varna. Kekalahan Kristen dalam perang tersebut menjadi titik balik yang menegaskan superioritas militer Utsmani di Balkan. Taktik cerdas seperti menjalin aliansi dengan Genoa dan meredam potensi ancaman dari Serbia juga mencerminkan kelincahan diplomasi Utsmani dalam mempertahankan stabilitas regional.

Penting pula dicatat bahwa kisah tokoh-tokoh seperti Skanderbeg dan Hunyadi tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Balkan sebagai ikon perjuangan, meski secara militer mereka kalah. Di sisi lain, hasil dari masa krisis ini justru mengarah pada penguatan struktur pemerintahan Utsmani yang lebih terpusat di bawah Sultan Mehmed II, yang kelak menaklukkan Konstantinopel dan membuka babak baru kejayaan Utsmani.

Secara keseluruhan, narasi Nicolle ini memperlihatkan bahwa konflik, pengkhianatan perjanjian, dan kepentingan geopolitik menjadi elemen kunci dalam transisi besar-besaran kekuasaan dan pembentukan identitas politik baru di

wilayah Balkan dan Anatolia.

#### D. Hubungan antar-etnis dan agama dalam masyarakat Utsmani.

Konflik antara Kesultanan Utsmani dan Bizantium di masa Sultan Mehmet II memperlihatkan betapa rumitnya hubungan antar kelompok etnis dan agama dalam masyarakat Utsmani, terutama saat perang dan ambisi perluasan wilayah mengemuka. Misalnya, saat Mehmet mengusir orang Yunani dari daerah Struma dan merampas harta mereka, ini menunjukkan bahwa kebijakan toleransi yang biasa dijalankan lewat sistem pengelolaan minoritas *millet* bisa runtuh begitu kepentingan politik atau militer mendesak. Sistem *millet* adalah metode yang digunakan oleh Kesultanan Utsmani untuk mengelola berbagai komunitas agama di wilayahnya. Istilah *millet* berasal dari kata Arab *Millah*, yang berarti bangsa atau komunitas agama. Dalam konteks Utsmani, *millet* merujuk pada kelompok-kelompok agama yang diakui secara resmi, seperti Kristen Ortodoks, Yahudi, Kristen Armenia, dan Katolik Roma. Setiap *millet* dipimpin oleh seorang pemimpin agama yang bertindak sebagai wakil resmi di hadapan sultan. Pemimpin ini bertanggung jawab untuk mengatur urusan internal komunitas, termasuk masalah perpajakan dan administrasi sipil. Dengan sistem ini, komunitas agama yang berbeda dapat memiliki otonomi dalam mengelola urusan mereka sendiri, sambil tetap berada di bawah pengawasan Kesultanan Utsmani.<sup>61</sup>

Di pihak Bizantium, respons mereka dengan menahan orang Turki di Konstantinopel walau akhirnya dilepaskan menjadi bukti bahwa kelompok minoritas sering jadi korban ketika penguasa saling berseteru. Situasi ini membuat

---

<sup>61</sup> Chamdan Ma'shum. "Implementasi Penerapan Kebijakan Millet Pasca Penaklukan 1453." *Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam 1* (2024).



hubungan antar komunitas jadi tegang, karena kepercayaan mudah hancur saat kekuasaan jadi taruhan. Di kalangan militer Utsmani, ketegangan juga terlihat. Pasukan Janisari, yang direkrut dari keluarga Kristen lewat sistem paksa *devşirme*, pernah memberontak minta kenaikan gaji.

Secara harfiah, *Devşirme* berarti mengumpulkan dan sistem ini dirancang untuk merekrut remaja non-Muslim dari berbagai daerah di bawah kekuasaan Utsmani. Sistem ini unik karena tidak pernah diterapkan oleh pemerintahan Islam lainnya sebelum Utsmani. Penerapan pertama kali terjadi pada masa Sultan Muhammad Çelebi, tetapi baru disahkan secara resmi oleh anaknya, Sultan Murat II. *Devşirme* dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasukan, biasanya setiap tiga hingga tujuh tahun sekali. Prosesnya dimulai dengan permohonan dari Komandan Yeniçeri kepada Dewan Kerajaan, yang dikenal sebagai *Dîvân-ı Hümayun*. Setelah Sultan memberikan persetujuan, Dewan Kerajaan akan mengirimkan pejabat pelaksana ke wilayah yang dituju untuk melaksanakan perekrutan. Dengan cara ini, sistem *Devşirme* menjadi metode penting dalam membangun pasukan yang loyal dan terlatih, serta memperkuat struktur pemerintahan Kesultanan Utsmani.<sup>62</sup>

Pemberontakan itu menyingkap masalah dalam kebijakan asimilasi Utsmani. Mehmet merespons dengan setengah hati, ia menuruti sebagian tuntutan, tapi juga menurunkan pangkat pemimpin mereka. Ia bahkan menyelipkan orang kepercayaannya ke dalam pasukan Janisari untuk memastikan loyalitas. Ini memperlihatkan bahwa integrasi kelompok berbeda agama di tubuh militer Utsmani tidaklah mulus semuanya diatur lewat kombinasi imbalan dan ancaman.

Agama juga jadi senjata politik Mehmet memanfaatkan kesalahan

---

<sup>62</sup> Taufiq Kurniawan, "Mengenal Sistem Devşirme Pada Kesultanan Utsmani", *Balé Institute* XXVII, (2020).



diplomati Bizantium seperti ancaman akan mengungkap adanya pesaing takhta Utsmani di istana mereka untuk membenarkan pelanggaran janji perdamaian. Cara ini mengubah konflik politik jadi perang agama, yang lebih mudah mendapat dukungan rakyat. Pembangunan Benteng Rumeli Hisar di Bosphorus, tanpa izin Bizantium, adalah contoh nyata. Letaknya yang berhadapan dengan benteng Utsmani di sisi Asia (Anadolu Hisar) bukan cuma strategis secara militer, tapi juga simbol kemenangan Islam atas wilayah yang dikuasai Kristen.

Upaya Sultan Mehmed II dalam mengubah konflik politik menjadi perang agama tidak hanya terbatas pada narasi keagamaan, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan konkret yang menantang kedaulatan Bizantium. Pendekatan ini menciptakan ketegangan baru yang tak hanya berdampak di level diplomatik, tetapi juga meresahkan masyarakat sipil. Dalam konteks ini, Runciman menjelaskan bagaimana kegagalan diplomasi Bizantium justru mempercepat konfrontasi terbuka dan memperlihatkan sisi kelam dari kebijakan ekspansionis Utsmani. Menurut Runciman:

The Byzantine effort to ease tensions ultimately ended in disaster. When Emperor Constantine sent envoys bearing gifts, Mehmet ignored them. In fact, the final Byzantine envoy was executed in 1451, which effectively amounted to a declaration of war. At the grassroots level, Ottoman policies such as the forced labor of thousands of workers from various regions to construct fortifications revealed the darker side of multi-ethnic coexistence; harmony existed only insofar as it did not interfere with the ruler's ambitions. Ordinary citizens, especially minorities, often became victims. For instance, panic in Constantinople led to the arrest of Turks, although they were later released.<sup>63</sup>

Terjemahan:

Upaya Bizantium untuk meredakan ketegangan pada akhirnya berujung pada bencana. Ketika Kaisar Konstantinus mengirim utusan-utusan yang membawa hadiah, Mehmed mengabaikannya. Bahkan, utusan terakhir dari Bizantium dieksekusi pada tahun 1451, yang pada dasarnya merupakan deklarasi perang secara tidak langsung.

---

<sup>63</sup> Steven Runciman, *The Fall Of Constantinople 1453*, London: The Syndics of The Cambridge University Press, (1965). h.. 64-66.

Di tingkat akar rumput, kebijakan Utsmani seperti kerja paksa terhadap ribuan buruh dari berbagai wilayah untuk membangun benteng pertahanan mengungkap sisi gelap dari koeksistensi multi-etnis; harmoni hanya ada selama tidak mengganggu ambisi penguasa. Warga biasa, terutama kelompok minoritas, sering menjadi korban. Misalnya, kepanikan di Konstantinopel menyebabkan penangkapan terhadap warga Turki, meskipun akhirnya mereka dibebaskan.

Aspek diplomatik dan sosial dari meningkatnya konflik antara Bizantium dan Utsmani menjelang penaklukan Konstantinopel. Runciman secara kritis menunjukkan bahwa upaya damai Kaisar Konstantinus melalui pengiriman utusan dan hadiah bukan hanya gagal, tetapi malah dibalas dengan kekerasan oleh Mehmed II, yang memperlihatkan penolakan total terhadap jalur diplomasi. Eksekusi terhadap utusan terakhir bukan hanya tindakan simbolik, tetapi juga langkah strategis untuk mempertegas bahwa perang tidak lagi bisa dihindari.

Lebih jauh, Runciman menyingkap sisi gelap dari kebijakan ekspansionis Utsmani: kerja paksa dan manipulasi hubungan antar-etnis. Meskipun kesultanan Utsmani sering dipuji atas toleransinya terhadap berbagai etnis dan agama, kenyataannya harmoni tersebut sangat kondisional tergantung pada kepatuhan terhadap ambisi politik sang penguasa. Minoritas yang tidak dianggap mengancam bisa hidup damai, tetapi saat terjadi krisis atau konflik, mereka cepat dijadikan sasaran kecurigaan dan penindasan, seperti yang terjadi di Konstantinopel menjelang perang.

Dengan demikian, tidak hanya memperlihatkan kegagalan diplomasi dan kerasnya kebijakan militer Mehmed, tetapi juga memperingatkan tentang rapuhnya harmoni sosial dalam sistem kekuasaan yang otoriter dan ekspansionis. Pandangan ini memberi nuansa penting dalam memahami dinamika internal Utsmani dan kerentanan sosial yang menyertai perebutan kekuasaan antar peradaban besar.

Situasi politik pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih (1451–1481 M) ditandai oleh dinamika yang kompleks, baik dari dalam negeri maupun tekanan eksternal dari kekuatan asing, khususnya dari koalisi Kristen Eropa. Ketegangan dan konflik internal yang muncul di lingkungan istana, seperti pemberontakan Janissary dan penolakan beberapa elit terhadap reformasi Al-Fatih, menggambarkan bentuk *intragroup conflict* sebagaimana dijelaskan dalam teori konflik. Di sisi lain, perlawanan dari negara-negara Eropa terhadap ekspansi Utsmani, terutama dalam penaklukan Konstantinopel, mencerminkan *interorganizational conflict* atau konflik antarorganisasi. Kedua bentuk konflik ini, yang saling berkaitan, mencerminkan bahwa ketegangan bukan hanya soal militer, tetapi juga mencakup aspek ideologis, ekonomi, dan politik.

Merujuk pada teori konflik Thomas & Killman dan sosiolog lainnya, konflik muncul sebagai konsekuensi dari perebutan sumber daya, kekuasaan, dan status dalam masyarakat yang majemuk. Situasi Utsmani di bawah Al-Fatih menggambarkan konteks konflik multidimensional: konflik politik dalam menjaga stabilitas kekuasaan, konflik agama dalam menghadapi Eropa Kristen, serta potensi konflik ekonomi terkait jalur dagang strategis di Mediterania

### **BAB III**

## **KONTRIBUSI MUHAMMAD AL-FATIH TERHADAP STABILITAS POLITIK TURKI USMANI (1451-1481)**

Landasan utama dalam menjaga kestabilan demokrasi adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika rakyat menganggap bahwa pemerintah memiliki kewenangan yang sah untuk memimpin dan membuat keputusan, maka akan muncul dukungan serta penerimaan yang luas, bahkan terhadap kebijakan yang mungkin tidak sepenuhnya disukai. Kepercayaan ini juga membuat masyarakat lebih terdorong untuk terlibat dalam aktivitas politik, seperti ikut serta dalam pemilu, mengawasi jalannya pemerintahan, atau menyampaikan aspirasi melalui jalur yang sesuai. Partisipasi seperti ini membantu menciptakan suasana politik yang lebih tenang dan mencegah munculnya konflik yang berlarut-larut. Selain memperkuat posisi pemerintah, legitimasi yang kokoh juga membangun hubungan timbal balik yang positif antara negara dan warganya, sehingga upaya menghadapi persoalan bangsa pun bisa dilakukan secara bersama-sama dan lebih efektif. Maka dari itu, menjaga dan membangun legitimasi politik bukan hanya penting, tapi juga harus menjadi prioritas utama dalam mempertahankan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.<sup>64</sup>

Legitimasi dapat dipahami sebagai kualitas hukum yang muncul dari adanya penerimaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil, termasuk dalam konteks peradilan. Artinya, legitimasi mencerminkan sejauh mana masyarakat bersedia menerima dan mengakui kewenangan serta kebijakan yang dijalankan oleh seorang

---

<sup>64</sup> Salsa Agustin, Rizki Maharani, and Rizki Ramadhani. "Dinamika ketegangan politik pasca pemilu 2024 dalam mempertahankan stabilitas demokrasi di Indonesia." *Governance* 12.2 (2024)

pemimpin. Pengakuan ini umumnya diberikan sebelum seorang pemimpin menjalankan kekuasaannya, karena tidak mungkin seseorang bisa memerintah tanpa memiliki dasar kewenangan yang sah. Dalam praktiknya, upaya membangun legitimasi perlu ditempuh melalui pendekatan demokratis dan adil, namun hal ini juga harus didasari oleh prinsip kebermanfaatan atau utilitarianisme. Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan, baik oleh individu maupun kelompok, seharusnya dilandasi oleh pertimbangan manfaat yang akan dirasakan setelahnya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pihak yang mengemban amanah negara, harus senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat. Sebab, legitimasi pada dasarnya berasal dari rakyat, sehingga seluruh aktivitas pemerintahan baik kebijakan, pelayanan publik, maupun pengelolaan negara harus bertujuan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.<sup>65</sup>

Partisipasi politik mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Karena itu, partisipasi ini sangat berkaitan erat dengan sistem demokrasi dan keberadaan legitimasi suatu pemerintahan. Ketiganya saling terhubung dan saling mempengaruhi. Dalam konteks pemilu misalnya, tingkat partisipasi politik masyarakat dapat menjadi indikator seberapa besar legitimasi yang diberikan kepada calon pemimpin yang terpilih. Setiap individu tentu memiliki pandangan, kepentingan, dan pilihan politik yang berbeda-beda, dan melalui partisipasi dalam pemilu, mereka mengekspresikan preferensi tersebut. Lebih dari sekadar memilih, keterlibatan politik masyarakat juga bisa dipahami sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Bentuk

---

<sup>65</sup> Abdil Raulaelika Fauzan, Akshal Heldiansyah Ripdia, and Asyifa Zahra. "Democracy, Justice, and Utilitarianism in an Effort to Legitimize Bureaucratic Power." *Journal of Dialectics: Journal of Social Sciences* 19.1 (2021):



kontrol ini bisa bermacam-macam, tergantung pada seberapa besar masyarakat ikut ambil bagian dalam kegiatan politik. Di sisi lain, partisipasi politik juga menjadi bagian penting dari upaya pemenuhan hak-hak warga negara dalam kehidupan bernegara yang demokratis.<sup>66</sup> Hal ini menunjukkan bahwa negara yang menganut sistem demokrasi memperoleh legitimasi dari masyarakat lewat pemilihan umum.

Pada masa Kesultanan Turki Ustmani menganut sistem monarki. Menurut *Legacy Dictionary* Monarki adalah pemerintahan yang biasanya keluarga disebut “dinasti” yang memimpin negara dan seorang raja yang menjadi kepala negaranya.<sup>67</sup> Pemikiran Polybius mengenai negara yang terkenal adalah Siklus Polybius. Pada mulanya negara berformasi monarki yang kekuasaan dilaksanakan oleh raja secara turun temurun. Namun kemudian, raja itu bertindak sewenang-wenang dan tidak memikirkan rakyatnya. Dengan demikian, pemerintah berubah menjadi tirani yang dikendalikan oleh seorang diktator.<sup>68</sup>

Hal ini menunjukkan kalau Muhammad Al-Fatih memperoleh legitimasi tanpa partisipasi politik dari masyarakat atau melalui proses pemilu. Meskipun secara sah dia sebagai pemimpin, namun tidak sertamerta Muhammad Al-Fatih memperoleh legitimasi dari masyarakat, Muhammad Al-Fatih harus membuktikan bahwa dia mempunyai kapabilitas sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin Muhammad Al-Fatih senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat. Sebab, legitimasi pada dasarnya berasal dari rakyat, sehingga seluruh aktivitas pemerintahan baik kebijakan, pelayanan publik, maupun pengelolaan negara harus bertujuan memberikan manfaat nyata bagi

---

<sup>66</sup> Ni Ketut Arniti, "Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4.2 (2020)

<sup>67</sup> Nissa Auliana, et al., eds., *Demokrasi dan Monarki*, (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2022). h.7

<sup>68</sup> Isharyanto, *Ilmu Negara*, Karanganyar: Oase Pustaka, (2016), h.51



masyarakat agar terciptanya stabilitas politik. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian melalui penelusuran pustaka, menunjukkan bahwa Muhammad Al-Fatih memiliki beberapa Kontribusi dalam menciptakan Stabilitas Politik baik itu melalui kebijakan Internal maupun secara eksternal melalui diplomasi luar negeri.

#### A. Bidang Pendidikan

Sultan Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan menjunjung tinggi kedudukan para ulama. Atas dasar itu, ia memberikan perhatian besar terhadap pembangunan sarana pendidikan di seluruh wilayah kekuasaannya, baik di kota-kota besar seperti Konstantinopel, Bursa, dan Edirne, maupun di daerah-daerah terpencil. Meneruskan jejak Sultan Orhan yang pertama kali membangun sekolah percontohan di Daulah Utsmaniyah, Sultan Al-Fatih bahkan melampaui pencapaian pendahulunya. Ia merancang sistem pendidikan berjenjang, lengkap dengan kurikulum yang sesuai di tiap tingkat, serta menetapkan aturan ujian sebagai syarat kenaikan jenjang. Murid baru boleh naik tingkat setelah menguasai pelajaran dan lulus dari ujian yang ketat. Dalam praktiknya, Sultan turut terlibat langsung ia sering hadir di ruang-ruang ujian, mengunjungi sekolah-sekolah, bahkan mendengarkan langsung pelajaran yang disampaikan para guru. Ia juga mendorong semangat belajar para pelajar dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa dan pengajar yang cemerlang. Seluruh biaya pendidikan di sekolah-sekolah milik negara ditanggung penuh oleh pemerintah.<sup>69</sup>

Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendirian berbagai lembaga pendidikan

---

<sup>69</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Muhammad Al-Fatih (1432-1481 M) Sang Penakluk Yang Di Ramalkan*, Solo: Aqwa Jembatan Ilmu, terj. Indonesia, (2017), h.330-332

Islam di wilayah Turki, khususnya setelah penaklukan Konstantinopel. Ia menjadikan Masjid Ayasofya dan Zeyrek sebagai pusat pendidikan Islam pertama di kota tersebut, yang kemudian berkembang menjadi tempat pembelajaran penting. Selain itu, ia merintis pendirian Darul Funun, yang menjadi cikal bakal dari Universitas Istanbul. Untuk memperluas akses pendidikan, Sultan juga membangun sejumlah madrasah, antara lain Madrasah Miftah, Kirkha, Ellili, Sahn-I, Altmish, Hasiye-I Tecrid, Zeyrek, Tetimme, Otuzlu, Ibtidayah Haric, Darul Hadis, Darussyifa, Eyup, dan Mektep. Lembaga-lembaga ini menjadi wadah penting dalam penyebaran ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum di bawah naungan Daulah Utsmaniyah.<sup>70</sup>

Kontribusi Muhammad Al-Fatih dalam bidang pendidikan tidak hanya menjadi fondasi kebangkitan intelektual Utsmani, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menciptakan stabilitas politik melalui pendekatan kepemimpinan dan penyelesaian konflik yang visioner. Dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan seperti madrasah, akademi, hingga *Darü'l-Funûn* cikal bakal Universitas Istanbul Al-Fatih menunjukkan kepemimpinan yang selaras dengan teori transformasional, di mana pemimpin berupaya meningkatkan kapasitas intelektual rakyatnya agar mampu berpartisipasi dalam pemerintahan secara aktif dan rasional. Hal ini sejalan dengan konsep teori kepemimpinan berbasis sifat dan visi, di mana pemimpin seperti Al-Fatih memiliki kualitas visioner, integritas, dan kecerdasan tinggi untuk membentuk peradaban yang stabil dari bawah. Di sisi lain, pendidikan juga dimanfaatkan sebagai strategi resolusi konflik non-militer,

---

<sup>70</sup> Kumala, Siti Fatmawati, Anis Maslihah, and Imron Rossidy, "Kontribusi Muhammad Al-Fatih Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Turki", *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7.2 (2024).

khususnya untuk meredam potensi konflik horizontal antarumat beragama di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Dengan memberikan akses pendidikan kepada non-Muslim dan menetapkan millet system yang inklusif, Al-Fatih secara efektif menerapkan strategi kolaboratif dalam teori penyelesaian konflik Thomas-Kilmann, yaitu dengan mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok demi harmoni sosial-politik. Maka, melalui pendidikan, Sultan tidak hanya mentransformasi sistem keilmuan, tetapi juga membangun sarana integrasi sosial yang menjadi kunci keberhasilan stabilitas politik Kesultanan Turki Utsmani pada masanya.

#### B. Bidang Administrasi dan Hukum

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Sultan Muhammad al-Fatih tidak hanya dikenal sebagai penakluk Konstantinopel, tetapi juga sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Ash-Shallabi, komitmennya terhadap penegakan hukum dan keadilan menjadi fondasi utama dalam membangun stabilitas negara. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan administratif dan yudisial yang diterapkannya. Menurut Ash-Sallabi:

Sultan al-Faatih worked hard to develop his state, setting some regulations to enable him to systematize all the affairs of local administrations. The regulations were derived from the Islamic Shari'ah by a committee of scholars appointed by the Sultan. The committee put in place a law called "the Law of Nameh," that was drawn from the Shari'ah, and established as the basis of state rule. The law was made of three chapters, which related to the positions of the employees, customs and protocols, in addition to some punishments and fines. The law clearly decreed that the state was to be ruled by an Islamic government, based on the superiority of the Islamic aspect, not giving preference to any particular race or origin. The Sultan al-Faatih was also concerned about establishing some regulations to organise the relationship of non Muslims in the country with their Muslim neighbours, and with the state which governed them. He established justice among all his subjects, removing all robbers and highwaymen. He ensured that peace and security was commonthroughout the Ottoman State. The Sultan purged the state of all

incompetent employees, replacing them with competent ones. Indeed, the aspect of proficiency was his sole basis for choosing his aides and governors. He also introduced firm financial regulations concerning state taxes, and ended any negligence or misconduct of tax inspectors, which had previously wasted vast state funds.<sup>71</sup>

Terjemahan:

Sultan Muhammad al-Fatih bekerja keras untuk membangun dan mengembangkan negaranya, dengan menetapkan sejumlah peraturan guna menata seluruh urusan administrasi lokal secara sistematis. Peraturan-peraturan tersebut diambil dari syariat Islam oleh sebuah komite ulama yang ditunjuk langsung oleh Sultan. Komite ini menyusun sebuah undang-undang yang disebut "Qanun Nameh" (Hukum Nameh), yang bersumber dari syariat dan dijadikan sebagai dasar dalam pemerintahan negara.

Undang-undang tersebut terdiri dari tiga bab yang mengatur tentang jabatan para pegawai, tata krama dan protokol, serta berbagai hukuman dan denda. Dalam hukum tersebut secara jelas dinyatakan bahwa negara harus diperintah dengan sistem pemerintahan Islam, yang menekankan pada keunggulan aspek keislaman tanpa mengutamakan ras atau asal-usul tertentu.

Sultan Muhammad al-Fatih juga memperhatikan pentingnya menetapkan aturan yang mengatur hubungan antara warga non-Muslim dengan tetangga Muslim mereka, serta dengan negara yang menaungi mereka. Ia menegakkan keadilan bagi seluruh rakyatnya dengan menyingkirkan para perampok dan penjahat jalanan, sehingga memastikan bahwa keamanan dan kedamaian merata di seluruh wilayah Kesultanan Utsmaniyah.

Sultan juga membersihkan pemerintahan dari para pegawai yang tidak kompeten dan menggantinya dengan orang-orang yang cakap. Kemampuan adalah satu-satunya dasar bagi Sultan dalam memilih para pembantu dan gubernurnya. Ia juga memberlakukan aturan keuangan yang ketat terkait perpajakan negara, serta menghentikan kelalaian atau penyalahgunaan yang sebelumnya sering dilakukan oleh para petugas pajak, yang telah menyebabkan kerugian besar bagi kas negara.

Sultan Muhammad al-Fatih bukan hanya seorang penakluk ulung, tetapi juga seorang negarawan visioner yang peduli terhadap tata kelola pemerintahan yang adil, efisien, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan menyusun hukum tertulis yang bersumber dari syariat, ia tidak hanya memberi legitimasi agama bagi sistem pemerintahannya, tetapi juga menciptakan struktur hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan sosial.

Penerapan prinsip meritokrasi dalam pengangkatan pejabat, yakni

---

<sup>71</sup> Ali Muhammad Al-Salaabi, *Sultan Muhammad Al-Fatih, The Conqueror of Constantinople The Fall of the West and the East*, London: Al-Firdous, (2009), h.192-193

berdasarkan kompetensi bukan kedekatan atau asal-usul, menunjukkan bahwa Sultan al-Fatih telah jauh melampaui praktik nepotisme yang lazim terjadi pada masa itu. Langkah ini memperkuat fondasi negara dan mendorong lahirnya birokrasi yang profesional dan efisien. Perhatian terhadap perlindungan non-Muslim, penghapusan kejahatan, dan penguatan keamanan menunjukkan karakter pemimpin yang adil dan inklusif. Sementara itu, reformasi fiskal yang dilakukannya mencerminkan kepekaan terhadap pentingnya tata kelola keuangan negara, sekaligus memperlihatkan ketegasannya dalam memberantas penyalahgunaan kekuasaan. Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan ini mencerminkan kepemimpinan yang kokoh dan berbasis nilai, serta menciptakan landasan yang stabil bagi berkembangnya peradaban Islam dan negara yang maju di bawah Kesultanan Utsmaniyah.

Al-Fatih memberlakukan kebijakan yang terbuka terhadap kelompok minoritas Kristen Yunani dan Yahudi sebagai upaya mempertahankan stabilitas kekuasaannya. Sistem millet yang dijalankan memungkinkan setiap komunitas agama mengatur urusan internal mereka sendiri, termasuk hak untuk memilih pemimpin spiritual seperti patriark bagi umat Kristen Ortodoks. Proses pengangkatan patriark oleh Sultan ditandai dengan penyerahan tongkat dan cincin sebagai simbol kekuasaan tidak sekadar memperkuat legitimasi poli-tiknya, tetapi juga menunjukkan sikap menghargai prinsip Islam terhadap pemeluk agama samawi (Ahli Kitab), selaras dengan ajaran Al-Qur'an tentang toleransi. Hasil sensus tahun 1477 membuktikan efektivitas kebijakan ini: populasi Istanbul kala itu terdiri dari 60% Muslim, 21,5% Kristen Ortodoks, 11% Yahudi, dan 7,5% kelompok lain. Komposisi ini mengindikasikan bahwa Al-Fatih sukses



membangun harmoni sosial dengan mengakui hak-hak minoritas, suatu langkah yang lebih progresif dibandingkan era Bizantium yang cenderung membatasi hak kelompok non-penguasa.<sup>72</sup>

Sultan Muhammad Al-Fatih tidak hanya menjalankan pemerintahan secara otoritatif, tetapi juga membangun sistem hukum dan administrasi yang kuat dan adil, seperti penerapan millet system dan reformasi birokrasi yang mengakomodasi berbagai kelompok etnis dan agama. Pendekatan ini mencerminkan penggunaan strategi kolaboratif dalam teori penyelesaian konflik menurut Thomas & Kilmann, di mana Al-Fatih mampu meredam potensi konflik internal dengan cara memberi ruang otonomi kepada komunitas non-Muslim. Sementara itu, dalam perspektif teori kepemimpinan, Al-Fatih menunjukkan ciri-ciri pemimpin transformatif yang tidak hanya memiliki visi besar (penaklukan Konstantinopel) tetapi juga mampu membangun legitimasi politik melalui keadilan hukum dan efisiensi administrasi. Kepemimpinannya menjadi kunci dalam mengatasi konflik internal maupun tekanan eksternal, serta mewujudkan stabilitas politik yang kokoh dalam Kesultanan Turki Utsmani.

### C. Kebijakan Ekonomi

Dalam menganalisis kebijakan ekonomi Sultan Mehmed II, Halil dan Donald mengidentifikasi beberapa strategi utama yang menunjukkan kecerdasan finansial sekaligus ketajaman militer seorang pemimpin visioner. Mereka menyoroti bagaimana Mehmed II membangun fondasi ekonomi yang kokoh demi mendukung stabilitas kekuasaan dan ekspansi wilayah Utsmani. Berikut ini adalah paparan

---

<sup>72</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Depok: Rajawali Press, (2020). h.287-288



lengkap mengenai kebijakan ekonomi tersebut:

1. Centralization and Diversification of Revenue Sources

Mehmed II consolidated the state's economic power through a structured taxation system, such as *cizye* (tax on non-Muslims) and *avarız* (emergency tax). These policies not only ensured a stable flow of funds but also demonstrated fiscal flexibility to respond to urgent military needs. The exploitation of precious metal mines in the Balkans and Anatolia strengthened the Ottoman currency, ensuring liquidity to fund military forces and war technologies. This reflects his understanding that monetary stability and reserves of precious metals were the backbone of a wartime economy.

2. The Timar System: An Economic-Military Symbiosis

The timar system created a symbiosis between military and economic interests. By granting land to sipahis in exchange for military service, Mehmed II reduced the state's financial burden while securing logistical supplies (such as food and horses) from the agricultural yields of those lands. This was a clever form of decentralized responsibility, where the state shifted the cost of troop maintenance to the sipahis while retaining control over land distribution.

3. Investment in Technology and Strategic Infrastructure

Funding for giant cannons (such as those built by Orban) and a naval fleet demonstrated Mehmed II's priority on technological superiority. The construction of 140 ships and the Rumeli Hisarı Fortress not only facilitated the siege of Constantinople but also secured Black Sea trade routes, providing long-term revenue sources. These investments combined short-term military objectives (conquest) with long-term economic strengthening (trade control).

4. Monopolies and Trade Control

By imposing high tariffs at strategic ports such as Galata, Mehmed II turned the Ottoman's geographical position into economic leverage. The monopolies on salt and precious metals ensured the availability of critical commodities while serving as political tools to control prices and supply. These policies not only funded wars but also weakened enemy economies by restricting their access to major trade routes.

5. The *Iltizam* System and Fiscal Efficiency

*Iltizam* (tax farming) enabled the state to quickly raise funds for military needs, although it carried the risk of abuse by contractors. This policy reflected Mehmed II's pragmatism sacrificing long-term efficiency for wartime urgency. However, this system also strengthened collaboration between the state and local elites, who formed the backbone of the Ottoman administration.

6. Human Resource Mobilization

The *devşirme* policy and the conscription of peasants for military labor reflected the optimal use of human resources. By recruiting Janissaries from Christian boys, Mehmed II built a loyal army directly funded by the palace, reducing reliance on voluntary militias. Meanwhile, the use of peasants for military projects reflected a total war approach in which the entire population contributed to the war effort.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Halil İnalcık and Donald Quataert, *An Economic And Sosial Hitory of The Ottoman Empire Volume 1: 1300-1600*, Cambridge: Cambridge University Press, (1994). h.65-75.

Terjemahan:

1. Sentralisasi dan Diversifikasi Sumber Pendapatan

Mehmed II memperkuat kekuatan ekonomi negara melalui sistem perpajakan yang terstruktur, seperti pajak *cizye* (untuk non-Muslim) dan *avarız* (pajak darurat). Kebijakan ini tidak hanya menjamin aliran dana yang stabil, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas fiskal dalam menghadapi kebutuhan militer yang mendesak. Eksploitasi tambang logam mulia di Balkan dan Anatolia memperkuat mata uang Utsmani, memastikan likuiditas untuk membiayai pasukan dan teknologi perang. Hal ini mencerminkan pemahamannya bahwa kestabilan moneter dan cadangan logam mulia merupakan tulang punggung ekonomi dalam masa perang.

2. Sistem Timar: Simbiosis Ekonomi-Militer

Sistem timar menciptakan hubungan timbal balik antara kepentingan ekonomi dan militer. Dengan memberikan tanah kepada para sipahi (kavaleri) sebagai imbalan atas jasa militer, Mehmed II berhasil mengurangi beban keuangan negara sekaligus menjamin pasokan logistik (seperti makanan dan kuda) dari hasil pertanian lahan tersebut. Ini merupakan bentuk tanggung jawab desentralisasi yang cerdas, di mana negara mengalihkan biaya pemeliharaan pasukan kepada para sipahi sambil tetap mempertahankan kendali atas distribusi lahan.

3. Investasi pada Teknologi dan Infrastruktur Strategis

Pendanaan untuk meriam raksasa (seperti yang dibuat oleh Orban) dan armada laut menunjukkan prioritas Mehmed II terhadap keunggulan teknologi. Pembangunan 140 kapal dan Benteng Rumeli Hisarı tidak hanya mendukung pengepungan Konstantinopel, tetapi juga mengamankan jalur perdagangan Laut Hitam, menciptakan sumber pendapatan jangka panjang. Investasi ini menggabungkan tujuan militer jangka pendek (penaklukan) dengan penguatan ekonomi jangka panjang (penguasaan perdagangan).

4. Monopoli dan Kontrol Perdagangan

Dengan memberlakukan tarif tinggi di pelabuhan strategis seperti Galata, Mehmed II mengubah posisi geografis Utsmani menjadi kekuatan ekonomi. Monopoli atas garam dan logam mulia menjamin ketersediaan komoditas penting dan sekaligus berfungsi sebagai alat politik untuk mengendalikan harga dan pasokan. Kebijakan ini tidak hanya membiayai peperangan, tetapi juga melemahkan ekonomi musuh dengan membatasi akses mereka ke jalur perdagangan utama.

5. Sistem Iltizam dan Efisiensi Fiskal

Sistem iltizam (pajak sewa) memungkinkan negara untuk menghimpun dana dengan cepat demi keperluan militer, meskipun berisiko disalahgunakan oleh para kontraktor. Kebijakan ini mencerminkan pragmatisme Mehmed II yang lebih mengutamakan urgensi peperangan ketimbang efisiensi jangka panjang. Namun demikian, sistem ini juga memperkuat kerja sama antara negara dan elite lokal, yang menjadi tulang punggung administrasi Utsmani.

6. Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Kebijakan *devşirme* dan pengerahan petani sebagai tenaga kerja militer mencerminkan optimalisasi sumber daya manusia. Dengan merekrut pasukan Janissari dari anak-anak Kristen, Mehmed II membentuk pasukan yang loyal dan langsung dibiayai oleh istana, sehingga mengurangi ketergantungan pada milisi sukarela. Sementara itu, penggunaan petani untuk proyek-proyek militer

mencerminkan pendekatan perang total di mana seluruh penduduk dilibatkan dalam upaya perang.

Kebijakan Mehmed II berhasil menciptakan ekonomi perang yang efisien, memadukan pendapatan stabil, teknologi mutakhir, dan logistik terencana. Penaklukan Konstantinopel (1453) tidak hanya mengukuhkan Ottoman sebagai kekuatan global tetapi juga membuka akses ke jalur rempah dan perdagangan Eurasia. Strategi ekonominya menjadi fondasi bagi imperium untuk ekspansi berikutnya, dengan sentralisasi fiskal dan sistem timar yang bertahan selama berabad-abad. Meski efektif, kebijakan ini memiliki kelemahan potensial:

- a. Pajak tinggi dan *iltizam* bisa memicu resistensi sosial.
- b. Ketergantungan pada *devşirme* dan Janissari kelak menimbulkan konflik internal.
- c. Monopoli negara berisiko mematikan inisiatif swasta.

Sultan Mehmed II tidak hanya dikenal sebagai penakluk Konstantinopel, tetapi juga sebagai arsitek kebijakan ekonomi yang berpandangan jauh ke depan. Strategi fiskalnya menunjukkan pemahaman mendalam mengenai pentingnya kesinambungan ekonomi sebagai fondasi utama kekuatan militer dan pemerintahan. Pendekatan kombinatorik antara sentralisasi dan desentralisasi, seperti terlihat dalam sistem timar dan *iltizam*, menegaskan adanya keseimbangan antara kontrol negara dan partisipasi lokal.

Lebih dari sekadar kebijakan teknis, langkah-langkah ini juga mencerminkan visi geopolitik Mehmed II yang menjadikan ekonomi sebagai senjata diplomasi dan dominasi. Monopoli perdagangan dan pembangunan infrastruktur militer memperkuat posisi Utsmani dalam skala regional dan internasional. Di sisi lain, penggunaan kebijakan *devşirme* dan pengalihan petani

menunjukkan bagaimana negara mampu memobilisasi seluruh potensi rakyat dalam konteks *total war*.

Dengan demikian, kebijakan ekonomi Mehmed II patut dipahami sebagai bagian integral dari visi politik dan militernya, bukan semata-mata sebagai respons terhadap tantangan keuangan. Ia menunjukkan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan di medan perang, tetapi juga melalui kecerdikan dalam mengelola sumber daya dan stabilitas internal.

#### D. Sistem Militer dan Pertahanan

Untuk menjaga keamanan dan menjamin kelangsungan hidup masyarakat agar bisa hidup dengan aman dan tenang, Muhammad Al-Fatih harus bisa mengurangi ancaman dari negara negara luar. Bangsa Turki Utsmani dikenal sebagai bangsa yang memiliki jiwa militer yang kuat. Sejak masa Sultan Orkhan, kekuatan militer mulai dibentuk dengan struktur yang terorganisir. Tradisi militer ini kemudian dilanjutkan dan diperkuat oleh Sultan Muhammad al-Fatih, yang memberi perhatian besar terhadap pembangunan dan pengembangan pasukannya. Ia menyusun strategi pelatihan militer yang sistematis, membekali prajurit dengan pendidikan, serta membangun industri persenjataan yang mampu memproduksi berbagai perlengkapan militer, seperti pakaian tempur, tameng, baju besi, hingga meriam. Tak hanya itu, al-Fatih juga membentuk satuan-satuan militer khusus, seperti pasukan penunggang kuda, prajurit infanteri, operator senjata berat, hingga pasukan teknik seperti Lag Majiyyah yang bertugas menggali terowongan bawah tanah.<sup>74</sup> Menurut Suparman Sultan melaksanakan pembangunan militer dalam

---

<sup>74</sup> Manaya Qurrota A'yun, *The Great History Of Muhammad Al-Fatih*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, (2023), h.99

berbagai bentuk dan kebijakan seperti berikut ini:

1. Seleksi Pasukan Janissari: Sultan Muhammad Al-Fatih secara langsung terlibat dalam menyeleksi tentara, terutama untuk pasukan Janissari, yang dilakukan setiap tujuh tahun oleh komandan ke wilayah-wilayah tertentu. Pemuda desa diutamakan, tetapi anak tokoh lokal juga bisa dipilih.
2. Kecakapan Pasukan Janissari: Janissari dikenal karena ketakwaan dan keahlian tempurnya, meskipun pernah memberontak. Untuk memperkuat kendali, Sultan menambahkan 7.000 pengawal pribadinya ke dalam barisan Janissari.
3. Sikap Tegas Sultan: Sultan mengganti prajurit atau panglima yang malas dan melakukan kesalahan.
4. Penambahan Personil: Jumlah pasukan ditingkatkan hingga 250.000 orang.
5. Peningkatan Pelatihan: Pasukan dilatih dalam seni tempur dan keahlian bersenjata
6. Industri Militer: Sultan membangun pabrik-pabrik militer untuk pakaian, perisai, kuda, dll. Persenjataan diproduksi di bengkel dan disimpan di gudang senjata (*cebehâne*).
7. Pemanfaatan Hagia Eirene: Setelah penaklukan Konstantinopel, Hagia Eirene dijadikan gudang senjata utama (*cebehâne*) di Istana Topkapi.
8. Pendirian Universitas Militer: Didirikan untuk mencetak insinyur, dokter, dokter hewan, ahli fisika, dan ahli pertanian.
9. Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Militer: Meliputi persenjataan mutakhir dan teknologi canggih.
10. Modernisasi Divisi Artileri: Divisi artileri yang sebelumnya tidak terorganisir diperbaiki dan digaji. Sultan memakai meriam Eropa rancangan Orban, insinyur



non-Muslim.

11. Pembangunan Benteng: Romali Hisari dibangun di selat Bosporus untuk mengontrol lalu lintas kapal musuh.
12. Spiritualitas Pasukan: Sultan sering sholat berjamaah, memberikan tausiyah, dan mengingatkan keutamaan pasukan penakluk Konstantinopel.
13. Peran Ulama di Barak: Ulama mendampingi dan memotivasi prajurit dalam ibadah-ibadah sunnah.
14. Kewajiban Mengaji: Semua pasukan Muslim wajib mempelajari Al-Qur'an.
15. Kenaikan Pangkat Terbuka: Kenaikan jabatan didasarkan pada kemampuan, bukan latar belakang etnis atau keluarga.
16. Sistem Gaji dan Absensi: Pasukan digaji rutin berdasarkan jenjang karier. Gaji ditingkatkan dari dana pribadi Sultan. Kebutuhan pasukan dan keluarganya juga diperhatikan.
17. Kebersamaan dengan Pasukan: Sultan sering makan bersama pengawal pribadinya untuk menjalin kedekatan.
18. Kepemimpinan Penuh atas Janissari: Hanya Sultan yang boleh memberi perintah kepada Janissari. Aga Janissari hanya melapor kepada Sultan, untuk mencegah kudeta.
19. Pembangunan Armada Laut: Sultan memerintahkan gubernur di kota pelabuhan untuk fokus membangun kapal perang. Saat pengepungan Konstantinopel, dipersiapkan sekitar 400 kapal.<sup>75</sup>

Sistem militer yang dibentuk oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan dan penaklukan, melainkan juga sebagai

---

<sup>75</sup> Suparman, "Sistem Militer Sultan Muhammad Al-Fatih Dinasti Turki Utsmani." *Jurnal Al-Kifayah: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 3.1 (2024).



instrumen strategis dalam membangun dan menjaga stabilitas politik Kesultanan Turki Utsmani. Berdasarkan teori konflik sebagaimana dijelaskan oleh Thomas dan Kilmann, konflik merupakan hal yang wajar dalam dinamika sosial-politik, namun yang terpenting adalah kemampuan dalam mengelolanya. Dalam konteks ini, Sultan Muhammad Al-Fatih menunjukkan kemampuan tersebut dengan menghadapi pemberontakan Janissari melalui pendekatan kompetitif—yakni dengan mengambil alih kendali penuh dan menambahkan pengawal pribadi sebagai kekuatan pengimbang. Tindakan ini menghindarkan istana dari potensi kudeta, serta menjaga jalannya pemerintahan secara stabil.

Dari perspektif teori kepemimpinan, langkah-langkah Sultan Al-Fatih mencerminkan gabungan dari teori sifat (trait theory) dan perilaku (behavioral theory). Karakter seperti tegas, religius, visioner, dan disiplin tampak dalam berbagai kebijakan militer yang ia terapkan, seperti seleksi pasukan yang ketat, pembentukan universitas militer, serta kedekatannya dengan para prajurit. Ia tidak hanya memimpin dengan instruksi, tetapi juga menjadi teladan dalam moralitas dan spiritualitas, seperti kebiasaannya shalat berjamaah dan makan bersama pasukannya. Ini sejalan dengan pandangan Crow bahwa pemimpin ideal adalah figur teladan moral dan pembentuk budaya organisasi yang harmonis.

Selanjutnya, jika ditinjau dari teori stabilitas politik yang dikemukakan oleh Harold Crouch dan Arbi Sanit, sistem militer yang dibangun Al-Fatih secara langsung berkontribusi terhadap terciptanya kestabilan politik. Dengan menggaji pasukan secara rutin, membangun industri militer, serta memberlakukan sistem kenaikan pangkat berbasis meritokrasi tanpa diskriminasi etnis atau kelas sosial, Sultan berhasil menciptakan lembaga militer yang kuat, profesional, dan loyal. Hal

ini merupakan bentuk penguatan institusi dan partisipasi politik yang inklusif, yang menjadi salah satu prasyarat terciptanya sistem pemerintahan yang stabil.

Dengan demikian, sistem militer Sultan Muhammad Al-Fatih tidak hanya merepresentasikan kekuatan fisik dan pertahanan negara, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi kepemimpinan dalam menciptakan stabilitas politik jangka panjang. Melalui pengelolaan konflik yang efektif, kepemimpinan yang teladan, dan pembentukan struktur militer yang solid, Al-Fatih berhasil membangun fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani.

#### E. Ekspansi Wilayah

Perluasan wilayah Islam sejatinya telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW. Selain melalui dakwah dan pengiriman surat kepada raja dan gubernur di berbagai daerah agar menerima ajaran tauhid, beliau juga terpaksa melakukan peperangan sebagai bentuk perlindungan terhadap umat, kehormatan, dan harta benda. Dalam perjalanannya, kejayaan kekuasaan Islam sempat mengalami kemunduran, terutama pada abad ke-14. Namun, kebangkitan kembali terjadi melalui munculnya tiga kerajaan besar, yaitu Kesultanan Utsmani di Turki, Dinasti Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India, di mana Kesultanan Utsmani menjadi yang paling kuat dan bertahan paling lama. Kesultanan ini berawal dari suku Kayi, kaum pengembara dari Turkistan yang melarikan diri ke Asia Kecil akibat serangan Mongol, lalu menetap dan mengabdikan diri kepada Sultan Alaeddin II dari Saljuk Rum di bawah kepemimpinan Erthogrul. Puncak kejayaan Utsmani terjadi di masa Sultan Muhammad Al-Fatih (1451–1481 M), yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel impian umat Islam sejak masa Khulafaur Rasyidin.

Konstantinopel, yang secara geografis berada di persimpangan antara Asia dan Eropa serta dikelilingi oleh tujuh bukit dan laut, menjadi kota strategis dan sulit ditaklukkan karena bentengnya yang kokoh. Pada 6 April 1453 M, Sultan Muhammad Al-Fatih memimpin langsung pengepungan kota tersebut. Ia membangun Benteng Rumeli Hisar untuk menguasai Selat Bosphorus, berseberangan dengan Benteng Anadolu Hisar peninggalan Sultan Bayazid I. Dalam serangan besar ini, Kaisar Byzantium tewas, dan kemenangan besar berhasil diraih oleh pasukan Utsmani. Penaklukan Konstantinopel menandai berakhirnya Kekaisaran Byzantium dan membuka kembali jalan penyebaran Islam di Eropa. Sejak saat itu, wajah kota tersebut berubah drastis dari pusat kekuasaan Kristen menjadi kota yang identik dengan budaya dan peradaban Islam, baik dari segi masyarakat, bangunan, maupun sistem pemerintahannya.<sup>76</sup>

Konstantinopel merupakan pusat pemerintahan dari Kekaisaran Romawi Timur yang juga menjadi jalur utama perdagangan antara benua Eropa dan Asia. Kota ini menganut ajaran Kristen, menggunakan bahasa Yunani, dan memiliki budaya khas Yunani yang kuat. Selain itu, pertahanan kotanya sangat tangguh, baik dari serangan darat maupun laut, sehingga membuatnya sulit ditaklukkan. Dalam waktu yang cukup lama, Konstantinopel juga menjadi benteng utama bagi dunia Kristen dalam menghadapi kekuatan Islam.

Karena letaknya yang sangat strategis, banyak bangsa berusaha menguasainya, termasuk umat Islam. Penantian panjang itu akhirnya terwujud pada tahun 1453, ketika Sultan Muhammad II Sultan ketujuh dari Kesultanan Turki

---

<sup>76</sup> Yolanda Sadewa Aditya Kusuma and Lutfiah Ayundasari. "Penaklukan Konstantinopel tahun 1543: Upaya Turki Utsmani menyebarkan agama dan membentuk kebudayaan Islam di Eropa." *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1.1 (2021).

Utsmani berhasil menaklukkan kota tersebut. Keberhasilan ini bukan hanya menjadi kemenangan besar bagi Islam, tetapi juga diyakini sebagai penggenapan dari janji Allah dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, bahwa Konstantinopel akan dibebaskan oleh pemimpin terbaik bersama pasukan terbaiknya.<sup>77</sup>

Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmet II pada 1453 bukan sekadar kemenangan militer, tetapi juga menjadi landasan pengakuan politik bagi Kesultanan Utsmani. Dengan menguasai kota yang selama berabad-abad menjadi simbol kekuatan Kristen ini, Mehmet II membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang dijanjikan dalam tradisi Islam. Ia mengubah nama kota menjadi Istanbul dan mengalihfungsikan Hagia Sophia gereja megah peninggalan Bizantium menjadi masjid. Perpindahan pusat kekuasaan Daulah Turki Usmani terjadi tiga kali dalam sejarahnya, mencerminkan dinamika perluasan dan strategi politik kesultanan tersebut. Pada masa Sultan Usman I, pusat kekuasaan awalnya berlokasi di Asia Kecil, wilayah yang menjadi cikal bakal kekuatan Turki Usmani. Kemudian, di bawah kepemimpinan Sultan Orkhan, pusat pemerintahan dipindahkan ke Broessa (Bursa), menandai fase konsolidasi kekuasaan di Anatolia. Perpindahan berikutnya terjadi pada era Sultan Murad I, yang memindahkan ibu kota ke Adrianopel (Edirne), lokasi yang lebih dekat ke wilayah Balkan untuk memudahkan ekspansi ke Eropa. Namun, ketika Konstantinopel berhasil ditaklukkan dan dijadikan pusat kekuasaan baru.<sup>78</sup>

Setelah Konstantinopel ditetapkan sebagai ibu kota Kesultanan Utsmaniyah, Sultan memindahkan pusat pemerintahan dari Adrianopel ke kota

---

<sup>77</sup> Suminar Kaisha Ratna, "Implikasi Penaklukan Konstantinopel Terhadap Imperialisme Barat Di Dunia Islam", *Nihaiyyat: Journal Of Islamic Interdisciplinary Studies* 1.3 (2022)

<sup>78</sup> Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*, Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau (2010). h.292-293.

tersebut, memperlancar strategi ekspansi kerajaan. Dari tahun 1458 hingga 1560, ia berhasil menaklukkan Serbia yang sebelumnya sering mengganggu stabilitas kekuasaan Utsmani, disusul Athena (1456) dan Mora (1460) melalui pertempuran sengit. Usai mengamankan wilayah Eropa, Sultan beralih ke Asia Kecil untuk menundukkan Trabzun (1464) dan Bosnia, yang kemudian diintegrasikan sebagai wilayah resmi. Ekspansi dilanjutkan dengan menguasai pesisir Krimea, Aga Karman, serta kepulauan Venesia pada 1477, termasuk Kroasia dan Sekudra. Pada 1480, kepulauan dekat Yunani-Italia jatuh ke tangan Utsmani, dan puncaknya adalah penaklukan Toronta (Otranto) di Italia, menegaskan dominasi kerajaan hingga Eropa Barat.<sup>79</sup>

Runtuhnya ibukota Bizantium menandai lenyapnya Kekaisaran Romawi Timur dari panggung sejarah, sekaligus menjadi penanda berakhirnya Abad Pertengahan. Sultan Muhammad II menerapkan kebijakan toleran terhadap umat Kristen, mengizinkan mereka mempertahankan gereja-gereja dan bahkan memilih pemimpin rohani sendiri sebuah kebijakan yang kontras dengan praktik penguasa Kristen saat itu. Di tengah ketegangan dengan negara-kota Venesia di Laut Tengah memperebutkan pengaruh utama, wilayah Semenanjung Krim berhasil disatukan di bawah kendali Utsmani. Pada 1475, kepulauan di Laut Aegean resmi menjadi bagian kekuasaan mereka. Sultan Muhammad II wafat pada 1481 saat merancang invasi ke Italia, kemudian digantikan oleh putranya, Bayazid II (886 H/1481 M–918 H/1512 M), yang melanjutkan warisan ekspansi ayahnya.<sup>80</sup>

Ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih bukan

---

<sup>79</sup> Abd. Rahim Yunus and Abu Haif, *Sejarah Islam Pertengahan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013). h.129

<sup>80</sup> Ali Mufrodi, *et al., eds., Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Khilafah*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h.234



hanya sebagai upaya militer semata, tetapi juga merupakan strategi kepemimpinan visioner yang bertujuan untuk membentuk tatanan politik yang stabil dan terintegrasi. Dalam konteks teori kepemimpinan, Al-Fatih menunjukkan ciri-ciri pemimpin transformatif: ia memiliki *drive* atau semangat yang kuat, integritas dalam visi penaklukan Konstantinopel, kecerdasan strategis dalam menggunakan teknologi militer (misalnya meriam besar), serta kemampuan memimpin pasukan lintas etnis dan agama. Strategi ini sesuai dengan pendekatan kepemimpinan menurut Crow dan Kartono yang menekankan peran pemimpin sebagai pemilik moralitas, pionir visi, dan agen harmoni dalam institusi.

Sementara itu, dari perspektif teori konflik, ekspansi wilayah tersebut juga merupakan respons terhadap konflik eksternal khususnya resistensi dari kekuatan Kristen Eropa yang memandang Turki Utsmani sebagai ancaman. Ekspansi ini dapat dipahami dalam kerangka *interorganizational conflict* dan *conflict of interest*, sebagaimana dijelaskan dalam teori konflik Thomas & Kilmann dan analisis konflik politik. Penaklukan Konstantinopel pada 1453 adalah bentuk strategi kompetitif dalam mengelola konflik; Al-Fatih tidak memilih jalan kompromi, melainkan konfrontasi langsung dengan tujuan memperkuat legitimasi politik dan menyatukan kekuatan dalam negeri Utsmani. Kemenangan ini tidak hanya mengakhiri dominasi Byzantium, tetapi juga meminimalkan konflik internal karena berhasil membangkitkan semangat nasionalisme dan kepercayaan publik terhadap sultan.

Selain itu, ekspansi wilayah memperlihatkan bagaimana Al-Fatih mampu mengelola konflik internal seperti perlawanan elit istana atau ketidakpuasan kelompok non-Muslim melalui sistem *millet*, yang memberikan otonomi kepada komunitas agama tertentu. Pendekatan ini mencerminkan strategi kolaboratif dalam



menyelesaikan konflik, sejalan dengan model manajemen konflik dalam teori Thomas-Kilmann. Dengan demikian, ekspansi wilayah pada masa Al-Fatih tidak dapat dilepaskan dari keahliannya dalam menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang kuat dan pengelolaan konflik yang adaptif, yang secara langsung berkontribusi terhadap stabilitas politik Kesultanan Turki Utsmani.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan kontribusi Sultan Muhammad Al-Fatih dalam menciptakan stabilitas politik, tetapi juga menyajikan analisis komparatif sebagai upaya untuk melihat keunggulan kebijakan yang diterapkannya dibandingkan dengan masa sebelum dan sesudah pemerintahannya. Pendekatan ini penting guna menilai sejauh mana peran strategis Al-Fatih dalam membangun ketahanan politik yang kokoh di Kesultanan Turki Utsmani.

Pertama, situasi politik sebelum masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih (sebelum tahun 1451 M) diwarnai oleh ketidakstabilan internal, seperti konflik antara elit penguasa, lemahnya struktur administrasi, dan tekanan dari luar, khususnya dari negara-negara Kristen Eropa. Namun, setelah Al-Fatih naik tahta, ia mampu memanfaatkan situasi tersebut sebagai momentum untuk melakukan pembenahan sistem politik dan pemerintahan secara menyeluruh. Hasilnya, Kesultanan Utsmani memasuki era stabilitas politik yang kuat dan terorganisir.

Kedua, bila dibandingkan dengan sultan-sultan Utsmani sebelumnya, Muhammad Al-Fatih menampilkan karakter kepemimpinan yang lebih visioner dan strategis. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga membangun pondasi hukum dan administrasi yang adil, memperhatikan kesejahteraan rakyat, serta membuka ruang toleransi bagi komunitas non-Muslim. Kebijakan ini

menunjukkan bahwa stabilitas tidak dibangun semata-mata melalui penaklukan, tetapi melalui tata kelola pemerintahan yang terstruktur dan berpihak pada keadilan.

Ketiga, strategi Muhammad Al-Fatih dalam menghadapi konflik internal dan eksternal juga menjadi pembeda utama. Di satu sisi, ia mampu mengendalikan pemberontakan Janissary dan mengakomodasi elit-elit yang sebelumnya menolak reformasinya. Di sisi lain, ia juga berhasil meredam tekanan dari Eropa melalui pendekatan militer yang disertai dengan diplomasi yang cermat. Jika dibandingkan dengan masa pasca-Al-Fatih, stabilitas politik pada masa pemerintahannya tampak lebih solid dan terarah.

Dengan demikian, melalui pendekatan komparatif ini, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Sultan Muhammad Al-Fatih terhadap stabilitas politik Kesultanan Turki Utsmani tidak hanya bersifat monumental dalam aspek militer, tetapi juga fundamental dalam pembentukan sistem pemerintahan yang stabil, adaptif, dan berkelanjutan. Hal ini menjadikan era kepemimpinannya sebagai salah satu periode paling stabil dan progresif dalam sejarah kekhalifahan Utsmani.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Situasi politik pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih (1451–1481 M) ditandai oleh dinamika yang kompleks, baik dari dalam maupun luar kesultanan. Secara internal, ia menghadapi tantangan berupa pemberontakan Janissary dan penolakan dari kalangan elit terhadap beberapa kebijakan reformasi. Sementara dari luar, Kesultanan Utsmani mendapat tekanan kuat dari negara-negara Kristen Eropa yang merasa terancam oleh ambisi ekspansi wilayah, khususnya penaklukan Konstantinopel. Meskipun demikian, kondisi ini menjadi pijakan bagi Al-Fatih dalam membentuk struktur pemerintahan yang kuat dan stabil.
2. Kontribusi Sultan Muhammad Al-Fatih terhadap stabilitas politik Kesultanan Turki Utsmani sangat signifikan. Ia menerapkan strategi kepemimpinan yang visioner melalui reformasi administrasi dan hukum, penguatan sistem militer, kebijakan pendidikan, serta pendekatan diplomatik yang bijak terhadap minoritas non-Muslim. Pendekatan yang menyeluruh dan strategis ini membuat Al-Fatih mampu meredam konflik internal, mempertahankan stabilitas di tengah ancaman eksternal, dan menciptakan tatanan politik yang kokoh dan berkelanjutan di wilayah kekuasaannya.

## B. Saran

1. Kepada institusi pendidikan dan lembaga kajian sejarah Islam, disarankan agar menjadikan kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai studi kasus dalam pengajaran stabilitas politik dan kepemimpinan strategis dalam sejarah peradaban Islam. Pendekatan Al-Fatih yang mengintegrasikan kekuatan militer, kebijakan hukum, serta diplomasi lintas agama dapat menjadi inspirasi bagi pembentukan model kepemimpinan masa kini.
2. Kepada pemerintah dan pemangku kebijakan, nilai-nilai kepemimpinan Muhammad Al-Fatih perlu dijadikan acuan dalam menjaga stabilitas politik di tengah keberagaman masyarakat modern. Kombinasi antara visi jangka panjang, toleransi antarumat beragama, dan penegakan hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang stabil.
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian mengenai stabilitas politik pada masa Dinasti Turki Utsmani dapat diperluas dengan membandingkan berbagai era pemerintahan sultan lainnya, seperti Bayezid II atau Suleiman Al-Qanuni. Hal ini penting untuk mengetahui pola kesinambungan atau perubahan dalam pendekatan politik Dinasti Utsmani dari waktu ke waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Abdil Raulaelika Fauzan, Akshal Heldiansyah Ripdia, and Asyifa Zahra. "Democracy, Justice, and Utilitarianism in an Effort to Legitimize Bureaucratic Power." *Journal of Dialectics: Journal of Social Sciences*, (2021)

Afidah, Dahimatul. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.

Agoston, Gabor & Bruce Masters. *Encyclopedia Of The Ottoman Empire*. New York: An imprint of Infobase Publishing, 2009.

Al-Munyawī, Syaikh Ramzi. *Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinopel*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2012.

Al Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al Qurthubi JIL. 8*. Jakarta : Pustaka Azzam, Terj. Bahasa Indonesia, 2009.

Al-Salaabi, Ali Muhammad. *Sultan Muhammad Al-Fatih, The Conqueror of Constantinople The Fall of the West and the East*. London: Al-Firdous, 2009.

Arizona, et al., eds. 2021. *Manajemen Konflik*. Palembang: Bening Media Publishing.

Arniti, Ni Ketut. "Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4.2 (2020).

Armagan, Mustafa. *Muhammad Al-Fatih Kisah Kontroversial Sang Penakluk Konstantinopel*. Terj. Bahasa Indonesia, Cet. 1 Jakarta: Kaysa Media, 2014.

Ar Rasyiid, Muhammad Hafiidh. *Muhammad Al-Fatih, Kisah Sang Pemimpin dari Kesultanan Ustmaniyah*. Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia, Cet. Pertama, 2024.

Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Ustmaniyah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. Ed. Indonesia, 2003.

Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Muhammad Al-Fatih (1432-1481 M) Sang Penakluk Yang Di Ramalkan*. Solo: Aqwa Jembatan Ilmu, terj. Indonesia, 2017.

Asiah, Siti. *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi*. Gorontalo: Pustaka Cendikia, 2017.

Auliana, Nissa, et al., eds, 2022 *Demokrasi dan Monarki*. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

- A'yun, Manaya Qurrota *The Great History Of Muhammad Al-Fatih*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023.
- Baharun, Mohammad. *Buku Pintar Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2014.
- Bunting, Tony. *Pertempuran Varna*, *Ensiklopedia Britannica*, 3 November 2024, <https://www.britannica.com/event/Battle-of-Varna>. Diakses 18 Februari 2025.
- Charles, Alfred and Goodnews Osah, "Economic Theory Of Conflict", *IJAR: International Journal Of Advanced Research*, 6.10 (2018).
- Crouch, Harold. *Perkembangan Ekonomi & Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Pengkhidmatan, 1982.
- Crow, Gary M. et al., eds. 1996. *Leadership A Relevant and Realistic Role for Principals*. New York: Eye On Education.
- Emalia, Imas. *Historiografi Indonesia Sejak Masa Awal Sampai Masa Kontemporer*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.
- Fikri, et al., eds. 2023. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Haikal, Muhammad Fachran, et al., eds., "Strategi Militer Penaklukan Konstantinopel Dibawah Kepemimpinan Muhammad Al-Fatih Sebagai The Best Leader", *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.1 (2023)
- Hastuti, Proborini. "Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia", *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan Ri Tahun 2018* (2018).
- Herlina, Nina. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika, (2020).
- Hutahaean, Wendy Sepmady. *Teori Kepemimpinan*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Inalcik, Halil and Donald Quataert. *An Economic And Sosial Hitory of The Ottoman Empire Volumw 1: 1300-1600*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Irwanto, Dedi. and Sair Alian. *Metodologi dan Historiografi Sejarah*. Yogyakarta: Eja Publisher, 2014.
- Isharyanto, *Ilmu Negara*, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.
- Kh, Maman. *Metdologi Penelitian Agama:Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 2006.



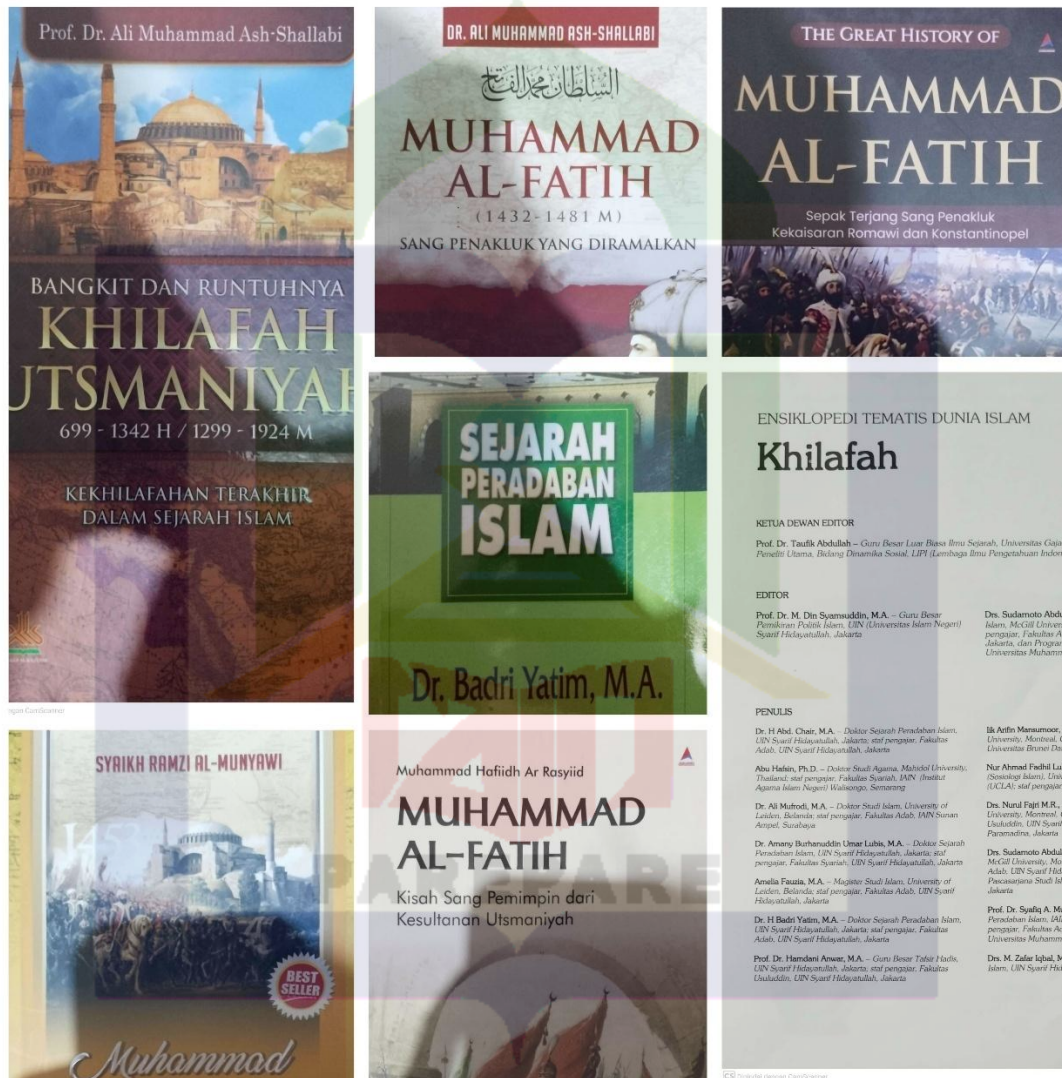
- Kilmann, Ralph H. *Mastering the Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI): Celebrating More than 50 Years of Resolving All Kinds of Conflicts, USA:Killman Diagnostics*, 2023.
- Kreitner, Robert. *Organizational Behavior*, New York: McGraw-Hill/Irwin, 2010.
- Kristianty,Theresia. "Peningkatan mutu pendidikan terpadu cara Deming", *Jurnal Pendidikan Penabur*, 4.4, (2005)
- Kumala, Siti Fatmawati, Anis Maslihah, and Imron Rossidy,"Kontribusi Muhammad Al-Fatih Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Turki", *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7.2 (2024).
- Kurniawan,Taufiq. "Mengenal Sistem Devşirme Pada Kesultanan Utsmani". *Balé Institute XXVII*, (2020).
- Kusuma, Yolan Sadewa Aditya and Lutfiah Ayundasari. "Penaklukan Konstantinopel tahun 1543: Upaya Turki Utsmani menyebarkan agama dan membentuk kebudayaan Islam di Eropa." *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1.1 (2021).
- Madden, Thomas F. *The New Concise History of The Crusades. United States of Amerika: Rowman & Littlefield Publishers, INC*, 2005.
- Ma'shum, Chamdan. "Implementasi Penerapan Kebijakan Millet Pasca Penaklukan 1453." *Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam* 1, (2024).
- McGuckin, John Anthony. *The Orthodox Church, An Introduction to its History, Doctrine, and Spiritual Culture*. Chichester: Blackwell Publishing Ltd, 2008.
- McShane, Steven L & Mary Ann Von Glinow. 2008. *Organizational Behavior: emerging realities for the workplace revolution*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Muchtar, Ibnu. *Partai Kuning*, Bina Dakwah, No. 228 (1999).
- Mufrodi, Ali. *et al., eds*. 2002. *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Khilafah*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam*, Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau 2010.
- Nicolle, David. *Cross And Crescent in the Balkans,The Ottoman Conquest of South-Eastern Europe (14<sup>th</sup>-15<sup>th</sup> Centuries)*. Barnsley: Pen & Sword Military, 2010.
- Padiatra, Aditia Muara. *Ilmu Sejarah Metode dan Praktik*. Gresik: Jendela Sastra Indonesia Press, 2020.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Ramadhani, Muhammad Muthahari, *et al.*, eds. 2022. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Ratna, Suminar Kaisha, "Implikasi Penaklukan Konstantinopel Terhadap Imperialisme Barat Di Dunia Islam", *Nihaiyyat: Journal Of Islamic Interdisciplinary Studies* 1.3 (2022).
- Ridwan, Muhammad and Nurhasanah Bakhtiar. "Nilai-Nilai Pendidikan dan Dakwah Muhammad al-Fatih Sebagai Penakluk Konstantinopel." *Wardah* 21.1 (2020).
- River, Charles. *The Rise of The Ottoman Empire*. Carolina Selatan: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017.
- River, Charles. *The Crusade of Varna*, 2022.
- Robbinsn, Stephen P. & Timothy A. Judge. *Essentials of Organizational Behavior*. New jersey: Pearson Prentice Hall, 2022.
- Runciman, Steven. *The Fall Of Constantinople 1453*. London: The Syndics of The Cambridge University Press, 1965.
- Sabiq, Abu Yusuf Ahmad. 2017. *Derajat Hadits Bahwa Sebaik-Baik Pemimpin Adalah Yang Menaklukan Konstantinopel*. Muslim.or.id. <https://muslim.or.id/29300-derajat-hadits-bahwa-sebaik-baik-pemimpin-adalah-yang-menaklukan-konstantinopel.html> (24 Januari 2025).
- Salsa Agustin, Rizki Maharani, and Rizki Ramadhani. "Dinamika ketegangan politik pasca pemilu 2024 dalam mempertahankan stabilitas demokrasi di Indonesia." *Governance*, (2024).
- Sanit, Arbi. *Sistem Politik Indonesia; Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Jakarta : Rajawali Press, 1982.
- Schermerhorn, Jhon R. *Introuction To Management*. New York: John Wiley & Sons, 2010.
- Sentono, Tarto. *Pengembangan Model Kepemimpinan Berbasis Trilogi Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara*. Klaten: CV Citta Gracia, (2019),
- Shaw, Stanford. *History Of The Ottoman Empire And Modern Turkey. Volume I: Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280-1808*. New York: Cambridge University Press, 1976.
- Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2016.

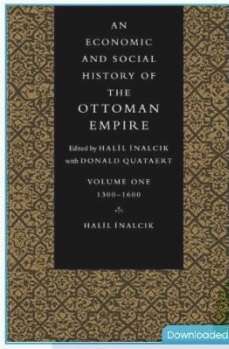
- Sintani, Lelo, et al., eds. 2022. *Dasar Kepemimpinan*. Jakarta: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi sebuah Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sudarmanto, Eko, et al., eds. 2021 *Manajemen Konflik*. Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Sunarso, Budi. *Teori Kepemimpinan*. Yogyakarta: CV. Madani Berkah Abadi, 2022.
- Sundari, Ariefah, et al., eds. 2022. *Kepemimpinan*. Lamongan: Academia Publication.
- Suparman, "Sistem Militer Sultan Muhammad Al-Fatih Dinasti Turki Utsmani." *Jurnal Al-Kifayah: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 3.1 (2024).
- Syafnidawaty. 2020. *Landasan Teori*. Banten: Universitas Raharja. <https://raharja.ac.id/2020/10/24/landasan-teori/> ( 3 September 2024)
- Turnbull, Stehphen. *The Ottoman Empire 1326-1699*. Oxford: Osprey Publishing, 2003.
- Tuwu, Darmin. *Konflik, Kekerasan dan Perdamaian*, Kendari: Litercy Institute, 2018.
- Wahyudi. *Teori Konflik dan Penerapannya pada Ilmu-Ilmu Sosial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.
- Wikansari, Rinandita, et al., eds. 2024 *Manajemen Konflik*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*, Depok: Rajawali Press, 2020.
- Yunus, Abd Rahim and Abu Haif. 2013. *Sejarah Islam Pertengahan*. Yogyakarta: Ombak.
- Yusof, Hasanuddin. *Sultan Muhammad Al-Fatih Penakluk Agung*. Seremban: Alami SDN BHD, Cet.1, 2020.
- Yusuf, Muhammad & Muhammad Shoffa Saifillah Al-Faruq. *Manajemen Konflik dan Stress (Orientasi dalam Organisasi)*. Wade Group, 2021.
- Zulaicha, Lilik. *Metologi sejarah*. UIN Sunan Ampel Surabaya: Government of Indonesia (GoI) and Islamic Development Bank (IDB), 2007.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Buku Fisik







Halil Inalcik with Donald Quataert

This major contribution to Ottoman history is now published in paperback in two volumes: the original single hardback volume (CUP 1995) has been widely acclaimed as a landmark in the study of one of the most enduring and influential empires of modern times. The authors provide a richly detailed account of the social and economic history of the Ottoman region, from the origins of the Empire around 1300 to the eve of its destruction during World War One. The breadth of range and the fullness of coverage make these two volumes essential for an understanding of contemporary developments in both the Middle East and the post-Soviet Balkan world.

Kategori: [Society, Politics & Philosophy - Anthropology](#)

Penerbit: Cambridge University Press

Halaman: 409

ISBN 13: 9780521574563

IPFS: [CID , CID Blake2b](#)

Jenis konten: Buku  
Tahun: 1997  
Bahasa: English  
ISBN 10: 0521574560  
File: PDF, 34.67 MB

Screenshot of a web browser displaying a PDF document titled "SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH The Conqueror of Constantinople The Fall of the West and the East" by Dr. Ali Muhammad Al-Salaabi. The browser address bar shows the URL: [https://kalamullah.com/Books/Sultan\\_Muhammad\\_Al\\_Fatih\\_by\\_Ali\\_sallabi.pdf](https://kalamullah.com/Books/Sultan_Muhammad_Al_Fatih_by_Ali_sallabi.pdf). The document is displayed on a white background with a large, faint watermark reading "PAREPARE" in the background.

# SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH

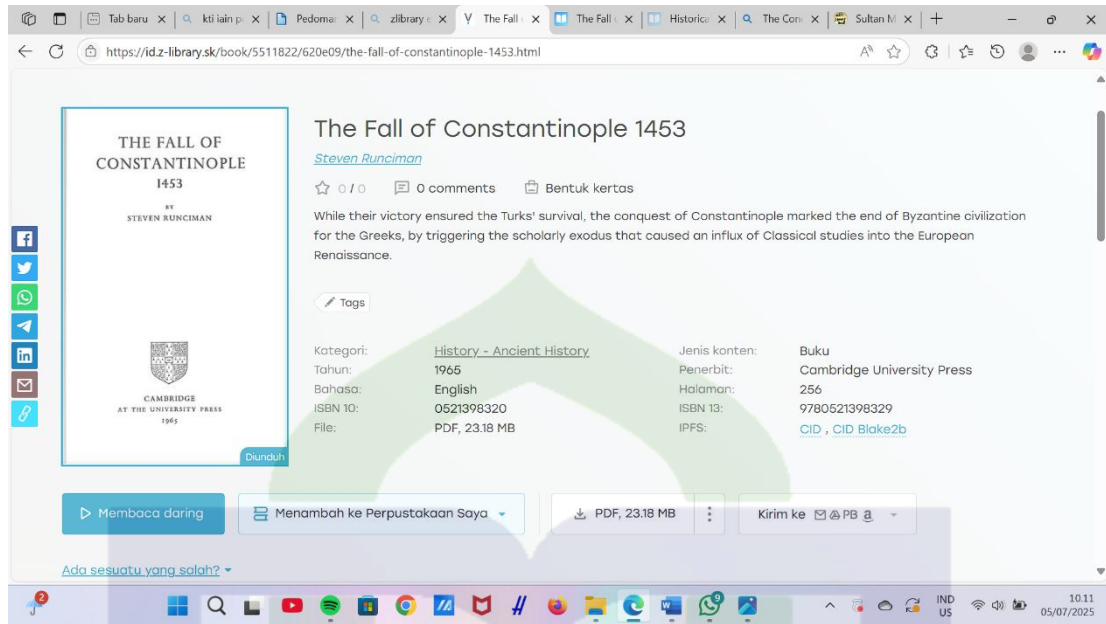
The Conqueror of  
Constantinople

The Fall of the West and  
the East

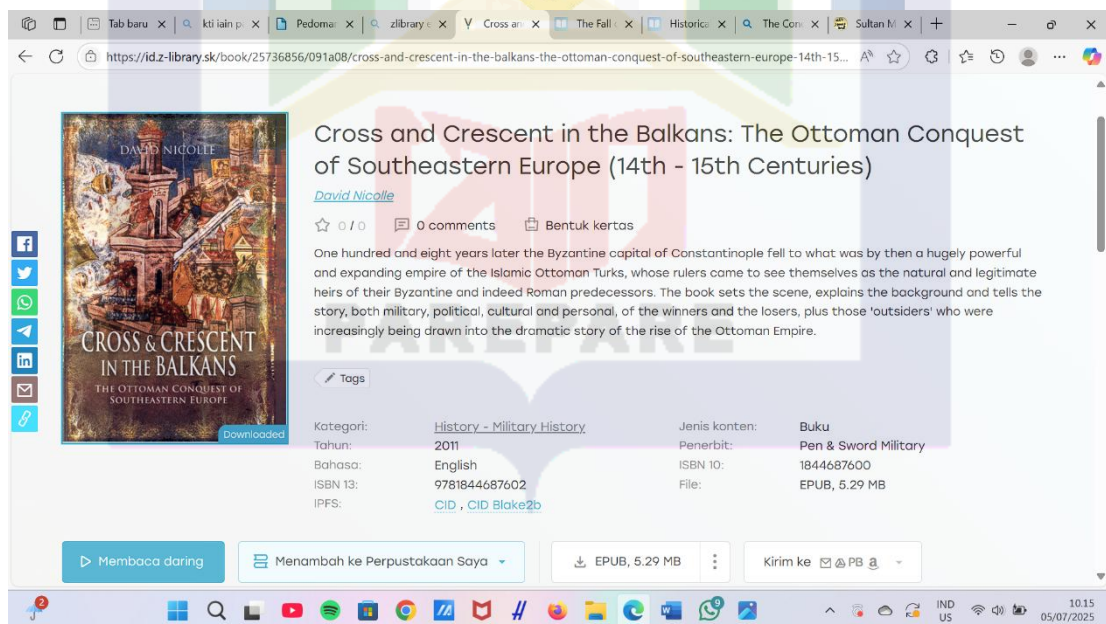
**Dr. Ali Muhammad Al-Salaabi**

PUBLISHED BY  
AL-FIRDOUS - LONDON

[https://kalamullah.com/Books/Sultan Muhammad Al Fatih by Ali sallabi.pdf](https://kalamullah.com/Books/Sultan%20Muhammad%20Al%20Fatih%20by%20Ali%20sallabi.pdf)

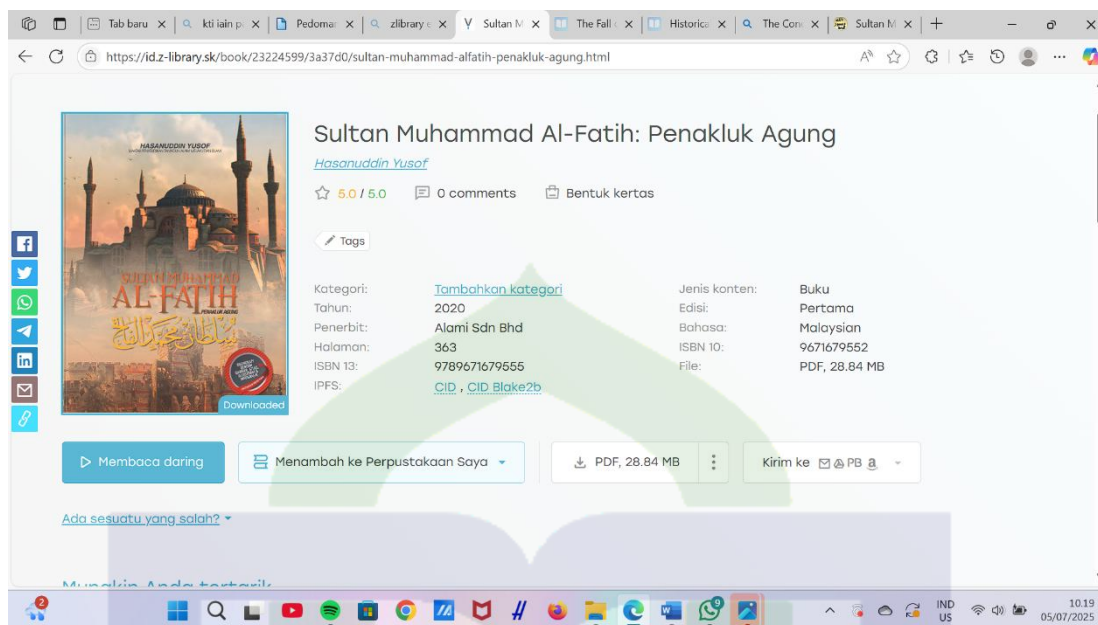


Link Akses: <https://id.z-library.sk/book/5511822/620e09/the-fall-of-constantinople-1453.html>

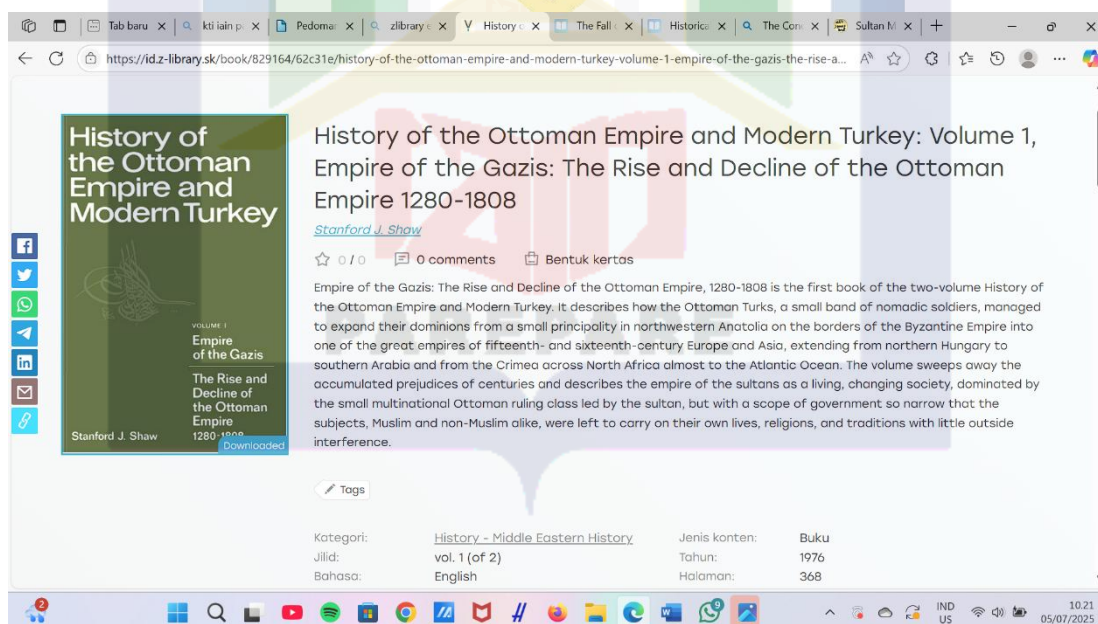


Link Akses: <https://id.z-library.sk/book/25736856/091a08/cross-and-crescent-in-the-balkans-the-ottoman-conquest-of-southeastern-europe-14th-15th-centurie.html>

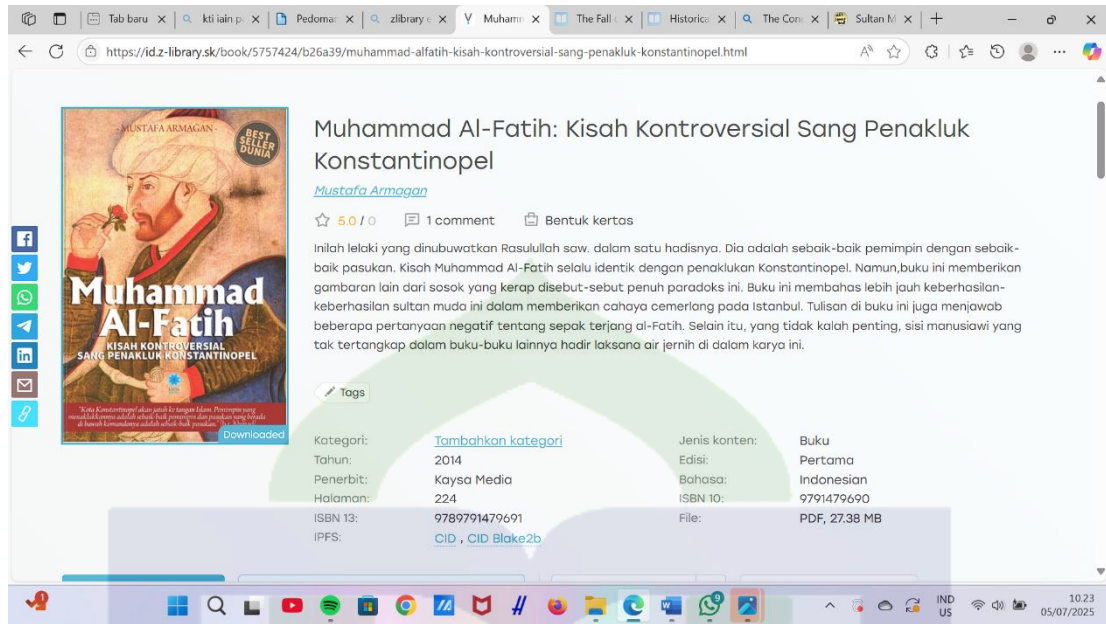




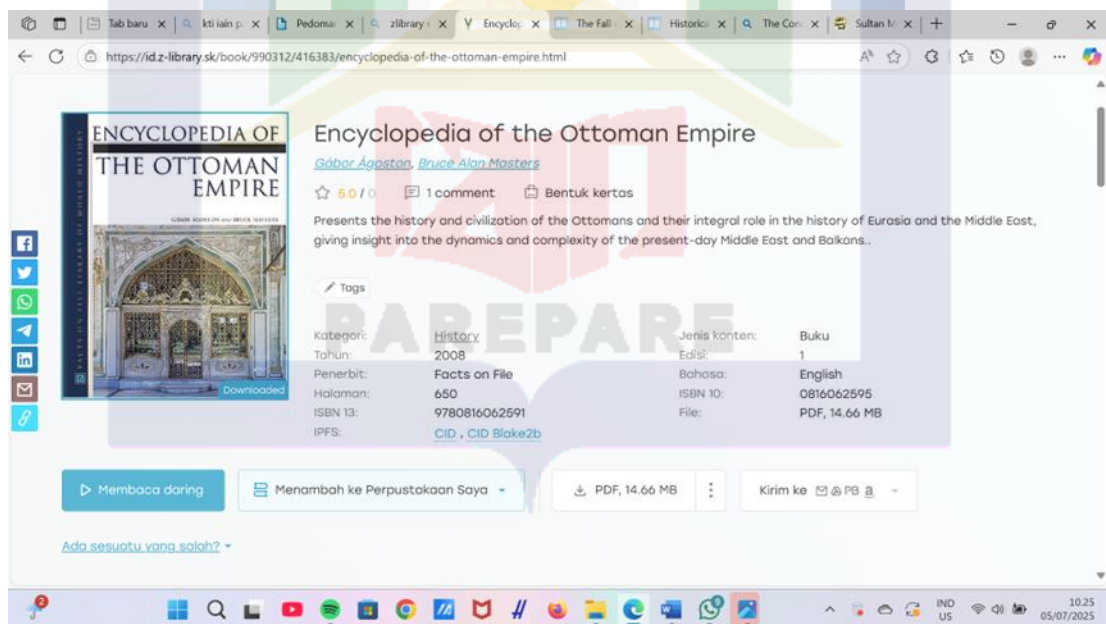
Link Akses: <https://id.z-library.sk/book/23224599/3a37d0/sultan-muhammad-alfatih-penakluk-agung.html>



Link Akses: <https://id.z-library.sk/book/829164/62c31e/history-of-the-ottoman-empire-and-modern-turkey-volume-1-empire-of-the-gazis-the-rise-and-decline.html>



Link Akses: <https://id.z-library.sk/book/5757424/b26a39/muhammad-alfatih-kisah-kontroversial-sang-penakluk-konstantinopel.html>




Link Akses: <https://id.z-library.sk/book/990312/416383/encyclopedia-of-the-ottoman-empire.html>



Link Akses: <https://id.z-library.sk/book/17254348/b49576/the-ottoman-empire-13261699-essential-histories.html>



### Lampiran 3. Sk Pembimbing




DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
NOMOR : B-2307/In.39/FUAD.03/PP.00.9/07/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

Menimbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024</li> <li>b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.</li> </ul>
Mengingat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;</li> <li>7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;</li> <li>8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;</li> <li>9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare</li> <li>10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.</li> </ul>
Memperhatikan :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 04 Juli 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024</li> <li>b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 2307 Tahun 2024, tanggal 04 Juli 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah;</li> </ul>
Menetapkan	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024</li> <li>b. Menunjuk saudara: <b>Dra. Hj. Hasnani, M.Hum.</b>, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :  Nama Mahasiswa : NASRUL MUHAJIR  NIM : 2120203880230007  Program Studi : Sejarah Peradaban Islam  Judul Penelitian : PERKEMBANGAN PERADABAN ISLAM PADA MASA SULTAN HASANUDDIN AL-FATIH 1451-1481</li> <li>c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;</li> <li>d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;</li> <li>e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.</li> </ul>

Ditetapkan Parepare  
Pada tanggal 04 Juli 2024  
Dekan,  
  
Dr. A. Nurkidam, M.Hum.  
NIP 196412311992031045

## BIODATA



**NASRUL MUHAJIR**, Lahir pada tanggal 13 November 2002. Merupakan anak Pertama dari dua bersuadara anak Ibu Nursia bekerja sebagai ibu rumah tangga dan Pak Muhajir bekerja sebagai tukang kayu.

Penulis memulai Pendidikan dari TK PGRI Paleteang pada tahun 2008 dan tamat 2009. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SD 24 Pinrang pada tahun 2009 dan tamat tahun 2015.

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Pinrang pada tahun 2015 dan tamat tahun 2018. Kemudian melanjutkan Pendidikan menengah atas di MAN Pinrang pada tahun 2018 dan selesai tahun 2021. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yaitu Strata satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil jurusan sejarah Peradaban Islam di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah pada tahun 2021 masuk melalui Jalur SPAN-PTKIN. Dengan mengucapkan syukur, Akhirnya penulis telah menyelesaikan skripsinya sebagai tugas dan persyaratan utama mahasiswa dalam memenuhi persyaratan utama dalam meraih gelar Sarjana Humaniora (S.hum) pada program S1 IAIN Parepare dengan judul “KONTRIBUSI MUHAMMAD AL-FATIH TERHADAP STABILITAS POLITIK TURKI USMANI (1451-1481 M)”



## TURNITIN

**20%**

SIMILARITY INDEX

**19%**

INTERNET SOURCES

**6%**

PUBLICATIONS

**7%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.iainpare.ac.id">repository.iainpare.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://alsalabi.com">alsalabi.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://id.wikipedia.org">id.wikipedia.org</a> Internet Source	<1%
7	<a href="http://www.syekhnurjati.ac.id">www.syekhnurjati.ac.id</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1%
10	<a href="http://ia601803.us.archive.org">ia601803.us.archive.org</a> Internet Source	<1%
11	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1%
12	<a href="http://ojs.unsiq.ac.id">ojs.unsiq.ac.id</a> Internet Source	<1%